

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015 - 2019







MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 42/Permentan/RC.020/11/2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 09/PERMENTAN/RC.020/3/2016  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Kementerian Pertanian telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
  - b. bahwa untuk meningkatkan capaian pembangunan pertanian melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian dengan pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 09/PERMENTAN/RC.020/3/2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019.

#### Pasal I

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 28 Nopember 2017



Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Sidang Perekonomian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia; dan
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.



**LAMPIRAN**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 42/Permentan/RC.020/11/2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 09/PERMENTAN/RC.020/3/2016  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2015-2019**





# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i	
DAFTAR TABEL.....	iii	
DAFTAR GAMBAR.....	v	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang.....	2
	B. Kondisi Umum.....	4
	C. Potensi.....	26
	D. Permasalahan.....	30
	E. Tantangan.....	37
<b>BAB II</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>45</b>
	A. Visi.....	46
	B. Misi.....	46
	C. Tujuan.....	47
	D. Sasaran Strategis.....	48
<b>BAB III</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	<b>53</b>
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	54
	B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian.....	59
	C. Langkah Operasional.....	102
	D. Program Pembangunan Pertanian.....	122
	E. Kerangka Regulasi.....	124
	F. Kerangka Kelembagaan.....	126



BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA	
	PENDANAAN.....	133
	A. Target Kinerja .....	134
	B. Kerangka Pendanaan.....	136
BAB V	PENUTUP .....	141
LAMPIRAN 1.....		145
LAMPIRAN 2 .....		301



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Tahun 2011-2014 .....	5
Tabel 2.	Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010-2014.....	10
Tabel 3.	Perkembangan PDB Pertanian per Tenaga Kerja Pertanian Tahun 2010-2014 atas Harga Konstan Tahun 2000 (dalam Rp. 000) .....	11
Tabel 4.	Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2010-2014.....	15
Tabel 5.	Produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2010-2014.....	16
Tabel 6.	Produksi Komoditas Utama Hortikultura Tahun 2010-2014.....	17
Tabel 7.	Produksi Komoditas Utama Perkebunan Tahun 2010-2014.....	18
Tabel 8.	Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2010 – 2014.....	19
Tabel 9.	Anggaran APBN di Lingkup Kementerian Pertanian dan Pekerjaan Umum dalam Mendukung Ketahanan Pangan Tahun 2009-2014.....	21
Tabel 10.	Konsumsi Beras di Tingkat Rumah Tangga Tahun 2010-2014.....	24
Tabel 11.	Pola Pangan Harapan Tahun 2010 – 2014 .....	25
Tabel 12.	Tujuan dan Indikator Tujuan .....	48



Tabel 13. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Pertanian .....	49
Tabel 14. Sasaran Produksi Komoditas Andalan Tahun 2014-2019 .....	55
Tabel 15. Sasaran Kedaulatan Pangan Tahun 2014-2019.....	58
Tabel 16. Struktur Program dan Eselon I Kementerian Pertanian .....	123
Tabel 17. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian 2015-2019 .....	134



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Angkatan Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian Tahun 2010-2014.....	6
Gambar 2. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian Tahun 2010-2014 .....	7
Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010-2014 .....	13
Gambar 4. Struktur Organisasi Kementerian Pertanian .....	127







# BAB I



# PENDAHULUAN





## A. Latar Belakang

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang- Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJPN yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sedangkan RPJMN 2015-2019 sebagai tahapan ketiga dari RPJPN 2005-2025, memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumberdaya maritim dan kelautan.

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian tetap menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Pada RPJMN 2015-2019, NAWA CITA menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan,



agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Peningkatan kedaulatan merupakan salah satu bagian dari Agenda 7 Nawa Cita yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Selain Kedaulatan Pangan yang ada dalam Nawa Cita, juga terdapat Peningkatan Agroindustri sebagai bagian dari agenda 6 yaitu Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Kedaulatan pangan dan Agroindustri menjadi bagian dalam upaya mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri, yang digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat hingga 8,0 persen, tumbuhnya investasi 12,1 persen, serta ekspor yang diperkirakan tumbuh 12,2 persen di tahun 2019. Melalui upaya ketahanan pangan dan agroindustri, diharapkan sektor pertanian tumbuh 4,5 persen pertahun.

Dari kedua sub agenda kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri, maka Kementerian Pertanian hadir dengan visi "Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". Tercapainya visi tersebut dapat dilihat dari sejauh mana sasaran strategis yang ditetapkan lima tahun ke depan, yang meliputi: 1) meningkatnya pendapatan keluarga petani; 2) meningkatnya ketahanan pangan nasional; 3) meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional; 4) terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional;



5) terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional; 6) stabilnya harga komoditas pertanian strategis; 7) dimanfaatkannya inovasi teknologi; 8) tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan; 9) terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan; 10) meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di perdesaan; 11) meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional serta 12) terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan.

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun empat kebijakan yaitu (1) melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian, (2) melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan, (3) membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional, serta (4) Memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian.

## B. **Kondisi Umum**

Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian dalam arti sempit (di luar perikanan dan kehutanan) pada tahun 2014, yaitu sekitar 879,23 triliun rupiah atau 10,26 % dari PDB nasional yang besarnya 8.568,12 triliun rupiah (berdasarkan harga konstan tahun 2010). Selama periode 2010-2014, pertumbuhan PDB pertanian sempit tersebut berkisar antara 3,47 hingga 4,58 % dengan rata-rata sekitar 3,90 %, pada saat yang sama PDB nasional tumbuh sekitar 5,70 %. Dengan adanya ketimpangan pertumbuhan tersebut, maka kontribusi pertanian



semakin menurun dari 10,99 % di tahun 2010 menjadi 10,26 % dari total PDB nasional di tahun 2014.

Tabel 1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian Tahun 2011-2014

Subsektor	2011	2012	2013	2014	Rerata
PDB Nasional	6,17	6,03	5,58	5,02	5,70
1.1. Tanaman Pangan		4,90	1,97	0,24	1,53
1.2. Tanaman Hortikultura	8,77	(2,21)	0,67	4,19	2,85
1.3. Tanaman Perkebunan	4,94	6,95	6,15	5,83	5,97
1.4. Peternakan	4,80	4,97	5,08	5,44	5,07
1.5. Jasa Pertanian dan Perburuan	3,83	6,07	5,91	2,58	4,60

Sumber: BPS

Selama periode 2010-2014, sektor pertanian masih merupakan sektor dengan pangsa penyerapan tenaga kerja terbesar (Gambar 1), walaupun ada kecenderungan menurun. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2010 sekitar 38,69 juta tenaga kerja atau sekitar 35,76% dari total penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014 penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan menjadi 35,76 juta tenaga kerja atau 30,27%. Data penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tersebut hanya berasal dari kegiatan sektor pertanian primer, belum termasuk sektor sekunder dan tersier dari sistem dan usaha agribisnis. Bila tenaga kerja dihitung dengan yang terserap pada sektor sekunder dan tersiernya, maka kemampuan sektor pertanian tentu akan lebih besar. Walaupun kemampuan sektor pertanian dalam penyerapan



tenaga kerja nasional sangat besar, namun di sisi lain justru menjadi beban bagi sektor Pertanian dalam meningkatkan produktivitas tenaganya.



Gambar 1. Perkembangan Angkatan Kerja Sektor Pertanian dan Non Pertanian Tahun 2010-2014 Sumber: BPS (diolah)

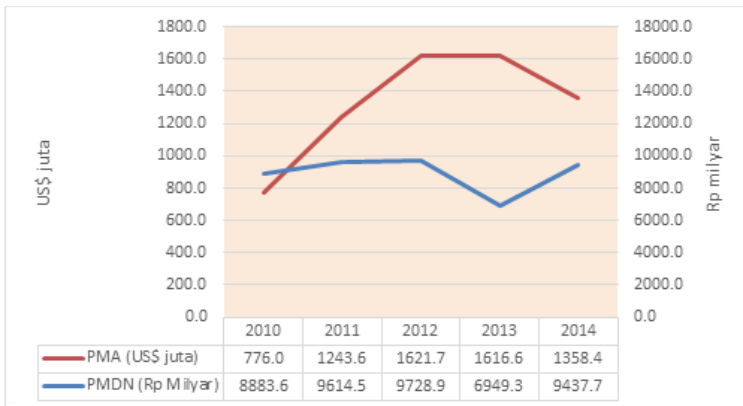
Investasi sektor pertanian terdiri dari investasi swadaya petani, pemerintah dan swasta. Diperkirakan total investasi di sektor pertanian mencapai 400 trilyun rupiah di tahun 2014. Investasi sektor pertanian terbesar berasal dari swadaya petani dalam bentuk prasarana lahan serta sarana pendukungnya. Sedangkan investasi pemerintah melalui APBN dan APBD yang diperkirakan hanya sekitar 4 % dari total investasi di sektor pertanian.

Salah satu indikator aliran investasi ke sektor pertanian



adalah persetujuan investasi di sektor tersebut. Selama periode 2010-2014 persetujuan investasi di sektor pertanian dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) fluktuatif namun masih meningkat dengan pertumbuhan sekitar 4,2 %/ tahun. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor pertanian meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 18,6 %/ tahun. Nilai investasi PMDN di sektor pertanian di tahun 2014 adalah sekitar 9,43 triliun rupiah, sedangkan untuk PMA sekitar 1,35 milyar US\$.

Realisasi investasi sektor pertanian baik PMDN maupun PMA, lebih terfokus pada sub- sektor tanaman pangan dan perkebunan, dibandingkan dengan sub-sektor peternakan. Pada periode 2010–2014, realisasi investasi PMDN dan PMA pada sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan mencapai 98%. Sementara sisanya adalah investasi di sub-sektor peternakan.



Gambar 2. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Sektor Pertanian Tahun 2010-2014



Secara keseluruhan neraca perdagangan sektor pertanian masih berada pada posisi surplus. Hal ini karena sumbangan surplus neraca perdagangan sub-sektor perkebunan yang relatif besar, sementara sub-sektor lainnya cenderung pada posisi defisit. Laju pertumbuhan ekspor selama periode 2010-2014 sebesar 7,4 %/ tahun, sementara laju pertumbuhan impor lebih tinggi yaitu sekitar 13,1 %/tahun, walaupun demikian secara rata-rata pertumbuhan neraca perdagangan masih tumbuh positif dengan laju sekitar 4,2 %/ tahun.

Kondisi perdagangan komoditas tanaman pangan Indonesia dalam posisi defisit atau dengan kata lain bahwa Indonesia menjadi negara net importer. Komoditas pangan yang menyumbang impor terbesar adalah gandum, kedelai diikuti oleh jagung dan beras. Sebaliknya komoditas penyumbang ekspor terbesar adalah ubi kayu.

Kondisi defisit neraca perdagangan hortikultura terutama terjadi pada kelompok komoditas buah dan sayur, sementara pada tanaman obat dan tanaman hias menunjukkan surplus perdagangan. Buah-buahan manggis dan mangga menjadi penyumbang ekspor terbesar sedangkan untuk kelompok sayuran adalah kol, wortel, tomat dan kentang. Sebaliknya, buah-buahan yang dominan menyedot devisa adalah durian dan jeruk dan untuk kelompok sayuran adalah bawang merah, bawang putih, kentang dan wortel.

Sub-sektor perkebunan merupakan penyumbang ekspor terbesar di sektor







pertanian dengan nilai ekspor yang jauh lebih besar dibandingkan nilai impornya. Sebagian besar produk perkebunan utama diekspor ke negara-negara lain. Sedangkan produk turunan yang diimpor adalah gula yang selama ini masih diimpor dalam bentuk *raw sugar*. Ekspor komoditas perkebunan hanya tumbuh dengan laju 6,9 %/tahun, sementara impor tumbuh dengan laju sebesar 22,2%/tahun. Laju pertumbuhan nilai ekspor sebagian komoditas perkebunan seperti kakao, tembakau dan teh mengalami percepatan, dan sebagian mengalami perlambatan yaitu kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, dan tebu.

Komoditas peternakan utama Indonesia yang diperdagangkan di pasar internasional terdiri dari daging (sapi, kambing/domba, babi, ayam), ternak hidup sumber daging (sapi, kerbau, babi, kambing), hati/jeroan, telur untuk konsumsi, dan susu. Laju pertumbuhan nilai ekspor sub-sektor peternakan rata-rata sebesar 43,8%/tahun, sedangkan laju pertumbuhan nilai impornya meningkat 33,9%/ tahun. Kondisi ini mencerminkan defisit neraca perdagangan sub-sektor peternakan dan besaran defisit neraca perdagangan cenderung menurun. Secara keseluruhan, sumber defisit neraca perdagangan komoditas peternakan yang terbesar adalah impor susu, ternak sapi dan daging sapi, dengan jumlah yang sangat besar, sementara sumber surplus hanya ekspor ternak babi yang jumlahnya sangat kecil.



Tabel 2. Neraca Perdagangan Sektor Pertanian Tahun 2010-2014

No	Sub Sektor	Tahun ( juta US\$)				
		2010	2011	2012	2013	2014*)
<b>1</b>	<b>Tanaman Pangan</b>					
	- Ekspor	478	585	151	967	560
	- Impor	3.894	7.024	6.307	5.659	6.481
	- Neraca	-3.416	-6.439	-6.156	-4.692	-5.921
<b>2</b>	<b>Hortikultura</b>					
	- Ekspor	391	491	505	784	752
	- Impor	1.293	1.686	1.813	1.469	1.929
	- Neraca	-902	-1.195	-1.309	-685	-1.176
<b>3.</b>	<b>Pertanian</b>					
	- Ekspor	32.065	42.673	34.331	33.680	39.765
	- Impor	12.447	18.744	13.931	12.828	17.365
	- Neraca	19.619	23.928	20.400	20.852	22.400

Sumber: BPS (diolah)

Selama periode 2010-2014, secara umum NTP meningkat walaupun sempat menurun pada tahun 2013. Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada tahun 2011. Peningkatan NTP tersebut disebabkan oleh laju peningkatan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan laju peningkatan indeks harga yang dibayar petani. Peningkatan indeks harga yang diterima petani merupakan hasil dari kebijakan Kementerian Pertanian dalam upaya perlindungan harga komoditas pertanian, sedangkan peningkatan indeks harga yang dibayar petani merupakan hasil kebijakan diluar kendali



Kementerian Pertanian. Peningkatan NTP dapat dilakukan dengan meningkatkan indeks harga yang diterima petani, namun hal ini dapat memacu inflasi.

Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai dari pembangunan pertanian. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan pertanian. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam membangun pertanian merupakan sarana atau instrumen bagi para pengambil kebijakan di bidang pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Tingkat kesejahteraan petani diukur dari: (1) pendapatan per kapita; (2) tingkat kemiskinan dan (3) tingkat kerawanan pangan rumah tangga pertanian.

Tabel 3. Perkembangan PDB Pertanian per Tenaga Kerja Pertanian Tahun 2010-2014 atas Harga Konstan Tahun 2000 (*dalam Rp 000*)

Tahun	PDB Total/ Kapita	PDB Pertanian / TK Pertanian (dalam arti luas)	PDB Pertanian / TK Pertanian (dalam arti sempit)
2010	9.703,46	7.116,64	6.120,72
2011	10.192,14	7.416,99	6.662,32
2012	10.683,12	7.950,24	6.947,53
2013	11.146,91	8.724,54	7.639,48
2014	11.641,88	9.032,85	7.966,07

Sumber: BPS (diolah)

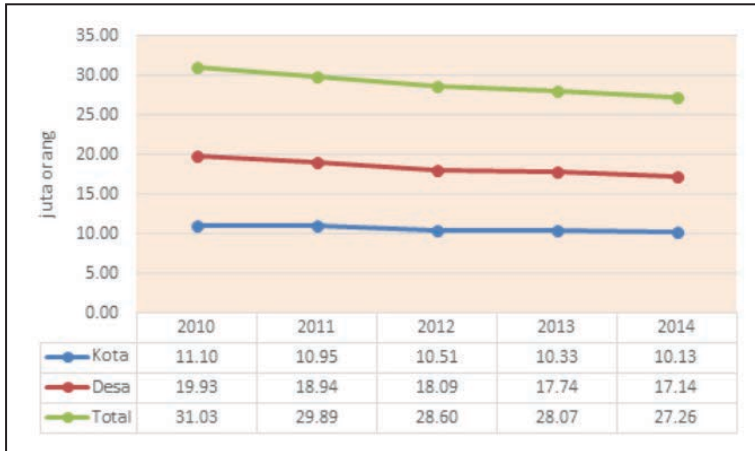
Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasar harga konstan tahun 2000, tingkat pendapatan petani untuk



pertanian dalam arti luas maupun pertanian sempit menunjukkan peningkatan yang diindikasikan oleh pertumbuhan yang positif masing-masing sebesar 5,64 % dan 6,20 %/tahun selama kurun waktu 2010–2014. Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan, namun demikian secara nominal tingkat pendapatan/kapita petani tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di pertanian didekati dengan menggunakan data jumlah dan persentase penduduk miskin di desa. Jumlah penduduk miskin di desa umumnya lebih banyak dengan persentase yang lebih besar dibandingkan di kota. Pada periode 2010–2014, jumlah penduduk miskin di perdesaan atau pada sektor pertanian menurun dengan laju sebesar -3,69 %/tahun atau menurun dari sekitar 19,93 juta pada tahun 2010 menjadi 17,14 juta pada tahun 2014. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan pada tahun 2010 sebanyak 11,10 juta berkurang sebesar -2,25 %/tahun sehingga menjadi 10,13 juta di tahun 2014.





Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010-2014

Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan yang ditinjau dalam dua dimensi: (a) kedalaman dengan kategori ringan, sedang, dan berat; serta (b) jangka waktu/periode kejadian dengan katagori kronis untuk jangka panjang dan transien untuk jangka pendek/fluktuasi. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori perkapita perhari dengan nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) sebesar 2.000 kkal/ hari. Jika konsumsi perkapita adalah kurang atau lebih kecil dari 70 % dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan, sekitar 70 hingga 90 % dari AKG dikategorikan rawan pangan, dan lebih dari 90 % dari AKG termasuk katagori tahan pangan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang sangat rawan pangan pada tahun 2011 sekitar 42,08 juta orang bertambah menjadi 47,65 juta pada tahun 2012, pada tahun 2013 menurun sedikit menjadi 47,02 juta. Sementara itu,



penduduk yang rawan pangan pada tahun 2011 mencapai 78,49 juta orang, bertambah menjadi 80,58 juta pada tahun 2012, dan bertambah lagi menjadi 83,65 juta pada tahun 2013. Sedangkan penduduk tahan pangan pada tahun 2011 sebanyak 121,01 juta orang, menurun menjadi 116,61 juta pada tahun 2012, dan pada tahun 2011 berkurang menjadi 116,31 juta. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari jumlah penduduk yang tahan pangan menjadi tidak tahan pangan.

### **Capaian Produksi Komoditas Pertanian Tahun 2010-2014**

Produksi padi antara tahun 2010-2014 meningkat rata-rata sebesar 1,63 %/tahun. Demikian pula produksi jagung meningkat walaupun dengan tingkat yang lebih rendah yaitu sekitar 1,11 %/tahun dan produksi kedelai meningkat sebesar 1,93 %/tahun. Peningkatan produksi padi diantaranya karena peningkatan luas panen seluas 540 ribu ha dan produktivitas sebesar 1,20 ku/ha. Pertumbuhan luas panen padi di Jawa hanya sekitar 0,20 %/tahun sedangkan di luar Jawa sekitar 1,76 %/tahun. Demikian pula dengan peningkatan produktivitas padi di Jawa hanya sekitar 0,08 %/tahun sedangkan di luar Jawa sekitar 1,45 %/tahun.





Tabel 4. Produksi Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2010-2014

No	Komoditas		TAHUN					Rerata Pertumbuhan (%)
			2010	2011	2012	2013	2014	
			(ribu ton)					
1	Padi	Jawa	36.375	34.405	36.527	37.493	36.663	0,30
		Luar Jawa	30.094	31.352	32.529	33.787	34.183	3,24
		Indonesia	66.469	65.757	69.056	71.280	70.846	1,64
2	Jagung	Jawa	9.944	9.467	10.712	10.095	10.159	0,81
		Luar Jawa	8.383	8.176	8.675	8.416	8.849	1,45
		Indonesia	18.327	17.643	19.387	18.511	19.008	1,08
3	Kedelai	Jawa	633	574	604	522	622	0,37
		Luar Jawa	274	277	240	258	332	5,98
		Indonesia	907	851	844	780	954	1,93

Sumber: Ditjen Tanaman Pangan bekerjasama dengan BPS

Peningkatan produksi jagung (Tabel 4) terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sekitar 2,87 %/thn, walaupun luas panen mengalami penurunan sekitar -1,77 %/tahun. Produktivitas jagung dan kedelai baik di Jawa maupun di luar Jawa mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Tabel 5).





Tabel 5. Produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2010-2014

No	Komoditas		TAHUN					Rerata Pertumbuhan (%)
			2010	2011	2012	2013	2014	
			(ku/ha)					
1	Padi	Jawa	57,21	55,81	59,05	57,98	57,29	0,09
		Luar Jawa	43,65	44,54	44,81	45,85	46,21	1,44
		Indonesia	50,15	49,80	51,36	51,52	51,35	0,60
2	Jagung	Jawa	46,49	48,65	53,26	51,54	51,98	2,94
		Luar Jawa	42,07	42,61	44,57	45,19	47,00	2,82
		Indonesia	44,36	45,65	48,99	48,44	49,54	2,84
3	Kedelai	Jawa	14,40	14,20	15,80	15,23	16,42	3,51
		Luar Jawa	12,38	12,71	12,91	12,41	14,06	3,43
		Indonesia	13,73	13,68	14,85	14,16	15,51	3,28

Sumber data : Data Statistik Ditjen Tanaman Pangan

Pada Tabel 6 terlihat bahwa produksi komoditas utama hortikultura selama kurun waktu 2010–2014 menunjukkan pola yang berfluktuatif. Hal ini terjadi tidak hanya pada komoditas sayuran, tetapi juga pada kelompok komoditas buah dan florikultura. Selama periode tahun 2010-2014, laju pertumbuhan produksi tertinggi adalah pada komoditas mangga yaitu sebesar 21,95 %/tahun, disusul manggis, krisan dan temulawak masing-masing sebesar 13,82 %, 12,26 % dan 11,00 %. Sebaliknya laju pertumbuhan produksi terkecil yaitu pada cabe merah, kentang dan jeruk yang pertumbuhannya di bawah 4,13 %/tahun.





Tabel 6. Produksi Komoditas Utama Hortikultura Tahun 2010-2014

No	Komoditas	TAHUN					Rerata Pertumbuhan (%/Thn)
		2010	2011	2012	2013	2014	
		(ton)					
1	Cabe Besar	807.160	888.852	954.310	1.012.879	926.000	3,76
2	Cabe Rawit	521.704	594.227	702.214	713.502	598.700	4,4
3	Bawang Merah	1.048.934	893.124	964.195	1.010.773	1.201.900	4,21
4	Kentang	1.060.805	955.488	1.094.232	1.124.282	1.211.400	3,77
5	Mangga	1.287.287	2.131.139	2.376.333	2.192.928	2.598.092	21,95
6	Pisang	5.755.073	6.132.695	6.189.043	6.279.279	7.070.489	5,38
7	Jeruk	2.028.904	1.818.949	1.611.768	1.654.732	2.243.837	4,13
8	Durian	492.139	883.969	888.127	759.055	846.503	19,27
9	Manggis	84.538	117.595	190.287	139.602	113.096	13,82
10	Salak	749.876	1.082.125	1.035.406	1.030.401	980.969	8,68
11	Temulawak	26.671	24.105	44.085	33.441	31.729	11
12	Krisan	185.232	305.867	397.651	387.208	218.910	12,26
13	Melati	21.600	22.541	22.862	30.258	26.544	6,46

Sumber data : Data Statistik Ditjen Hortikultura

Pola pertumbuhan produksi komoditas perkebunan unggulan nasional selama periode 2010-2014 bervariasi. Terdapat 12 komoditas yang menunjukkan pola positif, yaitu tembakau, kelapa sawit, kapas, cengkeh, karet, tebu, lada, kopi, nilam, kakao dan kelapa. Sedangkan tiga komoditas lainnya, yaitu jarak pagar, teh dan jambu mete karena berbagai kendala menunjukkan pola pertumbuhan produksi negatif dengan laju penurunan rata-rata sekitar -1,18 sampai -12,14 %/ tahun. Kemiri sunan tidak mengalami kinerja produksi yang



menggemirakan karena sampai dengan tahun 2013 capaian produksi sangat rendah (Tabel 7).

Tabel 7. Produksi Komoditas Utama Perkebunan Tahun 2010-2014

No	Komoditas	TAHUN					Laju Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	
		(ton)					
1	Karet	2.734.854	2.990.184	3.012.254	3.237.433	3.153.186	3,74
2	Kelapa Sawit	21.958.120	23.096.541	26.015.518	27.782.004	29.278.189	7,5
3	Kelapa	3.166.666	3.174.379	3.189.897	3.051.585	3.005.916	-1,28
4	Kopi	686.921	638.647	691.163	675.881	643.857	-1,44
5	Kakao	837.918	712.231	740.513	720.862	728.414	-3,16
6	Jambu Mete	115.149	114.789	116.915	116.113	131.302	3,48
7	Lada	83.663	87.089	91.039	91.039	87.448	1,17
8	Cengkeh	98.386	72.207	99.890	109.694	122.134	8,22
9	Teh	156.604	150.776	145.575	145.460	154.369	-0,28
10	Jarak Pagar	7.081	6.576	6.424	4.821	4.467	-10,43
11	Kemiri Sunan	2	1	0	0	3	-37,5
12	Tebu	2.290.116	2.267.887	2.591.687	2.551.026	2.579.173	3,21
13	Kapas	3.174	2.275	2.948	1.871	761	-23,65
14	Tembakau	135.678	214.524	260.818	164.448	198.301	15,83
15	Nilam	2.206	2.866	2.648	2.082	2.103	0,49

Sumber data : Data Statistik Ditjen Perkebunan

Peningkatan produksi dipengaruhi oleh meningkatnya luas areal tanam, penggunaan bibit/ benih bervariasi unggul, adanya intervensi pemerintah melalui kegiatan rehabilitasi,



perluasan areal, pemberdayaan petani, penilaian Blok Penghasil Tinggi (BPT), pemeliharaan kebun induk, fasilitasi bibit/benih unggul, penanganan pascapanen, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Penurunan produksi pada beberapa komoditas disebabkan karena anomali iklim. Selain itu, penurunan produksi disebabkan oleh penurunan luas areal, serta rendahnya produktivitas karena tanaman tua seperti yang dialami pada perkebunan teh. Selain itu menurunnya produksi juga disebabkan pada komoditi yang mengalami tingkat harga yang kurang menguntungkan seperti pada komoditas teh sehingga petani kurang bergairah merawat tanamannya. Produksi hasil peternakan terdiri dari produksi daging, telur, dan susu. Produksi secara nasional untuk daging dan telur selama tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan yang cukup berarti yaitu masing masing sebesar 5,98 dan 7,08 %/ thn. Sedangkan produksi susu mengalami penurunan sebesar -2,73 %/tahun.

Tabel 8. Produksi Komoditas Peternakan Tahun 2010 – 2014

No	Komoditas	TAHUN					Rerata Pertumbuhan (%/Thn)
		2010	2011	2012	2013	2014	
		(ribu ton)					
<b>DAGING:</b>		<b>2.366,20</b>	<b>2.554,20</b>	<b>2.666,10</b>	<b>2.882,00</b>	<b>2.982,60</b>	<b>5,98</b>
1	Sapi	436,5	485,3	508,9	504,8	540	5,55
2	Kerbau	35,9	35,3	37	37,8	41,2	3,58
3	Kambing	68,8	66,3	65,2	65,2	67,9	-0,29



No	Komoditas	TAHUN					Rerata Pertumbuhan (%/Thn)
		2010	2011	2012	2013	2014	
		(ribu ton)					
4	Domba	44,9	46,8	44,4	41,5	43,6	-0,59
5	Babi	212	224,8	232,1	298,4	311,1	10,53
6	Kuda	2	2,2	2,9	1,8	2,5	10,69
7	Ayam Buras	267,6	264,8	267,5	319,6	332,1	5,84
8	Ayam Ras Petelur	57,7	62,1	66,1	77,1	81	8,94
9	Ayam Ras Pedaging	1.214,30	1.337,90	1.400,50	1.497,90	1.524,90	5,9
10	Itik	26	28,2	30,1	32,1	32,5	5,77
11	Kelinci	0,1	0,2	0,4	0,6	0,5	58,33
12	Burung Puyuh	-	0,1	6,9	0,9	0,9	2.237,68
13	Merpati	0,4	0,1	0,6	0,2	0,2	89,58
14	Itik Manila	-	-	3,6	4	4,4	10,56
<b>TELUR:</b>		<b>1.379,60</b>	<b>1.479,80</b>	<b>1.628,70</b>	<b>1.728,30</b>	<b>1.812,80</b>	<b>7,08</b>
15	Ayam Buras	175,5	187,6	197,1	194,6	197,4	3,03
16	Ayam Ras Petelur	945,6	1.027,80	1.139,90	1.224,40	1.299,20	8,28
17	Itik	245	256,2	265	264,1	267,8	2,27
18	Burung Puyuh	13,4	8,2	15,8	18,9	19,1	18,64
19	Itik Manila	-	-	11	26,3	29,3	75,25
<b>SUSU</b>		<b>909,5</b>	<b>974,7</b>	<b>959,7</b>	<b>786,8</b>	<b>798,4</b>	<b>-2,73</b>

Sumber data : Data Statistik Ditjen PKH

Produksi daging tahun 2014 mencapai 2,98 juta ton. Produksi daging ini sebagian besar yaitu 52% berasal dari daging ayam ras pedaging. Sedangkan daging sapi berkontribusi 19,2% terhadap total produksi daging nasional. Sedangkan produksi



telur tahun 2014 mencapai 1,81 juta ton, yang terdiri dari telur ayam ras petelur (71,1%) dan lainnya berupa telur ayam buras, itik burung puyuh dan itik manila.

Prasarana dan sarana memiliki peranan yang penting sebagai penggerak pembangunan pertanian. Komponen prasarana dan sarana yang meliputi lahan, air/irigasi, bibit/benih, pupuk, pestisida, alsintan, investasi dan pembiayaan merupakan elemen penting dalam proses produksi dan sebagai pendukung utama kegiatan usahatani dan usaha lanjutannya.

Tabel 9. Anggaran APBN di Lingkup Kementerian Pertanian dan Pekerjaan Umum dalam Mendukung Ketahanan Pangan Tahun 2009-2014

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(Trilyun rupiah)					
<b>I. Kementerian Negara/ Lembaga</b>	<b>12,8</b>	<b>11,1</b>	<b>20,2</b>	<b>23,3</b>	<b>22,5</b>	<b>22,1</b>
1. 018 Kementerian Pertanian	7,7	8	16	18,2	16,4	15,5
2. 033 Kementerian PU (irigasi)	5,1	3,1	4,2	5,1	6,1	6,6
<b>II. Non K/L</b>	<b>36,9</b>	<b>39,2</b>	<b>37,6</b>	<b>40,8</b>	<b>49,5</b>	<b>50,3</b>
<b>1. Subsidi</b>	<b>32,9</b>	<b>35,7</b>	<b>33</b>	<b>33,1</b>	<b>40,9</b>	<b>41,4</b>
a. Subsidi Pangan	13	15,2	16,5	19,1	21,5	18,8
b. Subsidi Pupuk	18,3	18,4	16,3	14	17,9	21
c. Subsidi Benih	1,6	2,2	0,1	0,1	1,5	1,6
<b>2. Belanja Lain-lain</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,4</b>	<b>4</b>
a. Cadangan beras pemerintah	1	1	1	2	2	2
b. Cadangan stabilisasi pangan				1,4	2	2



Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	(Trilyun rupiah)					
c. Cadangan benih nasional			0,5	0,3	0,4	0
d. Cadangan ketahanan pangan				0,7		
<b>3. Transfer ke Daerah (DAK)</b>	<b>3</b>	<b>2,5</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,9</b>
a. DAK Irigasi	1,5	1	1,3	1,3	1,6	2,3
b. DAK Pertanian	1,5	1,5	1,8	1,9	2,5	2,6

Pembiayaan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dialokasikan untuk perbaikan dan pembangunan sarana irigasi sesuai kewenangannya (primer dan sekunder). Sedangkan di Kementerian Pertanian dilakukan perbaikan dan pembangunan irigasi di tingkat usahatani (tersier) sekaligus bertindak sebagai fasilitator dan regulator dengan pokok kegiatan mencakup pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan money kegiatan di seluruh Provinsi.

Penelitian dan pengembangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian yang telah berhasil dicapai Kementerian Pertanian selama ini. Beberapa hasil inovasi meliputi penciptaan varietas unggul baru, teknologi budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan. Sub Sistem Inovasi Perbenihan Nasional telah menghasilkan beragam varietas baru terutama padi. Akan tetapi berbagai varietas unggul baru tersebut (Inpari, Inpago, Inpara, dan Hibrida) masih belum menggeser sepenuhnya keberadaan varietas unggul lama, karena belum optimalnya fungsi diseminasi dan sistem perbenihan nasional.



Kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian selama tahun 2010-2014 mencatat keberhasilan inovasi teknologi yang mencakup: 49 varietas unggul baru padi, 27 varietas unggul baru jagung dan serealia, 114 varietas unggul baru tanaman hortikultura, 38 varietas unggul baru/klon tanaman perkebunan, serta 47 galur unggul ternak, 1222 inovasi teknologi dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian, 44 teknologi pascapanen hasil pertanian, 139 model kelembagaan dan rekomendasi kebijakan pengembangan agribisnis dan agroindustri.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Pada sisi konsumsi energi, capaiannya masih 1.987 kkal per kapita per hari atau sedikit di bawah rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Selain itu pertumbuhan konsumsi tersebut menunjukkan pertumbuhan negatif dengan rata-rata pertumbuhan minus 5 %. Hal ini diduga terkait dengan rendahnya daya beli masyarakat. Namun demikian, apabila pertumbuhan konsumsi tersebut dibandingkan dengan periode tahun 2005-2009, sebenarnya terjadi pertumbuhan konsumsi yang positif dari yang sebelumnya minus 32 % menjadi minus 5 %.



Tabel 10. Konsumsi Beras di Tingkat Rumah Tangga Tahun 2010-2014

Tahun	Konsumsi Beras* (kg/kap/thn)	Pertumbuhan (kg/kap/thn)	Pertumbuhan (%)
2010	99,7	-2,52	-2,47
2011	101,7	2	2,01
2012	96,6	-5,1	-5,01
2013	96,3	-0,3	-0,31
2014			
Rata-rata 2010-2014	98,57	-1,48	-1,45
Rata-rata 2005-2009	103,25	-0,75	-0,66
Sasaran			-1,5

Rata-rata konsumsi beras pada periode tahun 2010–2014 sebesar 98,57 kg/kapita/tahun (Tabel 31) dengan laju pertumbuhan konsumsi menunjukkan penurunan 1,48 % per tahun. Perkembangan konsumsi beras pada periode tahun 2010–2014 dibandingkan dengan periode tahun 2005–2009 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh mulai ditetapkannya kebijakan diversifikasi pangan.

Target skor PPH Indonesia pada tahun 2015 sesuai dengan Perpres 22 tahun 2009 sebesar 95. Perkembangan skor PPH pada periode 2010–2014 (Tabel 11) menunjukkan peningkatan skor PPH sebesar 1,42 per tahun, dengan capaian skor PPH pada tahun 2013 sebesar 81,4. Ini menunjukkan bahwa capaian diversifikasi konsumsi pangan masyarakat belum mencapai sasaran yang diharapkan (PPH = 91,5 pada tahun 2013). Belum tercapainya sasaran tersebut diduga akibat





tingginya konsumsi padi-padian, minyak, dan lemak. Selain itu juga disebabkan masih rendahnya konsumsi sayur-buah, umbi-umbian, pangan hewani, dan kacang-kacangan.

Tabel 11. Pola Pangan Harapan Tahun 2010 – 2014

TAHUN	PPH	PERTUMBUHAN %
2010	85,7	
2011	85,6	-0,1
2012	83,5	-2,1
2013	81,4	-2,1
2014		
Rata-rata 2010 – 2014	84,93	1,42
Rata-rata 2005 – 2009	79,5	-0,07
Sasaran 2013	91,5	

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantina dengan menyempurnakan dan meningkatkan kualitas operasional di lapangan. Upaya perlindungan produk pertanian sebagai wujud dari Empat Target Sukses Kementerian Pertanian, yaitu swasembada dan swasembada berkelanjutan khusus untuk padi, jagung serta daging sapi ditunjukkan dari kemampuan melakukan cegah tangkal terhadap hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK).



Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun. Implementasi Peraturan Perkarantinaan dan Keamanan Hayati memberikan pengaruh terhadap menurunkan volume importasi buah dan sayur buah segar antara lain adalah:

- 1) Peraturan Menteri Pertanian No. 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012;
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 13 Juni 2012.

Dalam Permentan tersebut terdapat pengaturan pintu pemasukkan guna mengefektifkan tindakan cegah tangkal introduksi OPTK khususnya alat buah.

### C. **POTENSI**

Indonesia memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar dan sangat penting dalam pembangunan pertanian. Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sepuluh persen dari spesies tumbuhan berbunga, 12 % spesies mamalia, 16 % reptil dan amphibi, dan 17 % burung di dunia terdapat di Indonesia, meskipun luas daratan Indonesia hanya 13 % dari total luas daratan di dunia.



Potensi sumber hayati berasal dari tumbuhan ada sekitar 40 ribu yang terdiri dari 5000 jenis jamur, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar dan 55 jenis tanaman rempah.

Salah satu pemanfaatan keanekaragaman hayati adalah melalui perdagangan tanaman obat dengan nilai perdagangan tanaman obat dan produk berasal dari tumbuhan termasuk suplemen. Selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem.

Indonesia juga memiliki sumberdaya biofisik yang cukup beragam untuk mendukung pengembangan pertanian antara lain adalah ketersediaan tanah, hara, dataran rendah dan tinggi, curah hujan yang merata di sebagian wilayah, sinar matahari yang terus menyinari sepanjang tahun, kelembaban udara dan organisme-organisme, serta setidaknya memiliki 47 ekosistem alami yang berbeda.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas daratan mencapai 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas perairan mencapai 3.257.483 km<sup>2</sup>. Luasan daerah yang memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan sangat potensial pengembangan sektor pertanian.

Berdasarkan data BPS 2013, Indonesia memiliki luas daratan 191,09 juta hektar. Dari luas daratan tersebut, sekitar 95,81 juta hektar yang potensial untuk pertanian, yang terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering, 5,23 juta hektar di lahan basah non rawa, dan 19,99 juta hektar di lahan rawa.



Dari luasan lahan potensial tersebut sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk pertanian, sehingga sebagai lahan cadangan sekitar 34,7 juta hektar, yang berada di kawasan budidaya (APL) seluas 7,45 juta hektar, HPK 6,79 juta hektar dan sekitar 20,46 juta hektar di kawasan Hutan Produksi (HP).

Masih tersedia areal pertanian dan lahan potensial belum termanfaatkan secara optimal seperti lahan kering/rawa/lebak/pasang surut/gambut yang merupakan peluang bagi peningkatan produksi tanaman pangan. Potensi sumberdaya ini harus dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk produksi komoditas tanaman pangan dan meningkatkan pendapatan petani.

Teknologi Pertanian Indonesia sendiri berkembang dengan pesat. Dari proses produksi di hulu hingga pengolahan di hilir. Banyak aplikasi teknologi yang digunakan dalam industri pertanian modern di Indonesia guna mengejar hasil yang tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Berbagai inovasi teknologi telah dihasilkan oleh Kementerian Pertanian. Melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di daerah yang menghasilkan teknologi pertanian spesifik lokasi, untuk mendorong sistem dan usaha pertanian yang efisien, dengan memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal.

Berbagai macam paket teknologi tersebut diharapkan tepat guna sehingga dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas aneka produk pertanian. Berbagai varietas, klon dan bangsa ternak berdaya produksi tinggi; teknologi produksi pupuk dan produk bio; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan



hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian, masyarakat petani dan swasta, tapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki budaya kerja keras merupakan potensi tenaga kerja pertanian. Sampai saat ini, lebih dari 35 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumahtangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Peningkatan kapasitas penduduk dalam hal pengetahuan dan keterampilan pertanian dapat juga dilakukan melalui penempatan tenaga kerja pertanian terlatih di daerah yang masih kurang penduduknya dan penyediaan fasilitas pertanian dalam bentuk faktor produksi, bimbingan teknologi serta pemberian jaminan pasar yang baik.

Sub-sektor tanaman pangan merupakan lapangan usaha yang menyerap bagian terbesar tenaga kerja dan sangat dominan dalam mewarnai struktur ketenagakerjaan sektor pertanian maupun nasional. Hampir seluruh penduduk di pedesaan bekerja di sub- sektor tanaman pangan. Secara kuantitatif tenaga kerja untuk sub-sektor tanaman pangan tersedia di pedesaan, namun ada kecenderungan terus menurun dengan indikasi semakin berkurangnya minat generasi muda di pedesaan untuk bekerja di sub-sektor pertanian.

Pertumbuhan kelas menengah yang sangat pesat, menurut data McKinsey Global Institute, saat ini kelas menengah di Indonesia berjumlah 45 juta jiwa dan akan meningkat menjadi 135 juta pada tahun 2030. Hal ini merupakan pasar yang harus diantisipasi, mengingat ragam permintaannya terhadap produk



pertanian semakin besar dan spesifik. Selain itu, akan semakin penting dengan ditetapkannya pasar tunggal ASEAN pada tahun akhir 2015, dimana pasar domestik akan dipenuhi oleh produk negara ASEAN bila tidak mampu menghasilkan produk yang diminta kelas menengah tersebut.

Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia.

#### D. **PERMASALAHAN**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan pertanian tanaman pangan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2015-2019, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan nasional; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian.

#### **Lahan**

Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian tanaman pangan tengah dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat konversi lahan



pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai real estate, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada ditanami tanaman pangan.

Laju konversi lahan sawah mencapai 100 ribu hektar per tahun. Sedangkan kemampuan pemerintah dalam pencetakan sawah baru masih terbatas dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kemampuan 40 ribu hektar pertahun. Dengan demikian, jumlah lahan yang terkonversi belum dapat diimbangi dengan laju pencetakan sawah baru.

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian tanaman pangan secara efektif dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Namun pada kenyataannya konversi lahan pertanian ke perumahan dan industri terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan.

Kementerian Pertanian hanya bisa mencetak sawah baru seluas 33 0 ribu hektar selama 2006-2013 atau seluas 40 ribu ha setiap tahunnya. Kemampuan cetak sawah oleh pemerintah memang belum bisa menyamai laju konversi lahan sawah seluas 100 ribu ha per tahun. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Untuk mencetak satu hektar sawah sedikitnya dibutuhkan dana sekitar 30 juta rupiah. Selain itu, sangat tergantung dari koordinasi dengan daerah dan juga adanya berbagai persoalan yang dihadapi dalam merealisasikan, terutama masalah status



penguasaan dan kepemilikan lahan.

Sebagian besar lahan pertanian di Indonesia sudah mengalami penurunan kualitas, bahkan banyak yang termasuk kategori kritis. Hal ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun.

Luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Pada tahun 2012, luas penguasaan lahan per petani yaitu 0,22 hektar dan diperkirakan akan menjadi 0,18 hektar pada tahun 2050. Hal ini menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani, penyempitan penguasaan lahan mengakibatkan tidak efisien dalam berusahatani.

Berdasarkan Sensus Pertanian tahun 2003, sejak tahun 1993 jumlah rumah tangga petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 10,9 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003. Hasil penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2008, rataan kepemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0,41 ha dan 0.96 ha masing-masing di Jawa dan Luar Jawa. Kondisi kepemilikan lahan ini disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum, (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah. Menurunnya rata-rata luas pemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pemilikan lahan terjadi pada agroekosistem persawahan di Jawa.

Status penguasaan lahan oleh petani sebagian besar





belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru.

Selama ini usaha peternakan menggunakan lahan kosong di pemukiman atau lahan yang ditanami dengan tanaman pangan maupun perkebunan. Penyebab hal ini karena tidak ada regulasi seperti RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang memberikan ruang untuk peternakan. Akibatnya, sering kawasan peternakan yang mulai maju usahanya terusir untuk kepentingan pemukiman atau usaha yang lain.

## **Infrastruktur**

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Selain itu, masih terbatasnya jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan laboratorium perkarantinaan, kebun dan kandang penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan



tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik komoditas.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini secara memadai untuk dapat menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan.

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum perkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani. Sampai saat ini, benih unggul banyak diimpor seperti: padi hibrida, sayuran dan tanaman hias, serta bibit sapi. Untuk bibit sapi, belum ada satu lembaga perbibitan yang menonjol.

Di Indonesia, sistem perbibitan ternak sudah mengalami kemajuan dalam hal peraturan pemerintah tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Permasalahan pembibitan



sapi potong yang dihadapi saat ini adalah : (1) jumlah bibit ternak belum terpenuhi; (2) kualitas bibit masih rendah; (3) pelaku usaha pembibitan masih kurang respon dalam pembibitan; (4) pengurasan betina produktif akibat pemotongan betina produktif; (5) sumber pembibitan ternak masih menyebar dengan kepemilikan rendah sehingga menyulitkan dalam pembinaan dan pengumpulan; serta (6) kelembagaan pembibitan belum memadai.

## **Regulasi**

Pengembangan sektor pertanian yang bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam saat ini dihadapkan dengan berbagai macam regulasi yang terkait dengan lingkungan. Selain itu, untuk mencapai sasaran yang diharapkan perlu regulasi dan kelembagaan untuk mensinergikan upaya yang saling mendukung untuk pencapaian sasaran dimaksud. Oleh karena itu, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan pertanian mutlak diperlukan, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan pasar antar komoditas pangan semakin ketat. Komoditas impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan pangan domestik. Produk impor lebih murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang lebih baik serta kontinuitas pasokan yang lebih terjamin.



## **Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia**

Pengembangan kelembagaan pertanian baik formal maupun informal belum memberikan peran berarti di perdesaan. Hal ini disebabkan oleh peran antar lembaga pendidikan dan pelatihan, Balai Penelitian dan Penyuluhan (BPP) belum terkoordinasi dengan baik. Fungsi dan keberadaan lembaga penyuluhan cenderung terabaikan. Koordinasi dan kinerja lembaga keuangan perbankan perdesaan masih rendah. Koperasi perdesaan yang bergerak di sektor pertanian masih belum berjalan optimum. Keberadaan lembaga-lembaga tradisional di perdesaan belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian, sehingga mengakibatkan tingginya urbanisasi ke perkotaan.

Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.



## **Permodalan**

Permodalan petani merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usahatani. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah seperti Kredit ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) dan skema kredit dengan penjaminan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani.

Kondisi petani secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih mudah dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya lebih cepat. Dengan terbatasnya pembinaan, pengawalan dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu faktor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

## **E. TANTANGAN**

### **Pemenuhan Pangan Masyarakat, Bahan Baku Industri dan Energi**

Tantangan global di masa mendatang adalah bagaimana



penyediaan pangan dan energi bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat. Penduduk dunia diperkirakan akan mencapai 9,5 milyar pada tahun 2050, dan apabila dikaitkan dengan adanya perubahan preferensi konsumen maka ketahanan pangan secara global akan menjadi suatu tantangan yang nyata. Di lain pihak, ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi, intensitas erosi permukaan tanah maupun perluasan industri, perumahan dan sektor-sektor lainnya.

Ketersediaan pangan, energi dan sumber lainnya serta perlindungan dari gangguan iklim dan lingkungan tidak hanya menjadi kepentingan nasional, tetapi juga menjadi komitmen global. Untuk itu, penerapan teknologi tepat guna yang progresif menjadi suatu kewajiban. Produk dan prosedur yang inovatif dalam dunia usaha memberi peluang untuk menghasilkan produksi yang berkelanjutan. Tantangan bagi sektor pertanian adalah bagaimana memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan dan gizi cukup bagi penduduk.

## **Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam**

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim El-Nino dan La-Nina yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam.



Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosif hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.

Sejak tahun 1898 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 % per tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 29.743 Ha terkena banjir (11.043 Ha diantaranya puso karena banjir) dan 82.472 Ha terkena kekeringan (8.497 Ha diantaranya puso karena kekeringan). Kondisi ini cenderung akan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan. Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan.

Selain itu, Indonesia termasuk wilayah dengan frekuensi bencana alam sangat tinggi dan sering disebut sebagai wilayah "rawan bencana". Sejumlah bencana alam kerap terjadi yang meliputi erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan macam bencana alam lainnya. Semua bencana alam tersebut berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian nasional mulai proses produksi, jalur distribusi, rehabilitasi ekonomi, masa panen, dan menimbulkan trauma



bagi masyarakat korban bencana. Karena itu, kemampuan untukantisipasi bencana alam, penanganan korban bencana, serta kemampuan rehabilitasi ekonomi pascabencana menjadi penting.

## **Kondisi Perekonomian Global**

Perkembangan regional dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Pergeseran pusat kekuatan ekonomi terlihat dari menguatnya peran Asia dalam dekade terakhir. Beberapa negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan basis perkembangan sektor industrinya. Selanjutnya, China dan India menyusul sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional dengan statusnya sebagai negara emerging economic dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya juga mulai menunjukkan kekuatannya sebagai penggerak roda perekonomian regional, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus melaju serta besarnya jumlah penduduk yang menjadikannya sebagai modal sosial yang besar maupun pasar yang potensial. Sementara itu, pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam. Jika dilihat dari sisi potensi ekonomi, Indonesia merupakan salah satu emerging country yang saat ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi ASEAN. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,3 persen, dibandingkan dengan Malaysia 5,4 persen, Thailand 5 persen, Singapura 1,2 persen, Filipina 6,6 persen, dan Vietnam 5,7. Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar yakni 247 juta jiwa sebagai pasar potensial dan tenaga kerja.





Prospek Indonesia sebagai negara dengan perekonomian nomor 16 di dunia, nomor 4 di Asia setelah China, Jepang dan India, serta terbesar di Asia Tenggara, semakin menjanjikan karena didukung oleh melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang makin kondusif.

### **Peningkatan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi**

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 268,07 juta jiwa pada tahun 2019 dan 44 % penduduk berada di pedesaan dan 56% diperkotaan. Sementara kapasitas ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang akibat konversi lahan yang cukup tinggi untuk kebutuhan perumahan dan industri. Untuk itu perlu diupayakan langkah-langkah strategis dalam rangka menjaga atau mengurangi laju konversi lahan yang terus terjadi.

Sementara itu, laju urbanisasi yang tinggi dimana generasi muda cenderung meninggalkan pedesaan/pertanian. Sektor pertanian menjadi kurang diminati generasi penerus. Fenomena urbanisasi dipandang sebagai konsekuensi dari berkembangnya sektor industri di perkotaan yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional pedesaan. Kondisi ini mengakibatkan transfer tenaga kerja sektor pertanian pedesaan ke sektor industri ke perkotaan. Pada tahun 1990 persentase penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan hanya sekitar 30,5 %, pada tahun 2010 meningkat menjadi 44,3 % dan diperkirakan pada tahun 2030 menjadi sebesar 53,7 %. Laju urbanisasi ini juga berdampak pada semakin langkanya ketersediaan tenaga kerja muda di



pertanian, karena diserap oleh kegiatan industri di perkotaan. Kondisi ini makin dominannya petani berusia tua di pedesaan yang mengusahakan budidaya pertanian. Oleh karena itu tantangan ke depan perlu menciptakan kegiatan pertanian yang lebih diminati oleh generasi muda. Salah satunya adalah pengembangan agro industri di pedesaan.

## Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian

Indonesia sebagai negara kepulauan diperlukan aksesibilitas dan sarana transportasi yang lebih efisien. Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.



Masalah yang dijumpai dalam mendukung kelancaran distribusi dan akses pangan adalah : (1) infrastruktur distribusi, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (4) sistem informasi pasar, (5) keterbatasan lembaga pemasaran daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana. Tantangan ke depan bagi produsen pertanian atau petani adalah bagaimana memproduksi hasil pertanian yang



memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan pelanggan. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing dari suatu produk pertanian akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk dalam negeri tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar dalam negeri akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor.





## BAB II



# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN





## A. **VISI**

Visi pembangunan nasional era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah:

### **“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”**

Kedaulatan Pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal. Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.

## B. **MISI**

Berdasarkan pada tugas, fungsi dan wewenang dalam peraturan perundang-undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka misi Kementerian Pertanian adalah :



1. ***Mewujudkan Ketahanan Pangan***, adalah melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai pemenuhan konsumsi pangan masyarakat.
2. ***Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian***, adalah mendorong komoditas pertanian memiliki keunggulan bersaing dan nilai yang lebih baik dari hasil produksi, penyimpanan, pengolahan dan distribusi.
3. ***Mewujudkan Kesejahteraan Petani***, adalah meningkatkan kesejahteraan petani dengan melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani.
4. ***Mewujudkan Kementerian Pertanian yang Transparan, Akuntabel, Profesional dan Berintegritas Tinggi***, adalah meningkatkan tatakelola organisasi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

## C. TUJUAN

Misi pembangunan pertanian bisa dijabarkan dengan tujuan dan indikatornya adalah sebagai berikut :





Tabel 12. Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator tujuan	Target 2018	Target 2019
T1	Terwujudnya kemandirian pangan nasional	Indeks Ketahanan Pangan ( <i>The Global Food Security Index</i> )	69	68
T2	Terwujudnya pengelolaan pertanian terpadu berkelanjutan	Rasio desa yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total desa di Indonesia	5	7,5
T3	Berkembangnya komoditas pertanian bernilai ekonomi	Pertumbuhan indeks keunggulan komparatif andalan ekspor pertanian	8	8
T4	Meningkatnya kesejahteraan petani	PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian	Rp.26,9 Juta	Rp.27 Juta
T5	Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian	86,7	87,8

#### D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian. Penyusunan dan penentuan sasaran strategis ini menggunakan metode *Balance Scorecard (BSC)* dengan pendekatan empat perspektif yaitu *stakeholders*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth perspective*. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah :





Tabel 13. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Target	
					2018	2018
<b>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</b>						
SS.1	Meningkatnya pendapatan keluarga petani	1.	PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian	Rp Juta	26.9	27
SS.2	Meningkatnya ketahanan pangan nasional	2.	Indeks Ketahanan Pangan ( <i>The Global Food Security Index</i> )	Ranking	69	68
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>						
SS.3	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional	3.	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional	%	8.97	10.52
		4.	Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional	%	5.02	6.61
		5.	Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian	%	0.1	0.1
SS.4	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional	6.	Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional	%	5.9	7.9
SS.5	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional	7.	Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia	Jumlah	11	10
		8.	Rasio kasus komoditas pertanian impor pangan strategis yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor	%	40	40
SS.6	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis	9.	Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional	%	10-30	10-30



Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				2018	2018	
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>						
SS.7	Dimanfaatkannya inovasi teknologi	10.	Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap penelitian yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	%	60	70
SS.8	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan	11.	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	%	33	33
		12.	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen)	%	66.3	68.4
		13.	Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan (%)	%	97.67	96.83
SS.9	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	14.	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam	%	11.05	11.05
		15.	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	79	80
SS.10	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	16.	Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional	%	10	15
SS.11	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	17.	Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional	%	27.5	30
<b>LEARN AND GROWTH</b>						
SS.12	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan	18.	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian	Index	86.79	87.78







## BAB III

A decorative graphic of a green leafy branch, curved and positioned to the left of the main title.

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN





## A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Kesembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) lima tahun ke depan adalah (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Berdasarkan rincian dari Sembilan Agenda Prioritas (Nawa Cita) tersebut, maka agenda prioritas yang terkait langsung dengan bidang pertanian yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan.

Peningkatan Agroindustri, sebagai bagian dari agenda VI Nawa Cita (Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Sasaran dari peningkatan agroindustri adalah:

- a. meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif,
- b. meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor, dan



- c. berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan. Komoditi yang menjadi fokus dalam peningkatan agroindustri diantaranya kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi, kelapa, mangga, nenas, manggis, salak, kentang.

Tabel 14. Sasaran Produksi Komoditas Andalan Tahun 2014-2019

No.	Komoditi	2014 (Baseline)	2019	2015-2019 (Rata-rata per tahun %)
<b>1</b>	<b>Produksi Perkebunan (ribu ton)</b>			
	Kelapa Sawit	29.344	36.420	4,30
	Karet	3.153	3.810	3,50
	Kakao	709	870	3,00
	Teh	144	163	0,50
	Kopi	685	778	1,80
	Kelapa	3.031	3.491	1,40
<b>2</b>	<b>Hortikultura (ribu ton)</b>			
	Mangga	2.236	2.519	2,40
	Nanas	1.851	2.042	2,00
	Manggis	142	155	1,80
	Salak	1.038	1.146	2,00
	Kentang	1.296	1.431	2,00

Sumber : Buku I, RPJMN 2015-2019

Untuk mencapai sasaran pokok peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan difokuskan pada: (1) peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan substitusi impor; dan (2)

mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat,
- b. Peningkatan mutu, pengembangan standardisasi mutu hasil pertanian dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati,
- c. Pengembangan agroindustri perdesaan,
- d. Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran,
- e. Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan serta informasi pasar dan akses pasar
- f. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif.

Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda VII Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang





pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

- a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
- b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
- c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
- d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.
- e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
- f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
- g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan

menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Tabel 15. Sasaran Kedaulatan Pangan Tahun 2014-2019

No.	Komoditi	2014 (Baseline)	2019	2015-2019 (Rata-rata per tahun %)
<b>1</b>	<b>Produksi</b>			
	Padi (juta ton)	70,60	82,00	3,03
	Jagung (juta ton)	19,10	24,10	4,70
	Kedelai (juta ton)	0,90	2,60	22,70
	Gula (juta ton)	2,60	3,80	8,30
	Daging Sapi (ribu ton)	452,70	755,10	10,80
<b>2</b>	<b>Konsumsi</b>			
	Konsumsi Kalori (Kkal)	1.967	2.150	
<b>3</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</b>	81,8	92,5	

Sumber : Buku I, RPJMN 2015-2019

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi:

- a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas



- padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
- b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan.
  - c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat
  - d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
  - e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian**

Kebijakan pembangunan pertanian ditetapkan dengan memperhatikan tujuan nasional dalam mencapai kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Empat Kebijakan Membangun Pertanian sebagai berikut :

1. melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian
2. melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi pangan dan pementapan ketahanan pangan
3. membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional

4. memperkuat faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian.

Berdasarkan keempat kebijakan tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu :

1. **Upaya khusus percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian**

Dalam rangka percepatan peningkatan produksi komoditas pertanian strategis, maka Kementerian Pertanian mengambil kebijakan melakukan upaya khusus. Strategi yang terkait dengan Upaya Khusus tersebut, meliputi:

- a. **Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan lahan**

Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, dalam lima tahun mendatang akan dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Audit Lahan. Membangun database baik tabular maupun spasial yang lengkap dan akurat melalui inventarisasi sumber daya lahan pertanian dengan pengembangan sistem informasi geograf (SIG) atau pemetaan tanah sistematis dan tematik yang terintegrasi dengan data identitas petani.
- 2) Mengimplementasikan secara efektif Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan



Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan Peraturan Pemerintah dan Perda. UU PLP2B dan Peraturan Pemerintah pendukungnya merupakan perangkat hukum untuk melindungi lahan pangan produktif dan menekan laju konversi lahan pertanian. Selain itu diharapkan mendapat dukungan kesesuaian dengan RTRW kabupaten.

- 3) Melakukan upaya-upaya perlindungan, pelestarian dan perluasan areal pertanian terutama di luar Jawa sebagai kompensasi alih fungsi lahan terutama di Jawa melalui:
  - a) upaya pengendalian alih fungsi lahan melalui penyusunan dan penerapan perangkat peraturan perundangan,
  - b) pencetakan sawah baru di luar pulau Jawa terutama dengan memanfaatkan lahan terlantar, lahan marjinal, lahan di kawasan transmigrasi, bekas lahan pertambangan, serta memanfaatkan tumpangsari,
  - c) melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif,
  - d) melakukan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan terutama pada lahan pertanian Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu,

- e) melakukan upaya reklamasi dan optimasi lahan pada lahan-lahan marginal dan sementara tidak diusahakan atau bernilai Indeks Pertanaman (IP) rendah.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar yang meliputi lahan pertanian yang selama ini tidak dibudidayakan (lahan tidur atau bongkor), dan kawasan hutan yang telah dilepas untuk keperluan pertanian tetapi belum dimanfaatkan, atau lahan pertanian yang masih dalam kawasan hutan (wewenang sektor kehutanan).
- 5) Membantu petani dalam sertifikasi lahan, mendorong pengelolaan dan konsolidasi lahan, advokasi petani dalam pengelolaan warisan agar tidak terbagi menjadi lahan sempit dalam upaya mengurangi segmentasi lahan, dan/atau menjadi lahan non-pertanian. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian dan segmentasi lahan.
- 6) Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal dengan upaya-upaya yang akan dilakukan diantaranya:
  - a) Melakukan perbaikan dan pencegahan kerusakan tanah, dengan menerapkan teknologi konservasi tanah dan air untuk mengurangi erosi dan



- mencegah longsor serta meningkatkan produktivitas lahan.
- b) Melakukan penanaman tanaman pohon (buah-buahan dan perkebunan) di daerah kawasan aliran sungai.
  - c) Mendorong petani untuk menggunakan sistem pemupukan berimbang yang diintegrasikan dengan pupuk organik, dan menerapkan praktek budidaya pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan.
- 7) Optimalisasi sumberdaya air yang eksisting dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan, melalui upaya:
- a) Rehabilitasi, optimalisasi, dan peningkatan / pengembangan jaringan irigasi baik tingkat utama maupun usahatani.
  - b) Upaya peningkatan efisiensi penyaluran dan pemanfaatan air.
  - c) Perbaikan struktur fisik tanah dan penambahan bahan organik, serta penerapan berbagai teknologi konservasi tanah dan air.
  - d) Pengembangan dan memantapkan kelembagaan petani pemakai air, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, kesadaran, kepedulian dan partisipasi petani.

Dalam rangka peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani di areal usahatani seperti jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), jaringan irigasi tersier dan kuarter. Disamping itu juga diperlukan infrastruktur di luar areal usahatani seperti jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, jalan kabupaten, jalan propinsi, jalan negara, pelabuhan, bandara, sarana transportasi, jaringan listrik, jaringan komunikasi dan lain sebagainya.
- b) Pembangunan infrastruktur tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian sendiri, tapi juga yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, kementerian lainnya serta Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota maupun oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya koordinasi yang baik agar tepat lokasi dan sesuai kebutuhan.
- c) Peningkatan sarana pertanian meliputi bantuan sarana pembuatan pupuk organik, biogas, sarana budidaya,





panen, pasca panen, pengolahan dan sarana pemasaran.

- d) Penguatan kelembagaan brigade tanam.
- e) Penguatan peran kelompok tani dalam pengelolaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).

Terkait dengan peningkatan layanan irigasi, maka dilakukan upaya-upaya seperti:

- a) Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang mempertimbangkan jaminan ketersediaan air dan memperhatikan kesiapan petani penggarap baik secara teknis maupun kultural serta membangun daerah irigasi baru khususnya di luar Pulau Jawa.
- b) Rehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi rusak pada daerah utama penghasil pangan dan mendorong keandalan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bentuk pengelolaan dari pemerintah pusat.
- c) Optimalisasi layanan jaringan irigasi melalui operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- d) Pembentukan manajer irigasi sebagai pengelola pada satuan daerah irigasi.

- e) Peningkatan peran petani secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah irigasi termasuk operasi dan pemeliharaan seperti melalui sistem out-contracting.
- f) Peningkatan efisiensi pemanfaatan air irigasi dengan teknologi pertanian hemat air seperti *System of Rice Intensification/SRI*, mengembangkan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian dan menggunakan kembali air buangan dari sawah (*water reuse*).
- g) Internalisasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif (PPSIP) dalam dokumen perencanaan daerah.
- h) Pengelolaan lahan rawa berkelanjutan melalui pengelolaan lahan rawa yang dapat mendukung peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pengelolaan tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup.

**b. Mengembangkan dan memperluas logistik benih/bibit**

Dalam rangka pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, dalam lima tahun mendatang



akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menata kembali kelembagaan perbenihan/ perbibitan nasional mulai dari tingkat pusat sampai daerah.
- 2) Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal.
- 3) Memperkuat tenaga pemulia dan pengawas benih tanaman hingga di tingkat kabupaten
- 4) Memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal.
- 5) Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan/ perbibitan.
- 6) Membangun industri perbenihan dengan arah sebagai berikut: 1) Kemandirian industri benih nasional yang mencakup kemandirian produksi benih dan industri varietas, 2) Kemandirian penyediaan benih berbasis kawasan, 3) Industri benih berbasis komunitas, 4) Riset berbasis perbenihan, dan 5) Membangun 1000 desa mandiri benih.
- 7) Untuk mendorong berkembangnya industri benih di dalam negeri, maka importir pedagang benih diharuskan mengembangkan perbenihan di dalam negeri sehingga menjadi produsen benih.
- 8) Menyediakan sumber bahan tanaman perkebunan melalui pembangunan dan

pemeliharaan kebun induk/entres serta penguatan kelembagaan usaha (usaha perbenihan kecil dan besar) dan kelembagaan UPJA perkebunan.

- 9) Khusus untuk membangun perbibitan ternak, peran swasta diarahkan pada kelangsungan perbibitan ayam ras mulai dari keberadaan *grand parent stock*, *parent stock* sampai *final stock*. Sedangkan peran pemerintah diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan bibit melalui penerapan sistem perbibitan, yaitu perbaikan mutu benih dan bibit ternak, optimalisasi kelembagaan perbibitan, sertifikasi, penjaringan, pemurnian, dan persilangan melalui penggunaan teknologi inseminasi buatan dan embrio transfer.

**c. Mendorong penguatan kelembagaan petani**

- 1) Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumberdaya manusia (petani) yang cukup banyak, serta sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga



melalui kelompok maka akan memperkuat posisi tawar dalam pasar yang kompetitif.

- 2) Menyadari manfaat keberadaan kelompok tani maka ke depan upaya-upaya yang perlu dilakukan diantaranya adalah:
  - a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas dari kelompok dan gabungan kelompok tani;
  - b) Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek manajemen kelompok, kegiatan budidaya maupun dalam aspek pengolahan dan pemasaran;
  - c) Memperluas jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha, misalnya kelompok Pengendalian Hama Terpadu, Inseminasi Buatan, Perhimpunan Petani Pemakai Air, kelompok usaha pengolahan.
  - d) Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal, serta memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan.

#### **d. Memperkuat kelembagaan penyuluhan**

Penyuluhan pertanian merupakan suatu kesisteman pengembangan kemampuan, pengetahuan,



keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha yang berperan dalam meningkatkan kapasitasnya agar mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya,



sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya. Penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan sub sistem pembangunan pertanian oleh kelembagaan penyuluhan pertanian, pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri, maupun bekerjasama, berdasarkan program penyuluhan pertanian yang disusun pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan. Penyelenggaraan penyuluhan tidak terlepas dari peran dan kontribusi aktif dari penyuluh pertanian, yang terdiri dari penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta. Penyuluh pertanian PNS pada dasarnya adalah aparat yang membangun pertanian, pendidik/penasehat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan pada petani-nelayan beserta keluarganya. Oleh karena itu seorang Penyuluh Pertanian harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, fungsi penyuluhan tidak saja terbatas dilakukan oleh tenaga penyuluh yang ada, tetapi juga melibatkan unsur lainnya diantaranya unsur TNI dan instansi



lainnya.

**e. Mengembangkan dan mendorong pembiayaan pertanian**

Dalam rangka pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya- upaya diantaranya sebagai berikut :

- 1) Penyempurnaan sistem skim kredit program pertanian untuk memudahkan penyerapan oleh masyarakat petani/peternak dalam kegiatan usahatani tanaman dan ternak termasuk kegiatan pasca panen, pengolahan dan pemasarannya.
- 2) Menumbuhkembangkan kelembagaan petani, kelompok tani, gapoktan, asosiasi dan koperasi tani sebagai channeling Agent lembaga keuangan formal, baik perbankan maupun non perbankan, untuk membiayai permodalan petani.
- 3) Meningkatkan fungsi penyuluh sebagai fasilitator pembiayaan petani.
- 4) Mengembangkan pola kerjasama petani dan pengusaha lokal sehingga ada yang menjadi avalis/penjamin bagi petani dalam meminjam modal usaha pertaniannya.
- 5) Menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di perdesaan sebagai jejaring lembaga pembiayaan formal.

- 6) Memfasilitasi pembiayaan bagi petani dan gapoktan melalui program pengembangan usaha agribisnis perdesaan sesuai potensi wilayah. Mengembangkan skim perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha melalui asuransi pertanian.
- 7) Mendorong investasi di pedesaan, sehingga mampu mendorong tumbuhnya sektor pertanian di pedesaan. Untuk hal ini diupayakan pertumbuhan investasi dalam negeri sebesar 15%/ tahun.
- 8) Mendorong berdirinya bank pertanian sebagai sumber pembiayaan kegiatan pertanian dari hulu hingga hilir.

**f. Memperkuat jaringan pasar produk pertanian**

Dalam rangka pengembangan dan penguatan jaringan pasar produk pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menyusun peta jalur pemasaran komoditas strategis termasuk komoditas yang sering terkendala distribusi yaitu cabai dan bawang merah dengan memanfaatkan tol laut guna membangun pasar yang terintegrasi dengan baik dari daerah produksi hingga ke konsumen.
- 2) Memperkuat kelembagaan dan sistem pelayanan informasi pasar dan jaringan pasar





produk pertanian mulai di tingkat sentra produksi hingga ke sentra konsumen sehingga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga terjaga.

- 3) Fasilitasi kelembagaan pasar dan sistem resi gudang guna meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar bagi petani
- 4) Memperkuat peran atase pertanian di luar negeri dalam mendukung ekspor produk pertanian.
- 5) Menggalakkan kampanye positif produk-produk pertanian andalan ekspor.
- 6) Memperkuat diplomasi dagang produk pertanian baik secara bilateral, regional maupun multilateral.
- 7) Pendampingan penerapan standar mutu sehingga produk pertanian yang dipasarkan sesuai standar mutu negara tujuan ekspor.
- 8) Membuka target pasar baru diluar pasar eksisting.

**g. Melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman**

Berdasarkan peran pertanian yang sangat strategis dalam menunjang ketahanan pangan, maka rumusan kebijakan pembangunan pertanian yang terkait dengan dampak perubahan iklim adalah

sebagai berikut:

- 1) Dalam mengantisipasi perubahan iklim, kebijakan pertanian seyogyanya lebih mengutamakan prinsip adaptasi tanpa mengabaikan aksi mitigasi, sehingga setiap aksi penurunan emisi GRK di sektor pertanian juga harus menjamin mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas.
- 2) Aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim harus memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga kegiatan aksi yang akan dipilih harus disesuaikan dengan sistem dan usaha pertanian rakyat. Aksi adaptasi dan mitigasi secara operasional dijabarkan di tiap-tiap eselon I serta di tingkat daerah. Dengan demikian sektor pertanian ikut berkontribusi kepada target nasional dalam penurunan emisi GRK sekitar 26 persen pada tahun 2019.
- 3) Kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bersifat spesifik lokasi dengan mempertimbangkan kondisi geografis masing-masing wilayah, sehingga teknologi yang akan diterapkan harus bersifat teknologi tepat guna dan spesifik lokasi dengan mengadopsi sebesar-besarnya kearifan lokal.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan kebijakan penanganan dampak perubahan iklim tersebut, maka operasionalisasinya harus melembaga



ke dalam sistem perencanaan teknokratis yang didukung dengan basis data dan sistem informasi yang valid dan terverifikasi. Pada akhirnya, bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan dampak perubahan iklim di lingkup pertanian adalah sangat luas, mulai dari pengambil kebijakan sampai pelaku usaha di lapangan, maka perlu dilakukan pengarusutamaan penanganan dampak perubahan iklim yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, perumusan, negosiasi, konsensus dan sosialisasi kebijakan perubahan iklim harus dilakukan secara massif dan berkesinambungan.

Sasaran dari adaptasi perubahan iklim subbidang ketahanan pangan meliputi:

- 1) Penurunan tingkat kehilangan produksi pangan akibat kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim,
- 2) Pengembangan wilayah sumber pertumbuhan baru produksi pangan pada daerah dengan risiko iklim rendah dan dampak lingkungan minimum (low emission)
- 3) Pengembangan sistem ketahanan pangan petani dan masyarakat dengan pola pangan yang sehat dan bergizi serta seimbang, serta terwujudnya diversifikasi pangan hingga tingkat optimum. Sedangkan strategi yang ditempuh dalam adaptasi perubahan iklim yaitu:

- a) Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim
- b) Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap cekaman iklim.
- c) Optimalisasi penggunaan sumberdaya lahan, air dan genetik.
- d) Penguatan peran semua pemangku kepentingan melalui rebug petani di tingkat lokal dalam perencanaan awal tanam serentak yang mengadopsi kalender tanam dan antisipasi perubahan iklim.

Fenomena bencana alam yang dialami diperlukan adanya kebijakan manajemen bencana yang mendorong kemandirian daerah dalam penanganan bencana. Oleh karena itu bentuk intervensi pemerintah dan pemerintah daerah harus didasarkan pada besarnya potensi dampak bencana terhadap penurunan produksi pertanian, sehingga perlu dibangun kriteria besarnya kejadian bencana untuk masing- masing jenis intervensi yang dibutuhkan. Apabila kejadian bencana hanya mengancam sasaran produksi suatu kabupaten/kota, maka penanganan bencana menjadi tanggung jawab kabupaten/kota yang bersangkutan. Apabila kejadian bencana hanya mengancam sasaran produksi



suatu provinsi, maka penanganan menjadi tanggung jawab provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya Apabila kejadian bencana sudah mengancam sasaran produksi suatu nasional, maka penanganan menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk melakukan intervensi bencana.

Perlindungan tanaman sebagai salah satu upaya dalam penanganan dampak perubahan ekologi dan ekosistem secara mendadak. Perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip ramah lingkungan, efisien dan diupayakan dilakukan dengan menggunakan musuh alami.

Beberapa langkah dalam mengantisipasi dan menangani bencana alam dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan diantaranya melalui:

- a) Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani yang terkena puso atau banjir.
- b) Pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani.
- c) Perluasan penggunaan teknik dan teknologi budidaya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
- d) Penerapan pengendalian hama terpadu melalui brigade proteksi tanaman.

- e) Revitalisasi gudang pestisida, penyediaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman.
- f) Penguatan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

**h. Mengelola dan mendorong pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian**

Sarana produksi utama pertanian yang selama ini diberikan dan akan terus dilanjutkan oleh pemerintah untuk mendukung usaha pertanian, yaitu benih dan pupuk. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan dalam menyediakan benih penjenis (*breeder seed*) dan benih dasar (*foundation seed*) dan mengendalikan penyediaan benih pokok (*stock seed*) dan benih sebar (*extention seed*) yang dilakukan oleh produsen benih melalui proses sertifikasi dan akreditasi. Adapun penyediaan pupuk dan organik sebagian besar dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penyediaan pupuk organik dilakukan oleh pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat. Selain itu juga didorong tumbuhnya pengolahan pupuk organik yang diusahakan oleh kelompok tani, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk dijual ke kelompok lain yang membutuhkan. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan subsidi benih dan pupuk, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang dapat menjamin terlaksananya prinsip 6 tepat



(yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu dan harga) dalam alokasi dan distribusi benih dan pupuk sesuai kebutuhan di masing-masing daerah melalui: (1) peningkatan peran kelembagaan usaha swasta dan masyarakat dalam penyediaan/produksi secara mandiri dan pendaftaran benih dan pupuk yang ramah lingkungan; (2) peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk menggunakan benih unggul bersertifikat dan penggunaan pupuk secara berimbang; dan (3) pengawalan pembinaan dan pengawasan penggunaan benih dan pupuk bersubsidi, serta (4) penyaluran benih dan pupuk bersubsidi dengan memperhatikan aspek spesifik lokasi/wilayah.

Untuk mendukung penjabaran kebijakan di atas, mekanisme dan manajemen pengadaan, penyaluran dan monitoring pengadaan benih dan pupuk tersebut diupayakan terus dilakukan penyempurnaan sehingga memenuhi prinsip 6 tepat. Beberapa strategi subsidi benih dan pupuk yang dibutuhkan adalah:

- 1) Fokus pada penyediaan benih sumber melalui kerjasama dengan UPT dan UPTD perbenihan untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerah serta penguatan jalur benih antar lapang;
- 2) fokus pada peningkatan produksi dan penerapan benih unggul bersertifikat tanaman pangan, yaitu padi inbrida dan hibrida, jagung komposit dan hibrida dan kedelai melalui

kerjasama produksi dengan penangkar benih lokal sebagai upaya mendorong tumbuhnya industri perbenihan yang mandiri;

- 3) Fokus pada penerapan teknologi rekomendasi spesifik lokasi dengan mendorong peningkatan penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui subsidi harga dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolahan pupuk organik di tingkat petani;
- 4) Fokus pada keluwesan perubahan pagu alokasi subsidi antar daerah, antar waktu dan antar sub-sektor yang didukung dengan upaya peningkatan pengawasan produksi dan peredaran benih dan pupuk melalui peningkatan kinerja komisi pengawasan benih dan pupuk untuk menjamin terlaksananya prinsip 6 Tepat; serta
- 5) Fokus pada pembinaan dan bimbingan teknis kelompok tani dalam penyusunan rencana pengajuan usulan benih dan pupuk bersubsidi (penyusunan RDKK).

Terkait dengan sistem pembiayaan usaha pertanian, terdapat berbagai sumber pembiayaan pertanian yang saat ini tersedia untuk mendukung usaha pertanian yang mencakup perbankan konvensional dan syariah, non perbankan, investasi BUMN dan swasta, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), lembaga masyarakat adat, serta fasilitas melalui APBN dan APBD. Secara khusus, Pemerintah





berupaya menyediakan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada petani untuk mengakses sumber pembiayaan kredit pertanian. Untuk itu, dalam periode 2015-2019 dibutuhkan keberadaan kebijakan pembiayaan yang dapat: (1) mengintegrasikan skema kredit yang mudah diakses, prosedur mudah dan persyaratan lunak, (2) menciptakan skema kredit dengan penyediaan subsidi bunga dan atau penjaminan, (3) menciptakan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dari daerah, perbankan dan pusat (4) dukungan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintah dari pusat dan daerah dalam mendampingi petani untuk mengakses sumber permodalan yang tersedia, serta memantau, mengawasi dan melaporkan ketepatan dalam proses pengajuan, pencairan dan penggunaannya; (5) perlindungan terhadap usaha pertanian dan mengurangi dampak resiko (mitigasi) melalui pengembangan usaha pertanian; dan (6) memperkuat status legalitas kepemilikan asset petani.

**i. Mendorong upaya perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian**

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dalam kegiatan usahatani, maka dikembangkan asuransi pertanian. Diharapkan asuransi pertanian dimanfaatkan oleh petani untuk memberi rasa aman dan mencegah tingkat kerugian yang lebih banyak bila mengalami musibah

kekeringan, banjir atau kegagalan panen akibat serangan hama. Sebagai upaya untuk mendorong penggunaan asuransi pertanian, maka pemerintah bisa melakukan bantuan sebagian pembayaran premi sehingga biaya premi yang dibayar petani atau peternak lebih kecil.

**j. Meningkatkan dukungan dan pemanfaatan inovasi teknologi**



Dalam mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan yang produktif, efisien dan berdaya saing, dikembangkan berbagai inovasi dan teknologi dengan produktivitas dan efisiensi tinggi mendukung ketahanan pangan berbagai komoditas utama dan peningkatan ekspor komoditas potensial melalui : a) Penyesuaian dan pengembangan sistem usahatani terhadap perubahan iklim; b) Pengembangan dan penerapan teknologi adaptif terhadap perubahan iklim; c) Pengembangan dan optimalisasi sumberdaya lahan, air dan genetik; d) Budidaya dan bertani secara berkelanjutan dengan baik, penanganan hasil panen yang baik, pengolahan/pasca panen dan membangun sistem distribusi yang baik. Indikasi atau ukuran keberhasilan penerapan teknologi tersebut adalah terpenuhinya standar dan kualitas produk pertanian sehingga memiliki daya saing komparatif dan kompetitif. Teknologi pertanian yang mampu memberikan perlakuan presisi di sepanjang rantai



produksi, terintegrasi dan terpadu dari hulu ke hilir termasuk mendaur ulang proses pemanfaatan (zero waste) dan pemanfaatan sumberdaya lokal serta diversifikasi merupakan salah satu bagian dari strategi penguatan teknologi. Ke depan, upaya mendorong sinergitas pengembangan dan penerapan teknologi dalam pencapaian kinerja pembangunan pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mendorong penciptaan varietas/bibit unggul baru dan teknologi pertanian yang terintegrasi, multi disiplin dan terpadu sehingga menjadi solusi menyeluruh bagi penyelesaian permasalahan pembangunan serta memberikan manfaat dan dampak secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
- 2) Meningkatkan diseminasi dan upaya percepatan pemasyarakatan hasil penelitian dan pengembangan bagi stakeholders dan pengguna secara luas.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan fasilitas peneliti di bidang pertanian
- 4) Meningkatkan penelitian yang memanfaatkan teknologi terkini dalam rangka mencari terobosan peningkatan produktivitas benih/bibit tanaman/ternak
- 5) Memperluas cakupan penelitian mulai dari input produksi, efektivitas lahan, teknik budidaya, teknik pasca panen, teknik

pengolahan hingga teknik pengemasan dan pemasaran

- 6) Membina petani maju sebagai patron dalam pengembangan dan penerapan teknologi baru di tingkat lapangan

## 2. **Melaksanakan koordinasi dalam peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan**

Strategi yang bisa dilakukan untuk peningkatan diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

### a. **Koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta penguatan kelembagaan pangan.**

Dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan dilakukan upaya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penyediaan pangan strategis beras, jagung dan kedelai dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau,
- 2) Melakukan koordinasi dengan kementerian lain, pemerintah provinsi dan kabupaten dan pihak swasta,
- 3) Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang terkait dengan peningkatan ketersediaan pangan yang bermutu, penggunaan



- sumberdaya alam yang efisien, ramah lingkungan, teknologi tepat guna,
- 4) Mendorong terbangunnya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan sehingga harga jual produk pangan menjadi lebih kompetitif dan adil,
  - 5) Mendorong memperkuat cadangan pangan pemerintah dan masyarakat desa,
  - 6) Mendorong produksi olahan pangan berbasis sumberdaya lokal.
  - 7) Memperkuat sistem logistik pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan,
  - 8) Mendorong pemangku kepentingan menyediakan cadangan beras,
  - 9) Mendorong adanya dana cadangan beras sebagai instrumen tanggap darurat jika terjadi kerawanan pangan yang diakibatkan oleh bencana,
  - 10) Mendorong tersedianya dan tersalurkannya bantuan pangan bagi keluarga miskin,
  - 11) Mendorong tersedianya dan tersalurkannya pangan bersubsidi.
  - 12) Mendorong penanggulangan kemiskinan di pertanian dan pedesaan,
  - 13) Pemantauan harga pangan strategis secara berkala

- 14) Mendorong pihak swasta untuk ikut berperan dalam penyediaan pangan, distribusi pangan dari sentra produsen ke sentra konsumen.

**b. Mendorong kemandirian pangan di level kabupaten dan keluarga**

Dalam upaya mendorong kemandirian pangan di level kabupatendan keluarga dilakukan upaya sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi koordinasi pusat-daerah,
- 2) Merespon dan mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan pangan dan gizi di daerah.
- 3) Mendorong terbentuknya, berjalan dan berfungsinya dengan baik Dewan Ketahanan Pangan di daerah provinsi dan kabupaten/kota,
- 4) DKP daerah menyelenggarakan forum koordinasi berupa konferensi DKP untuk koordinasi DKP provinsi dan sidang regional DKP untuk koordinasi kabupaten/kota,
- 5) Mendorong berjalannya Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) yang berada di tingkat provinsi hingga di tingkat kecamatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan umum di daerah termasuk masalah ketahanan pangan di daerah.



- 6) Pengembangan pasar untuk melayani kebutuhan pangan masyarakat baik tingkat kabupaten maupun desa.
- 7) Mendorong lumbung pangan desa.
- 8) Pengembangan pangan lokal untuk kebutuhan keluarga dan peningkatan pendapatan keluarga
- 9) Penguatan sistem isyarat dini kerawanan pangan dan gizi baik hingga di tingkat kecamatan.

**c. Menciptakan kegemaran konsumsi pangan berbahan sumberdaya lokal**

Strategi yang bisa dilakukan dalam menciptakan kegemaran konsumsi pangan berbahan sumberdaya lokal diantaranya:

- 1) Pembinaan sistem produksi dan konsumsi pangan masyarakat agar terhindar dari cemaran biologis, kimia dan fisik yang berbahaya,
- 2) pemanfaatan lahan pekarangan,
- 3) pengenalan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis pangan lokal,
- 4) sosialisasi, promosi dan kampanye diversifikasi konsumsi pangan

**d. Membangun dengan pendekatan kawasan, pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional**

**1) Mengembangkan kawasan pertanian**

Kawasan pertanian adalah merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen pembangunan di wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya dan keberadaan infrastruktur penunjang. Pengembangan kawasan pertanian dimaksudkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional, pengembangan dan penyediaan bahan baku bioindustri, serta penyediaan bahan bakar nabati melalui peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan. Pengembangan kawasan pertanian dalam operasionalnya harus disesuaikan dengan potensi agroekosistem, infrastruktur, kelembagaan sosial ekonomi mandiri dan ketentuan tata ruang wilayah.

Untuk menuju kondisi ideal yang diharapkan dalam pengembangan kawasan pertanian, maka secara garis besar dapat dirumuskan langkah-langkah pengembangan kawasan,





yaitu sebagai berikut: (1) penguatan perencanaan pengembangan kawasan; (2) penguatan kerjasama dan kemitraan; (3) penguatan sarana dan prasarana; (4) penguatan sumber daya manusia; (5) penguatan kelembagaan; dan (6) percepatan adopsi teknologi bioindustri dan bioenergi, (7) pengembangan industri hilir.

## **2) Mendukung pengembangan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal**

Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakatnya yang sebagian besar petani. Dengan demikian akan mengurangi kesenjangan ekonomi yang tinggi antara daerah perbatasan dengan negara tetangga, sehingga akan mendorong utuhnya NKRI. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan potensi ekonomi di bidang pertanian, meningkatkan perdagangan ekspor-impor, menurunkan kegiatan perdagangan produk pertanian ilegal, serta memperkuat layanan perkarantina di perbatasan.

Pengembangan daerah tertinggal ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dengan daerah maju. Dalam pendekatan sektor

pertanian, tidak terlepas dalam penyediaan sarana dan prasaran produksi yang memadai, mempercepat peningkatan kapasitas petani, pengembangan dan diseminasi teknologi spesifik lokasi, penguatan jaringan pasar produk pertanian, dan promosi potensi pertanian daerah tertinggal. Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dilakukan dengan lebih memberdayakan Orang Asli Papua di bidang produksi pertanian.

### 3) **Mendukung pembangunan desa dan kawasan desa**

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan didorong dalam upaya mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota. Penguatan usaha budidaya pertanian dan pengolahan hasil pertanian sebagai bagian dari usaha ekonomi masyarakat desa dalam ikut mengurangi jumlah desa tertinggal. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi seperti benih, pupuk dan alat mesin pertanian menjadi hal yang perlu diperhatikan. Diharapkan tiap desa memiliki komoditas pertanian unggulan yang diarahkan menjadi sentra produksi salah satu komoditas pertanian sebagai bekal menjadi desa mandiri. Desa-desa yang memiliki kemampuan didorong untuk menjadi desa mandiri benih dan desa organik. Untuk itu diharapkan anggaran desa juga dimanfaatkan



untuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian, memperkuat kelembagaan usaha pertanian, serta meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pengolahan hasil pertanian.

#### 4) Fokus komoditas strategis

Terkait dengan fokus komoditas yang dikembangkan terdiri dari delapan kelompok produk, yaitu:

- a) Bahan makanan pokok nasional: padi, jagung, kedelai, gula, telur dan daging unggas, daging sapi/kerbau
- b) Bahan makanan pokok lokal: sagu, jagung, umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar)
- c) Produk pertanian penting pengendali inflasi: cabai, bawang merah, bawang putih
- d) Bahan baku industri (konvensional): sawit, karet, kakao, kopi, lada, pala, teh, susu, ubi kayu
- e) Bahan baku industri: sorgum, gandum, tanaman obat, minyak atsiri, cengkeh
- f) Produk industri pertanian (prospektif): aneka tepung dan jamu
- g) Produk energi pertanian (prospektif): biodiesel, bioetanol, biogas

- h) Produk pertanian berorientasi ekspor dan substitusi impor: buah-buahan (nanas, manggis, salak, mangga, jeruk), kambing/ domba, babi, florikultura.

## 5) **Mengimplementasikan Pengarusutamaan gender**

Pengarusutamaan gender (PUG) mengarah kepada aspek kesetaraan dan keadilan petani (laki-laki dan perempuan) dengan memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman, peran dan tanggung jawab serta dampaknya pada seluruh pelaku pembangunan. Telah menjadi komitmen Kementerian/Lembaga sejak diterbitkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Kementerian/Lembaga diwajibkan menerapkan PUG sebagai salah satu strategi dalam pencapaian program kerjanya. Strategi tersebut juga harus dilaksanakan pada kebijakan pembangunan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta mendorong setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program diawali dengan proses analisis gender melalui empat aspek, yaitu: partisipasi, akses, kontrol dan manfaat yang diperoleh dari pelaku itu sendiri.

## 6) **Melakukan kerjasama bilateral, regional dan internasional**

Kerjasama antar negara dalam bilateral, regional maupun dalam organisasi



internasional didasari atas saling menghormati antar negara merdeka dan memberi manfaat saling menguntungkan.

Salah satu bidang kerjasama diantaranya adalah Kerjasama Selatan-Selatan (KSS), sebagai perwujudan kerja sama antarnegara berkembang yang didasarkan pada prinsip-prinsip solidaritas, nonkondisionalitas, saling menguntungkan dan non-interference. Sebagai negara berkembang yang memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta berbagai keunggulan dalam ekonomi dan politik internasional, Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam Kerjasama Selatan-Selatan. Kerjasama di sektor pertanian dalam KSS terus dilaksanakan diantaranya dalam bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan transfer teknologi.

## 7) **Penguatan faktor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian**

### a) **Meningkatkan kapasitas SDM pertanian**

Terdapat tiga komponen SDM pertanian yaitu: 1) non-aparatur yang meliputi petani/tenaga kerja pertanian dan pelaku usaha pertanian lainnya, 2) aparatur pertanian, baik fungsional maupun struktural yang lebih berperan sebagai

fasilitator, motivator dan dinamisator dalam proses pembangunan pertanian, 3) lembaga petani pedesaan seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), koperasi, lembaga keuangan mikro, kios sarana produksi, dan lembaga pemasaran.

Dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian tersebut, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penguatan kapasitas penyuluh Pertanian Polivalen di tingkat lapangan dan Penyuluh Pertanian Spesialis di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.
2. Pelatihan bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan jenjang karir Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Pelatihan bagi pengelola P4S dan Pengurus Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya dilaksanakan oleh UPT Pelatihan, sedangkan Pelatihan bagi petani pelaku utama agribisnis dilaksanakan oleh P4S.



4. Pendidikan Tinggi bidang Rumpun Ilmu Hayati Pertanian (RIHP) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional Penyuluh Pertanian, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak (PBT), Pengawas Mutu Pakan Ternak, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, fungsional informasi pasar dan Karantina.
5. Pendidikan Menengah Kejuruan di bidang pertanian diarahkan untuk memenuhi tenaga teknis menengah dan menyiapkan wirausahawan muda di bidang pertanian.

**b) Meningkatkan layanan perkarantinaan**

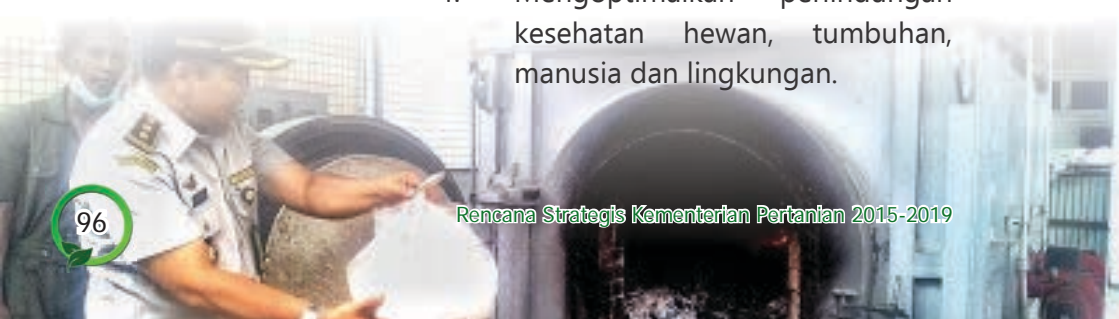
Institusi Karantina Pertanian Nasional dihadapkan kepada upaya pengembangan kapasitas (Capacity Building) di berbagai sektor guna mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang telah lebih jauh melangkah. Untuk itu diperlukan a) Regulasi teknis, sumber daya, dana, sarana dan fasilitas pendukung yang



handal guna melindungi sumber alam hayati nasional, b) Implementasi berbagai regulasi internasional ke dalam sistem regulasi nasional perkarantinaaan; c) meningkatkan sarana pelayanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan; d) Mengoptimalkan perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, manusia dan lingkungan.

Dalam rangka peningkatan dukungan perkarantinaaan, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Menyiapkan regulasi teknis, sumberdaya, dana, sarana dan fasilitas pendukung yang handal guna melindungi sumber alam hayati.
2. Implementasi berbagai regulasi internasional kedalam sistem regulasi nasional perkarantinaaan.
3. Meningkatkan sarana pelayanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
4. Mengoptimalkan perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, manusia dan lingkungan.







### c) **Mengelola regulasi**

Dalam rangka pengelolaan regulasi, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan regulasi dan turunan regulasi.
2. Menyusun perencanaan penyusunan regulasi lima tahunan
3. Melaksanakan dengar pendapat dari masyarakat terkait dengan konsep peraturan yang akan diterbitkan.
4. Memfasilitasi terbitnya regulasi yang telah disusun.
5. Melakukan review terhadap regulasi yang telah dikeluarkan dan mengevaluasi efektivitasnya.

### d) **Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi**

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.



2. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi.
3. Melaksanakan e-government dengan dukungan teknologi informasi terkini.
4. Pengelolaan aplikasi dalam mendukung manajemen pembangunan
5. Pengelolaan keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Penguatan sistem database sebagai penunjang pengambil kebijakan

**e) Mengelola perencanaan yang efisien**

Dalam rangka pengelolaan perencanaan, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dan lima tahunan,
2. Melakukan review terhadap dokumen renstra, renja serta kebijakan yang diambil,
3. Koordinasi penyelenggaraan pembangunan pertanian lintas sektor dan pusat-daerah, serta



4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan pertanian.

**f) Mengelola sistem pengawasan**

Dalam rangka pengelolaan sistem pengawasan, maka akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengelolaan arah dan strategi kementerian sebagai satu visi bagi setiap aparatur pelaksana,
2. Melakukan peninjauan manajemen terhadap jalannya pelaksanaan program,
3. Melakukan pengawasan internal,
4. Melakukan pengukuran dan pengelolaan kepuasan stakeholders
5. Melakukan pengendalian dokumen dan pengarsipan.

**g) Mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati**

Sesuai dengan UU No. 5 tahun 1994, keanekaragaman hayati (KEHATI) merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik (perairan) lainnya, serta kompleks-komplek

ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Berdasarkan definisi dari undang-undang tersebut, keanekaragaman hayati terdiri atas tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem.

Kebijakan yang terkait dengan keanekaragaman hayati meliputi: 1) peningkatan pemahaman tentang pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kegiatan pembangunan pertanian berkelanjutan, 2) peningkatan perlindungan, pelestarian dan rehabilitasi keanekaragaman hayati, 3) memberikan manfaat dan nilai ekonomi dari kekayaan hayati melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan baru lokal dalam mendukung diversifikasi pangan, biofarmaka, kosmetika dan pemanfaatan lainnya, serta 4) pengembangan iptek dan peningkatan kapasitas pengelolaan keanekaragaman hayati.



## **h) Mendorong berkembangnya bio-industri dan bioenergi**

Dalam rangka pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Menyusun peta jalan pengembangan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
2. Penguatan pasokan hasil produksi komoditas bahan baku bioindustri dan bioenergi melalui pola kawasan produksi
3. Mengembangkan industri pengolahan sederhana berbasis di pedesaan
4. Mendorong industri menerapkan zero waste management.
5. Mendorong berkembangnya pengolahan lanjutan di dalam negeri dari komoditas pertanian dengan mengacu pohon industri yang ada dan berkembang.
6. Mendorong investasi PMA dan PMDN bidang pengolahan hasil pertanian terutama berteknologi menengah dan tinggi.

## C. Langkah Operasional

Dalam mencapai sasaran strategis Kementerian Pertanian, maka disusun langkah operasional sebagai berikut:

### 1. Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai

Dalam rangka pencapaian sasaran pencapaian ketahanan pangan sebagai bagian dari kedaulatan pangan nasional, maka disusun langkah operasional peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Target swasembada dari ketiga komoditas tersebut menjadi penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional dengan mengedepankan produksi dalam negeri dan kemandirian didalam menentukan kebijakan nasional di bidang pangan. Langkah operasional peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai terbagi dua yaitu peningkatan luas tanam dan peningkatan produktivitas.

#### a. Peningkatan Luas Penanaman

- Pemanfaatan dan pencetakan lahan baku sawah baru 1 juta hektar
- Optimasi lahan 1 juta hektar,
- Penambahan lahan kering 1 juta hektar untuk kedelai dan jagung serta untuk produk pertanian lainnya,
- Peningkatan indeks pertanaman (IP),
- Pemanfaatan lahan terlantar,
- Penerapan pola tumpangsari.
- Pemanfaatan pertambahan luas areal beririgasi tersier



- b. Peningkatan Produktivitas
- Penerapan pengelolaan usahatani dengan sistem yang lebih baik
  - Penyediaan benih unggul padi dan jagung
  - Subsidi dan penyediaan pupuk lebih dari 9 juta ton pertahun
  - Bantuan pengolahan pupuk organik sekitar 1500 unit
  - Pembangunan 1000 desa mandiri benih
  - Pemberdayaan penangkar benih
  - Bantuan alat dan mesin pertanian lebih dari 70 ribu unit,
  - Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan optimasi air untuk lebih dari 4,5 juta hektar,
  - Peningkatan kapasitas teknis pertanian untuk 70 ribu orang
  - Pengembangan kawasan produksi padi, jagung dan kedelai berskala ekonomis dan berdaya saing
  - Pemanfaatan kalender tanam
  - Penyediaan teknologi padi, jagung dan kedelai
  - Penyediaan benih sumber padi, jagung dan kedelai
  - Penciptaan varietas unggul baru padi, jagung, kedelai
  - Penerapan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
  - Penerapan pengendalian hama dan penyakit

- Penerapan asuransi pertanian
- c. Dukungan Pasca Panen, pengolahan dan Pemasaran
  - Dukungan peralatan pasca panen sekitar 30 ribu unit,
  - Revitalisasi penggilingan padi sekitar 2 ribu unit
  - Dukungan science dan agro techno park di daerah sentra produksi
  - Penyediaan model revitalisasi penggilingan padi kecil dan penanganan pasca panen jagung dan kedelai
- d. Dukungan Kelembagaan
  - Penguatan balai penyuluhan lebih dari 4000 unit
  - Pengendalian rekomendasi impor
  - Mendorong struktur pasar yang lebih baik untuk meningkatkan margin petani
  - Penyediaan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian komoditas padi, jagung dan kedelai

## 2. Peningkatan Produksi Tebu



Tebu sebagai salah satu komoditi unggulan perkebunan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional. Hal ini sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian dimana gula berbasis tebu menjadi komoditas strategis untuk





peningkatan ketahanan pangan nasional. Gula berbasis tebu dikelompokkan menjadi GKP (gula Kristal putih) yang biasa dikonsumsi dalam skala rumah tangga dan GKR (gula Kristal rafinasi) yang banyak digunakan untuk kebutuhan industri seperti industri makanan dan minuman. Target lima tahun ke depan adalah tercapainya kebutuhan konsumsi gula rumah tangga.

Beberapa langkah operasional dalam mencapai peningkatan produksi tebu meliputi:

- a. Pemantapan Areal Tebu
  - Pemantapan lahan tebu lebih dari 100 ribu ha
  - Penyediaan lahan untuk kebun benih unggul
  - Pemanfaatan lahan marginal untuk tanaman tebu
  - Suplesi air melalui embung atau pompanisasi
  - Penyediaan traktor pengolah tanah dan sarana produksi lainnya
- b. Peningkatan Produktivitas Tebu
  - Pengembangan Kawasan Produksi Tebu berskala ekonomis dan berdaya saing
  - Penataan varietas tebu dan pengadaan benih tebu, sarana produksi lainnya
  - Penerapan pengelolaan budidaya yang baik
  - Melakukan bongkar ratoon dan rawat ratoon
  - Penyediaan benih sumber dan teknologi tebu
  - Pengendalian organisme pengganggu tanaman
  - Bantuan alat mesin pertanian

- c. Penguatan di sektor hilir pergulaan
- Mendorong revitalisasi pabrik gula yang ada
  - Mendorong berdirinya pabrik gula yang baru di sentra produksi tebu
  - Optimalisasi hari giling untuk mencegah penurunan rendemen
  - Pemanfaatan kapasitas giling pabrik gula
  - Membantu pengolahan dan pemasaran gula rakyat
  - Mendorong penerapan Kebijakan ekspor, proteksi atau pembatasan impor serta pengaturan harga yang kondusif dan bersaing
- d. Dukungan Kelembagaan
- Penguatan kelembagaan riset untuk tebu
  - Penguatan kelembagaan usahatani dan keterampilan petani tebu
  - Fasilitasi kredit yang diberikan melalui KPTR
  - Pembiayaan untuk revitalisasi dan pembangunan pabrik gula
  - Penyempurnaan pengaturan tataniaga pertebuan
  - Menjaga stabilitas harga di tingkat petani
  - Rekomendasi kebijakan impor dan ekspor gula
  - Mendukung kemudahan dan Percepatan penerbitan sertifikasi lahan petani dan HGU perkebunan.
  - Penerapan standar mutu komoditas tebu dan gula



### 3. Peningkatan Produksi Daging

Peningkatan produksi daging dan protein hewani lainnya (telur dan susu) dilakukan antara lain meliputi peningkatan populasi dan distribusi ternak dari kawasan padat ke wilayah berlimpah biomassa tetapi kosong ternak, serta peningkatan produktivitas ternak melalui



penyediaan air dan pakan murah, pelayanan pejantan unggul, pelayanan inseminasi buatan yang lebih baik dan penerapan good farming practices. Selain itu dilakukan peningkatan produksi daging melalui penggemukan dan tunda potong sesuai potensi genetik dan potensi ekonomi ternak, pencegahan pemotongan sapi (ternak) betina produktif, pencegahan dan pengendalian penyakit untuk mengurangi angka mortalitas anak dan induk serta peningkatan mutu genetik ternak melalui seleksi dan persilangan. Langkah-langkah operasional yang akan dilakukan antara lain meliputi :

- a. Peningkatan perbibitan dan produksi ternak
  - Produksi benih ternak lebih dari 4 juta dosis/tahun. Optimalisasi Reproduksi lebih dari 1 juta ekor/tahun
  - Produksi calon indukan atau calon bibit lebih dari 150 ribu ekor/tahun
  - Pengadaan indukan dan pejantan sapi
  - Penyediaan galur unggul sapi
  - Penyediaan teknologi peternakan sapi

- penyediaan bibit sumber ternak
- Penyediaan seed vaksin
- b. Pengembangan pakan ternak
  - Pengembangan hijauan pakan ternak di lebih dari 30 ribu hektar lahan kering
  - Pengembangan Pakan Olahan/Bahan Pakan
  - Pengembangan Mutu dan keamanan Pakan
  - Penciptaan varietas unggul baru ternak
  - Penyediaan benih sumber tanaman pakan ternak
- c. Kesehatan hewan
  - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
  - Penanganan gangguan reproduksi
  - Penyediaan teknologi veteriner
- d. Dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha Peternakan
  - Penguatan Sarana dan Prasarana Sentra Peternakan Rakyat
  - Konsolidasi penguatan kapasitas peternak
  - Peningkatan keamanan produk hewan
  - Pengembangan usaha pengolahan hasil ternak
  - Pengembangan sarana dan kelembagaan pasar ternak dan hasil ternak



#### **4. Peningkatan Distribusi Pangan**

Distribusi pangan merupakan salah satu upaya dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Distribusi pangan dimaksudkan untuk memberi jaminan pasokan bagi konsumen dari sentra - sentra produksi pertanian domestik.

Distribusi pangan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Monitoring stok dan distribusi gabah/beras di tingkat penggilingan padi regional /nasional;
- Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan perumusan kebijakan harga gabah/padi;
- Pemetaan potensi panen, monitoring serapan lembaga distribusi pangan dan prognosa neraca pangan;
- Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat.

#### **5. Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Pangan**

Dalam upaya meningkatkan akses dan pemanfaatan pangan maka dilakukan langkah operasional :

- Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM);
- Penanganan Kerentanan dan Kerawanan Pangan sesuai hasil pemetaan;
- Pembangunan lumbung pangan masyarakat
- Membangun kawasan Mandiri pangan

- Implementasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
- Intervensi dan Mitigasi Penanganan Rawan/Kurang Pangan;
- Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP/KRPL);
- Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan.

## 6. **Peningkatan Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal**

Dalam rangka meningkatkan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, maka dilakukan upaya atau langkah operasional yaitu :

- Pemberdayaan pekarangan pangan di lebih dari 2.500 desa;
- Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan lokal kepada aparat dan masyarakat;
- Pendidikan konsumsi pangan lokal melalui jalur pendidikan formal dan non-formal;
- Penyusunan Peta Pangan Lokal Nasional;
- Pemantauan Penganekaragaman konsumsi pangan
- Pengembangan model pangan pokok lokal
- Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal UMKM dan Rumah Tangga.

## 7. **Stabilisasi Produksi Cabai dan Bawang Merah**

- a. Peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Cabe



dan Bawang Merah

- Pengembangan kawasan cabe dan bawang merah
- Perbaikan infrastruktur kebun/lahan (jalan usaha tani, rumah kaca, dll)
- Penerapan GAP melalui Sekolah lapang GAP
- Registrasi kebun dan Registrasi bangsal pasca panen
- Fasilitasi sarana prasarana pasca panen
- Penerapan teknologi tepat guna (*inovatif*)
- Penyediaan teknologi cabai dan bawang merah

b. Pengembangan sistem perbenihan

- Penguatan kelembagaan perbenihan
- Penumbuhan industri benih
- Penyediaan benih sumber
- Penyediaan benih sebar tanaman cabe dan bawang merah
- Penciptaan varietas unggul cabai dan bawang merah *off season*

c. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura ramah lingkungan

- Pengelolaan OPT melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu Pengembangan klinik PHT
- Peningkatan kesadaran masyarakat dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tanaman
- Peningkatan teknologi pengendalian OPT

ramah lingkungan

- Pengendalian OPT ramah lingkungan pada daerah serangan endemis, sumber infeksi, daerah serangan baru dan daerah eksplosif
- d. Peningkatan pengolahan dan Pemasaran Cabe dan Bawang Merah
- Pengembangan unit pengolahan hortikultura (Gudang Pengering dan Pengolahan)
  - Pengembangan infrastruktur kelembagaan pasar (Pasar Tani, Terminal Agribisnis dll)
  - Pengembangan Sistem Logistik dan Pergudangan (cold change) sebagai Sistem Stok
  - Rekomendasi Kebijakan Impor dan ekspor hasil hortikultura
  - Penyediaan teknologi pasca panen cabai dan bawang merah
- e. Pemantauan dan Antisipatif Harga Cabe dan Bawang Merah
- Pengumpulan, pengolahan, analisis dan perumusan kebijakan harga cabe dan bawang merah;
  - Pengembangan lembaga usaha pangan masyarakat;
  - Pemetaan potensi dan monitoring serapan panen;
  - Pemantauan dan Tindaklanjut gejala harga cabe dan bawang merah.





## 8. Peningkatan Komoditas Hortikultura yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing

- a. Pengembangan kawasan hortikultura
  - Pengembangan lebih 1.500 ha/thn kawasan tanaman sayuran
  - Perbaikan infrastruktur kebun/lahan
  - Registrasi lebih dari 1200 lahan usaha hortikultura dan bangsal pasca panen
  - Fasilitasi lebih dari 2000 unit sarana prasarana pasca panen
  - Penerapan teknologi inovatif
  - Pengembangan desa organik berbasis hortikultura
- b. Pengembangan sistem perbenihan
  - Penguatan kelembagaan perbenihan
  - Penumbuhan industri benih
  - Penyediaan benih sumber
  - Penyediaan benih sebar tanaman sayura bermutu penyediaan benih sumber hortikultura
- c. Pengembangan sistem perlindungan hortikultura ramah lingkungan
  - Gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman
  - Pengembangan klinik Pengendali Hama Terpadu sekitar 150 unit/thn
  - Peningkatan kesadaran masyarakat dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tanaman

- Peningkatan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan
- Pengendalian OPT ramah lingkungan pada daerah serangan endemis, sum infeksi, daerah serangan baru dan daerah eksplosif
- Rekomendasi penanganan dampak perubahan iklim
- Penyediaan teknologi hortikultura

## 9. Peningkatan Komoditas Perkebunan yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing

- a. Pemantapan Areal Kebun
  - Pemantapan lahan perkebunan sekitar 100 ribu ha/thn
  - Penyediaan lahan untuk kebun benih unggul
  - Pemanfaatan lahan marginal
  - Suplesi air melalui embung atau pompanisasi
  - Penyediaan traktor pengolah tanah dan sarana produksi lainnya
- b. Peningkatan Produktivitas
  - Penyediaan dan pengadaan benih berkualitas
  - Penerapan pengelolaan budidaya yang baik
  - Pembinaan penanganan hama melalui SL-PHT
  - Antisipasi dampak perubahan iklim
  - Penanganan organisme pengganggu
  - Penyediaan benih sumber komoditas



- perkebunan
  - Penyediaan teknologi perkebunan
  - Penerapan standar mutu
- c. Kelembagaan dan Pembiayaan
- Penguatan kelembagaan dan hasil riset perkebunan
  - Penguatan kelembagaan usahatani dan peningkatan keterampilan petani
  - Pengembangan diversifikasi usaha perkebunana secara intensif dan berkelanjutan
  - Mendorong pengembangan komoditas unggulan lokal yang prospektif ekspor,
  - Fasilitasi kredit
  - Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
  - Mendorong berkembangnya industri hilir perkebunan skala rumah tangga dan industry
- d. Kebijakan pemerintah
- Penyempurnaan pengaturan tataniaga hasil perkebunan
  - Menjaga stabilitas harga di tingkat petani
  - Rekomendasi kebijakan ekspor dan impor produk perkebunan
  - Menyiapkan kerangka regulasi yang dibutuhkan
  - Mendorong promosi komoditas perkebunana yang layak ekspor

## 10. Peningkatan Komoditas Peternakan yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing

- a. Peningkatan perbibitan dan produksi ternak
  - Produksi calon indukan/calon bibit ternak lainnya
  - Penguatan sarana dan prasarana SPR ternak lainnya
- b. Pengembangan pakan ternak
  - Pengembangan pakan olahan/bahan pakan ternak lainnya
- c. Kesehatan hewan
  - Peningkatan penanganan penyakit ternak lainnya
  - Penurunan prevalensi penyakit
  - pembebasan wilayah penyakit
  - peningkatan produksi obat hewan, vaksin dan bahan biologik
- d. Pengolahan dan Pemasaran hasil ternak
  - Pengembangan usaha pengolahan hasil
  - Pengembangan pengolahan investasi
  - Pengembangan sarana dan kelembagaan pemasaran
  - Penguatan kelembagaan
- e. Penjaminan Pangan Asal Hewan Ternak
  - Penjaminan produk hewan ASUH



- Pengendalian zoonosis
  - Penerapan kesrawan
- f. Pengembangan pakan ternak
- Penerapan SAKIP
  - Kegiatan kesekretariatan lainnya

## 11. Penyediaan Bahan Baku Bioindustri dan Bioenergi

- a. Penyediaan bahan baku bioindustri
- Pengembangan dan penerapan standar mutu komoditas bahan baku industri melalui penerapan GAP, GHP, GMP dan ISPO
  - Pengembangan kawasan produksi komoditas bahan baku bioindustri yang terintegrasi dengan kawasan industri
  - Pengembangan riset dalam rangka pemanfaatan secara optimal kandungan hasil tanaman dan ternak
  - Penyediaan model pengembangan inovasi teknologi pertanian bioindustri
  - Mendorong integrasi ternak-tanaman untuk menciptakan siklus energi yang lebih tertutup
  - Mendorong penerapan zero waste management
- b. Penyediaan bahan baku bioenergi
- Mendorong ketersediaan bahan baku nabati dalam upaya penyediaan energi terbarukan (termasuk biofuel) sebesar 23% dari total pemanfaatan energi nasional di tahun 2025

- Pemanfaatan produk samping hasil ternak dan tanaman sebagai bahan baku energi
- Pengembangan komoditas potensi antara lain sebagai bahan baku energi tanpa mengganggu target produksi bahan pangan masyarakat
- Pengembangan riset bioenergi yang efisien

## 12. Peningkatan Pendapatan Keluarga Petani

- a. Perlindungan petani
  - Penyediaan dan penyempurnaan sistem penyaluran subsidi input (benih dan pupuk)
  - Pengamanan harga produk hasil pertanian (HPP)
  - Pelaksanaan asuransi pertanian
  - Mendorong pembentukan Bank Pertanian
- b. Pemberdayaan petani
  - Penguatan kelembagaan petani menjadi Koperasi Petani/Badan Usaha Milik Petani (BUMP)
  - Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen usaha melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
  - Fasilitasi akses terhadap teknologi dan informasi melalui Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP)
  - Fasilitasi akses terhadap sumber-sumber permodalan/perbankan.
  - Pemberdayaan perempuan dalam kegiatan



budidaya maupun pengolahan hasil pertanian

- c. Penguasaan Lahan untuk Pertanian
  - Konsolidasi lahan pertanian atau konsolidasi manajemen usaha budidaya pertanian mencapai skala ekonomis layak dan berdaya saing
- d. Penambahan penghasilan dari Hasil Pertanian
  - Penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha industri pengolahan hasil pertanian skala kecil rumah tangga berskala ekonomis layak dan berdaya saing
  - Pemanfaatan hasil samping dan limbah dari usaha industri pengolahan hasil pertanian
  - Peningkatan efisiensi usaha dan pemasaran hasil pertanian

### **13. Peningkatan Kualitas Petani dan Kelembagaannya**

- Pemberdayaan petani/P4S dalam bidang pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan Ketahanan pangan
- Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani melalui kelas kemampuan kelompok Pelatihan dan magang
- Pengawasan dan pendampingan penyuluh di sentra produksi melalui kursus tani, hari lapang petani, rembug tani dan lainnya
- Pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal melalui *community development*

- Pengembangan pos penyuluhan Desa (Posluhdes)
- Penumbuhan Badan Usaha Milik Petani melalui jaringan dan kemitraan usaha
- Pengawasan dan pendampingan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi
- Pengembangan kelembagaan ekonomi petani melalui pengembangan jejaring dan kemitraan usaha

#### 14. Peningkatan Kualitas Aparatur dan Layanan Kelembagaan

- a. Penataan dan Penguatan Organisasi
  - Penataan organisasi yang *right sizing* dan memenuhi kebutuhan sesuai tugas dan fungsi yang diamanahkan,
  - Implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,
  - Penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan jabatan fungsional tertentu di Kementerian Pertanian,
  - Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang nyaman dan kondusif
  - Menjalin sinergitas antar kementerian/ lembaga, pemerintah daerah dan lembaga lainnya.
- b. Membangun budaya kerja yang profesional
  - Peningkatan kualitas dan disiplin kerja
  - Penguatan sistem perencanaan yang berorientasi hasil





- Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi yang terstruktur
  - Penyiapan regulasi yang tepat dan bermanfaat
  - Melakukan mitigasi risiko hukum dan non hukum dari kegiatan strategis yang dijalankan
  - Peningkatan layanan memuaskan
  - Peningkatan PNBP pada unit kerja tertentu
  - Penguatan layanan *property right* hasil temuan
  - Peningkatan layanan penyediaan hasil inovasi dan rekayasa teknologi
  - Mengkoordinasikan kerjasama internasional dan antar lembaga
- c. Pelayanan informasi publik
- Pengelolaan sarana dalam pelayanan informasi publik melalui e-government.
  - Melaksanakan standar pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat.



- Melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi pembangunan di sektor pembangunan.
- Penguatan system informasi basis data yang akurat dan *up to date*

#### 15. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

- Penerapan system pengendalian internal pemerintah
- Pendampingan workshop penyusunan laporan keuangan eselon I dalam rangka mendukung WTP
- Pelaksanaan audit Barang Milik Negara (BMN)
- Pelaksanaan review laporan keuangan

#### D. Program Pembangunan Pertanian

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pertanian, maka akan dilaksanakan 12 program yang dijalankan oleh 11 eselon I yang berada di Kementerian Pertanian.



Tabel 16. Struktur Program dan Eselon I Kementerian Pertanian

No.	Program	Eselon I
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	Sekretariat Jenderal
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Inspektorat Jenderal
3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Dirjen Tanaman Pangan
4	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Produk Hortikultura	Ditjen Hortikultura
5	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	Ditjen Perkebunan
6	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
8	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
9	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian
10	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Badan Ketahanan Pangan
11	Program Peningkatan Kualitas Perkarantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Badan Karantina Pertanian

No.	Program	Eselon I
12	Program Pendidikan Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian

## E. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Kementerian Pertanian dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah.

Regulasi yang terkait dengan sektor pertanian, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, maupun dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian serta produk peraturan operasional lainnya di level pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Kerangka regulasi yang telah ada atau yang dibutuhkan, dikelompokkan mulai dari kebutuhan regulasi terkait input pertanian seperti pemanfaatan sumberdaya genetik, jaminan ketersediaan pupuk dan benih, dukungan infrastruktur, serta regulasi yang terkait lahan dan alsintan. Sedangkan regulasi yang terkait dengan kegiatan budidaya tentunya yang terkait dengan jaminan usahatani tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perlindungan dan pemberdayaan petani. Untuk yang terkait dengan pascapanen, pengolahan dan pemasaran, dibutuhkan regulasi yang mengatur tatacara pascapanen yang baik untuk berbagai produk pertanian, regulasi yang mendorong berkembangnya bioindustri dan pengolahan hasil. Selain itu diperlukan



peraturan yang terkait dengan harga, baik itu harga pembelian pemerintah, bea masuk dan bea keluar, serta regulasi lainnya yang mengatur sistem pemasaran yang sehat.

Sedangkan regulasi yang terkait dengan mutu dan keamanan pangan diperlukan dalam rangka melindungi konsumen serta mendorong produsen menghasilkan produk bermutu. Selain itu juga diperlukan regulasi yang mampu mendorong pertanian memperoleh nilai tambah dari jasa lingkungan seperti agrowisata. Dalam upaya mewujudkan pencetakan lahan pertanian baru di luar Jawa seluas 1 juta hektar serta rencana pendistribusian lahan 9 juta hektar, maka dukungan regulasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya sangat diperlukan.

Dalam rangka mengoptimalkan sistem dan kelembagaan penyuluh, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta perkarantina, maka perlu dilakukan review terhadap regulasi yang ada serta menyusun peraturan operasional. Terhadap beberapa regulasi yang ada, diperlukan usulan revisi regulasi guna memberikan manfaat dan fungsi sistem dan kelembagaan penyuluh yang lebih baik. Beberapa regulasi yang dibutuhkan dalam pembangunan pertanian ke depan diantaranya sebagai berikut:

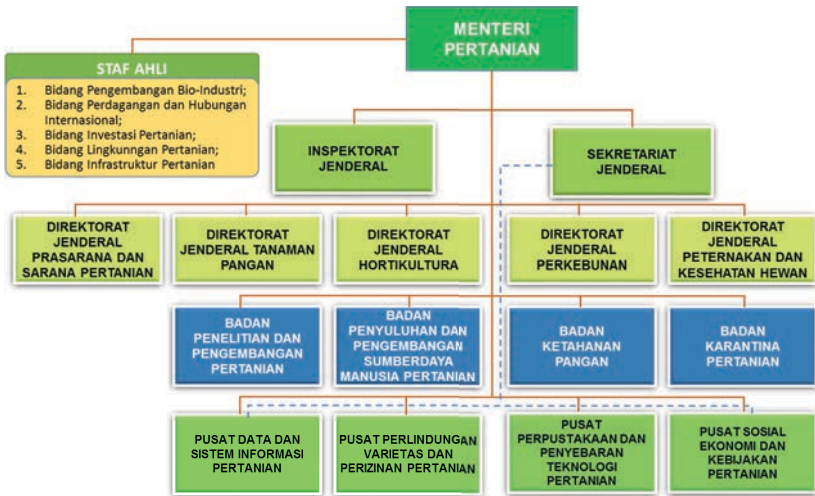
1. Regulasi di bidang lahan: mempercepat penerbitan Perda Provinsi/ Kab/Kota dan menyempurnakan Perda sesuai UU 41/2009.
2. Regulasi sarana pertanian: perbaikan subsidi pupuk dan subsidi benih; pengembangan sistem perbenihan.

3. Regulasi pembiayaan pertanian: mempercepat dan mempermudah persyaratan akses petani pada skim kredit.
4. Regulasi perlindungan petani: implementasi UU 19/2013 asuransi usahatani
5. Regulasi terkait penganeekaragaman pangan dan gizi
6. Regulasi di bidang ekspor pertanian dan impor produk pertanian:
7. Regulasi kemudahan investasi di sektor pertanian

Secara lengkap kerangka regulasi yang terkait dengan pembangunan pertanian seperti ditampilkan pada Lampiran Matrik Kerangka Regulasi.

## **F. Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara, yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian.



Gambar 4. Struktur Organisasi Kementerian Pertanian

Pemerintah telah melakukan penataan organisasi Kementerian Pertanian melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Pertanian, dan melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pertanian. Penataan kelembagaan dilakukan dengan menata kelembagaan di pusat, UPT sampai dengan satuan kerja perangkat daerah dengan didasari semangat untuk mendorong terwujudnya struktur pemerintahan yang efisien dan efektif.

Kementerian Pertanian telah memiliki sepuluh jabatan fungsional terdiri atas (1) Penyuluh Pertanian; (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; (3) Pengawas Benih Tanaman; (4) Pengawas Bibit Ternak; (5) Medik Veteriner; (6) Paramedik Veteriner; (7) Pengawas Mutu Pakan; (8) Pengawas Mutu Hasil Pertanian; (9) Analisis Pasar Hasil Pertanian; dan

(10) Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman. Sedangkan Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan saat ini masih dalam proses penetapan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi.

Disamping itu, Kementerian Pertanian juga menggunakan 24 (dua puluh empat) jabatan fungsional non rumpun ilmu hayat, terdiri atas: (1) Peneliti; (2) Teknisi Litkayasa; (3) Perekraya; (4) Pengawas Sekolah; (5) Guru; (6) Dosen; (7) Widyaiswara; (8) Auditor; (9) Instruktur; (10) Pustakawan; (11) Pranata Komputer; (12) Statistisi; (13) Arsiparis; (14) Analis Kepegawaian; (15) Perencana; (16) Perancang Peraturan Perundang-Undangan; (17) Pranata Humas; (18) Dokter; (19) Dokter Gigi; (20) Perawat; (21) Perawat Gigi; (22) Pranata Lab Kes; (23) Pranata Lab Pendidikan; dan (24) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Badan Ketahanan Pangan sesuai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional diamanatkan sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK).

Secara hirarki di daerah, Kementerian Pertanian memiliki 160 (seratus enam puluh) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan organisasi mandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Kebijakan strategis dalam penataan UPT lebih difokuskan pada evaluasi organisasi UPT untuk memantapkan organisasi eselon I dan dilaksanakan setelah penataan kelembagaan pusat telah selesai.

Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan





Provinsi/Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas dekonsentrasi hanya dapat dilaksanakan oleh dinas provinsi. Sedangkan program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di dinas provinsi maupun di dinas kabupaten/kota.

Selama penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan ini belum diselenggarakan sesuai disiplin program dan disiplin pembiayaan sebagaimana yang dimatangkan dalam peraturan perundangan yang mengatur pemetaan kewenangan dan urusan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di bidang pertanian. Dengan demikian, penjabaran dan implementasi Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 ini ke dalam Rencana Strategis SKPD lingkup pertanian di daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang bentuk dan jenis kegiatan pembangunan pertanian yang harus dilaksanakan di masing-masing lintas jenjang pemerintahan.

Terkait dukungan sumberdaya aparatur sipil negara, Kementerian Pertanian didukung oleh Aparatur Sipil Negara sebanyak 20.344 orang (data per tanggal 17 Juli 2014) yang tersebar di 12 (dua belas) unit kerja eselon I baik yang berada pada kantor pusat maupun unit pelaksana teknis di daerah. Untuk mengantisipasi kekurangan SDM yang ada terkait dengan perubahan lingkungan strategis, telah dilaksanakan perhitungan kebutuhan pegawai melalui peta jabatan yang ideal berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan mengacu pada aplikasi e-formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengamanatkan untuk melakukan pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepegangatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesionalisme, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2012 yang memuat tentang Makna Bekerja dan Nilai-Nilai Kementerian Pertanian yang kemudian dikenal dengan istilah KKPID (Komitmen, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas, dan Disiplin). Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertanian telah dilaksanakan penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengacu kepada PP No.46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BKN No. 13 Tahun 2013 secara menyeluruh dan konsisten. Penilaian prestasi kerja tersebut terdiri atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai dengan bobot 60% dan 40%.







## BAB IV



# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN



## A. TARGET KINERJA

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam periode 2015-2019. Target Kinerja Kementerian Pertanian seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 17. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian 2015-2019

No.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	2018	2019
<b>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</b>			
<b>SS1</b>	<b>Meningkatnya pendapatan keluarga petani</b>		
1	PDB pertanian sempit per jumlah tenaga kerja pertanian (Rp. Juta)	26,9	27
<b>SS2</b>	<b>Meningkatnya ketahanan pangan nasional</b>		
2	Indeks Ketahanan Pangan (The Global Food Security Index)	69	68
<b>CUSTOMER PERSPECTIVE</b>			
<b>SS3</b>	<b>Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional</b>		
3	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional (%)	8,97	10,52
4	Penurunan volume impor untuk produk pertanian nasional (%)	5,02	6,61
5	Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian (%)	0,1	0,1
<b>SS4</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis nasional</b>		
6	Rata-rata peningkatan produksi pangan strategis nasional (%)	5,9	7,9
<b>SS5</b>	<b>Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional</b>		
7	Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia (jumlah)	11	10

No.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	2018	2019
8	Rasio kasus komoditas pertanian impor diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor (%)	40	40
<b>SS6</b>	<b>Stabilnya harga komoditas pertanian strategis</b>		
9	Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional (%)	10-30	10-30
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>			
<b>SS7</b>	<b>Dimanfaatkannya inovasi teknologi</b>		
10	Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap penelitian yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir) (%)	60	70
<b>SS8</b>	<b>Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan</b>		
11	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan (%)	33	33
12	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen) (%)	66,3	68,4
13	Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan (%)	97,67	96,83
<b>SS9</b>	<b>Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan</b>		
14	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam (%)	11,05	11,05
15	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (%)	79	80
<b>SS10</b>	<b>Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di perdesaan</b>		
16	Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	27,5	30
<b>SS11</b>	<b>Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional</b>		
17	Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	27,5	30

No.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	2018	2019
<b>LEARN AND GROWTH</b>			
<b>SS12</b>	<b>Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional</b>		
18	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian (index)	86,79	87,78

## B. KERANGKA PENDANAAN

Dalam menjalankan pembangunan pertanian dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Sumber pendanaan tidak bisa hanya berasal dari APBN, namun perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain diantaranya Pemerintah Daerah melalui APBD prov/ kab, keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, investasi dalam negeri dan investasi asing, perbankan (skim kredit dan Kredit komersial) serta dari swadaya masyarakat.

Dengan menggunakan pendekatan ICVAR (*Incremental Capital Value- Added Ratio*), maka investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian selama periode jangka waktu 2015-2019 yaitu sekitar Rp 450 triliun lebih setiap tahunnya. Sebagian besar (85 - 90 %) merupakan pembiayaan yang bersumber dari swasta, perbankan dan masyarakat. Sebagian kecil (sekitar 10- 15 %) anggaran tersebut disediakan oleh pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.

Untuk mendukung keberhasilan kinerja organisasi pelaksana dalam memfasilitasi proses manajemen pembangunan pertanian, maka harus didukung dengan





sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi, dan atau APBD Kabupaten/Kota.

### **Pendanaan Swasta dan Swadaya Masyarakat**

Pendanaan swasta baik yang bersumber dari kredit usaha komersial perbankan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) seyogyanya dapat ditingkatkan melalui promosi investasi oleh instansi pertanian di pusat, provinsi dan atau kabupaten/kota. Promosi tersebut didasarkan pada potensi dan prospek pembangunan pertanian di daerah.

Sumber pendanaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pertanian adalah yang bersumber dari *Coorporate Social Responsibility (CSR)*, yaitu bagian dari keuntungan usaha swasta dan BUMN/BUMD.

### **Pendanaan APBN**

Khusus kewenangan di bidang pertanian yang merupakan kewenangan pilihan, maka peran pemerintah dapat diberikan melalui kerangka regulasi, pelayanan publik dan investasi. Investasi dalam bentuk APBN, Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas

Pembantuan sektor (K/L) hanya dimungkinkan pada urusan yang memang menjadi kewenangannya, seperti koordinasi perencanaan, pembinaan data dan statistik pertanian, perkarantinaan, penelitian dan pengembangan teknologi spesifik lokasi, pembangunan dan pemeliharaan

daerah irigasi yang masih menjadi kewenangan Pemerintah, pengembangan sumberdaya manusia aparatur pertanian di provinsi yang bersifat strategis nasional, penyediaan bibit/benih, vaksin dan obat-obatan hewan yang bersifat lintas provinsi, pelayanan pengujian mutu alat mesin pertanian, pupuk, pestisida dan pakan ternak, subsidi bunga kredit/program, subsidi sarana produksi (terutama benih dan pupuk) kepada petani miskin berlahan sempit; fasilitasi bencana alam yang berstatus bencana nasional, proteksi impor dan promosi produk yang berorientasi ekspor, serta dalam rangka mendukung pengembangan kawasan pertanian. Secara lengkap kerangka pendanaannya menurut program dan kegiatan sebagaimana lampiran I.

## **Pendanaan APBD**

Peran yang lebih besar dalam pembangunan pertanian seyogyanya menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota melalui APBD Provinsi/Kabupaten/Kota (termasuk di dalamnya Dana Alokasi Khusus) yang diperuntukkan bagi: (1) penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian yang tidak diminati swasta dan tidak mampu dibangun dan dipelihara oleh masyarakat petani; (2) pengembangan kapasitas kelembagaan pelayanan dasar di bidang pertanian yang meliputi pelayanan pengembangan sumberdaya manusia, teknologi, permodalan, pasar dan informasi pasar; dan (3) mengatasi hambatan dalam pemasaran produk pertanian.

Penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian dari hulu sampai hilir meliputi: jaringan irigasi (kurang



dari 1.000 ha untuk APBD Kabupaten/Kota dan 1.000-3.000 ha untuk APBD provinsi), embung- embung, sumur dalam (*artesis*), jaringan jalan produksi dan jalan pemasaran ke industri pengolahan, kebun bibit dasar/blok fondasi, balai inseminasi daerah, pusat perbibitan masyarakat, laboratorium sertifikasi benih/bibit, pos kesehatan hewan, sarana dan peralatan inseminasi buatan di daerah introduksi, peralatan pengolah tanah berkapasitas besar/traktor, kandang-kandang ternak komunal, pos pengawasan lalu lintas ternak (*check point*), padang penggembalaan dan kebun bibit hijauan makanan ternak, lantai jemur dan alat pengering (*drier*), Rumah Potong Hewan (RPH), gudang/silo yang dilengkapi pergudangan berpendingin ruangan, pasar ternak dan pasar komoditas lainnya, pusat promosi produk dan lain-lain.

Pengembangan kapasitas pelayanan dasar mencakup kelembagaan konsultasi; pendanaan; penyediaan sarana produksi (pupuk, media tanam, benih/bibit, pestisida, vaksin, obat hewan, alsin, pengolahan sederhana, kemasan); pelayanan teknologi, pengembangan sumber daya manusia/penyuluhan; proteksi hama dan penyakit/klinik kesehatan tanaman/hewan; sertifikasi produk; pengujian mutu produk; usaha produksi kelompok; koperasi; usaha produksi skala menengah dan besar; pasar dan informasi pasar, dan yang lainnya.

Ruang lingkup pembangunan pertanian secara geografis sangat luas melintasi batas-batas wilayah administratif. Ruang lingkup pemangku kepentingan juga beragam meliputi aparaturnya pemerintah, anggota badan legislatif, lembaga perguruan tinggi, lembaga penggerak swadaya masyarakat, serta pelaku usaha swasta dan masyarakat petani.





# BAB V



# PENUTUP





Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 di bidang pertanian. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Kementerian Pertanian.

Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani menjadi visi bersama bagi seluruh elemen di Kementerian Pertanian khususnya, serta pemangku kepentingan di bidang pertanian secara umum. Visi ini tidak akan bisa dicapai bila sinergitas horizontal dan vertikal tidak terjalin dengan baik di lingkungan Kementerian Pertanian, serta tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.









LAMPIRAN 1



# LAMPIRAN 1



## Lampiran 1

### A. Matrik Kinerja dan Pendanaan Kinerja Pertanian Tahun 2015-2019 (Permentan No. 68 Tahun 2017), setelah Revisi

No.	Program/ Sasaran Program/ kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
	<b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>						32.811	32.393	37.413	39.106	41.284	
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pertanian						1.314	1.745	1.820	1.898	2.017	
	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal											
	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Sekretariat Jenderal (79,6%)			69,26		70,5						
	Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal											
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon I kerja eselon I terhadap layanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (skala likert 1-4)			3,1		3,15						
	Pembinaan Hukum Bidang Pertanian						17,09	18,8	29,13	30,36	31,94	
	Optimalnya penguatan peraturan perundang-undangan Kementerian Pertanian											
	Nilai penguatan peraturan perundang-undangan (Nilai)			75		80						





No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Rasio draft peraturan perundang-undangan yang ditetapkan terhadap total draft peraturan perundang-undangan yang diajukan (%)				83,87	84							
	Rasio perkara hukum terkait Kementan maupun SDM nya yang diselesaikan (inkrah) untuk perkara perdata, tata usaha negara dan uji materi peraturan perundang-undangan terhadap total perkara ditangani dalam 5 tahun terakhir (%)				80	80							
	Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal												
	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Hukum (skala likert 1-4)				3,2	3,3							
	Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian Dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral									31	33,6	35,5	
	Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal									29,96	28,66		
	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Kerjasama Luar Negeri (skala likert 1-4)				3	3							
	Meningkatnya intensitas dan kualitas kerjasama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral												
	Rasio kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti terhadap total kesepakatan kerjasama yang dibuat (%)				30	30							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian						809,66	1.196,13	1.013,24	1.046,67	1.092,73	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian											
	Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian				WTP	WTP						
	Rasio jumlah temuan BPK yang material terkait pengelolaan keuangan Kementerian yang berulangi di satuan kerja Satker yang sama terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya (%)				24	20						
	Rasio jumlah temuan Inspektoral Jenderal yang material terkait pengelolaan keuangan Kementerian yang terjadi berulang di Satuan Kerja (satker) yang sama terhadap total temuan Inspektoral Jenderal pada tahun sebelumnya (%)				24	20						
	Meningkatnya kualitas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian											
	Rasio jumlah temuan BPK yang material terkait pengelolaan BMN Kementerian yang terjadi berulang di Satuan Kerja (satker) yang sama terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya (%)				12	8						
	Rasio jumlah temuan Inspektoral Jenderal yang material terkait pengelolaan BMN Kementerian yang terjadi berulang di Satuan Kerja (Satker) yang sama terhadap total temuan Inspektoral Jenderal pada tahun sebelumnya (%)				13	11						
	Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan sekretariat yang diberikan Sekretariat Jenderal											



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Keuangan dan Perlengkapan (skala Likert 1-4)				3	3							
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian						22,12	23,23	33,11	34,57			
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kementerian												
	Nilai kapasitas organisasi (survei internal) (kriteria haii) (%-- >6%				5,5	5,75							
	Nilai penguatan kelembagaan Kementerian (kriteria pengungkit) -->6% (%)				5,5	5,75							
	Meningkatnya efisiensi pelaksanaan birokrasi Kementerian												
	Nilai penguatan tata laksana Kementerian (Nilai pengungkit)--> 3,5% (BP dan SOP serta pemanfaatan E-Government (%)				85	90							
	Meningkatnya pengelolaan SDM aparatur Kementerian												
	Nilai penguatan sistem manajemen SDM aparatur Kementerian (%)				13	13,5							
	Terwujudnya perubahan mindset dan culture set di lingkungan kerja Kementerian												
	Nilai manajemen perubahan Kementerian (%)				4	4,5							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian												
	Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) (%)				8,25	8,5							
	Nilai peningkatan kualitas pelayanan publik (%)				5,8	5,9							



No.	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal												
	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Organisasi dan Kepegawaian (skala likert 1-4)			3,2		3,3							
	Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian						71,59	56,75	71,3	74,51	77,86		
	Terwujudnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Kementerian, Nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian												
	Standar deviasi perencanaan terhadap realisasi kebijakan, program dan anggaran Pembangunan Pertanian			33		30							
	Nilai AKIP Kementerian untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja (Nilai)			71,56		73,83							
	Nilai penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian (Nilai)			4,89		5,22							
	Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal												
	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Perencanaan (skala likert 1-4)			3,1		3,15							
	Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian						53,59	86	88,27	90,24	92,39		
	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian												



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Indeks kepuasan pengguna layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Indeks)				3.02	3.07							
	Meningkatnya ketersediaan data komoditas dan non komoditas pertanian serta pengelolaan TIK yang andal												
	Rasio pemenuhan data dan informasi terhadap total permintaan (%)				76.75	78.5							
	Service Level Agreement (SLA) layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)				89.6	90.4							
	Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian						27.02	26.31	35.77	34.06	37.55		
	Meningkatnya kualitas layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian												
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan (Indeks)				3.2	3.3							
	Tingkat kepuasan unit kerja terkait di lingkup Kementerian terhadap layanan pusat perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian (Indeks)				3	3.2							
	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perlindungan varietas tanaman serta pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan												
	Rasio sertifikat hak PVT yang diterbitkan terhadap total permohonan PVT (%)				75	80							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Rasio tanda daftar varietas lokal dan hasil pemuliaan yang diterbitkan terhadap total permohonan pendaftaran varietas lokal dan hasil pemuliaan (%)				90	95							
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah di lingkup Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian												
	Rasio temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total temuan BPK (%)				90	90							
	Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementan atas pengelolaan keuangan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total temuan Inspektorat Jenderal Kementan (%)				90	90							
	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian Kerumahtanggaan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa												
	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa Kementan												
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan pengadaan barang dan jasa Kementan				3	3							
	Rasio realisasi rencana pelaksanaan barang dan jasa terhadap total pengadaan baranga dan jasa yang direncanakan				85	90							
	Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Jenderal												





No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Umum dan Pengadaan (skala likert 1-4)				3	3									
	Terwujudnya pengelolaan arsip kementerian Secara profesional														
	Peringkat hasil lomba penyelenggaraan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) (peringkat)				8	5									
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Informasi Publik, Hubungan Antar Lembaga, Serta Keprotokolian di Bidang Pertanian										34.975,00	41.971,00	50.365,00	60.437,00	
	Tersedianya informasi publik kementerian														
	Nilai keterbukaan informasi publik (Nilai)					75									
	Meningkatnya citra positif kementerian														
	Rasio pemberitaan positif terhadap total pemberitaan tentang kementerian (%)					80				85					
	Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon I terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretaris Jenderal														
	Tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik (skala likert 1-5)					4				4					
	Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian											45.585,32	47.864,58	50.257,81	Sesuai Kepmenan No. 232/Kpts/OT.010/14/2016 masuk ke Sejen
	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian														



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimantapkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan (%)				80	80						
	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian											
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (Skala likert 1-4)				3,2	3,2						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian											
	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang (temuan)				1	1						
	Jumlah temuan tjién atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang terjadi berulang (temuan)				0	1						
	Jumlah temuan tjién atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015) (temuan)				1	1						
	Teraksananya Pengkajian Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian Sesuai Yang Direncanakan dalam rangka Penyediaan Rekomendasi Kebijakan											



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Rasio pengkajian kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dilaksanakan terhadap total kajian kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang direncanakan (%)			100	100	100							Sesuai Kepprentan No. 233/Kpts/OT.01014/2016 masuk ke Sejen
	Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian												
	Meningkatnya kualitas layanan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian												
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (indeks skala 1-4)			3,25	3,3	3,3							
	Tingkat kepuasan uni Eselon I terhadap layanan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (skla likert 1-4)			2,7	2,82	2,82							
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah di lingkup Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian												
	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP) (temuan)			3	2	2							
2.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian					115,53	100,39	104,39	108,39	112,39			
	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal												



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal (20,4%)*													
	- Nilai Persepsi Korupsi (PK Survei Eksternal) (7%)			5,25	5,3	5,35								
	- Nilai penguatan pengawasan internal (12%)			10,15	10,25	10,35								
	- Nilai aspek evaluasi internal AKIP (1,4% a 10% dari 14% nilai Akuntabilitas Kinerja)			6,8	6,9	7								
	Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi: Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian			100	100	100								
	Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian (%)			70	80	90								
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK													
	Rasio temuan BPK yang tidak berujung (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian			70	80	90								
	Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di Kementerian Pertanian													
	Peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPP			3	3	3								
	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian													



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Peningkatan Internal Audit- Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP		3	3	3	3						
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektoral Jenderal											
	Nilai AKIP I/ten Pertanian berdasarkan penilaian Inspektoral IV Kementerian Pertanian		83	84	85	85						
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)		95,5	96	96,5	96,5						
	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian						8,03	11,11	11,61	12,11	12,61	
	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan mitra kerja Inspektoral I sesuai kewenangan Inspektoral Jenderal											
	Peningkatan nilai AKIP di mitra kerja Inspektoral I (1,4%)			83,02	84,67	86,67						
	Rasio rekomendasi Inspektoral I yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektoral I atas pelaksanaan program di mitra kerja Inspektoral I			60	70	80						
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK di lingkup mitra kerja Inspektoral I											
	Rasio jumlah temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan di mitra kerja Inspektoral I			70	80	90						



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di lingkup mitra kerja Inspektorat I												
	Peningkatan nilai maturitas SPIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat I a self assessment			3	3	3							
	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian						7,97	10,11	10,61	11,11	11,61		
	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan mitra kerja Inspektorat II sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal												
	Peningkatan nilai AKIP di mitra kerja Inspektorat II (1,4%)			83,02	84,67	86,67							
	Rasio rekomendasi Inspektorat II yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat II atas pelaksanaan program di mitra kerja Inspektorat II			60	70	80							
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK di lingkup mitra kerja Inspektorat II												
	Rasio jumlah temuan BPK yang tidak beruang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan di mitra kerja Inspektorat II			70	80	90							
	Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di lingkup mitra kerja Inspektorat II												
	Peningkatan nilai maturitas SPIP unit eselon I mitra kerja Inspektorat II a self assessment			3	3	3							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pertanian						7,48	11,37	11,87	12,37	12,87	
	Tenujudnya reformasi birokrasi di lingkungan mitra kerja Inspektorat III sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal											
	Peningkatan nilai AKTP di mitra kerja Inspektorat III (1,4%) (Nilai)			83,02	84,67	86,67						
	Rasio rekomendasi Inspektorat III yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat III atas pelaksanaan program di mitra kerja Inspektorat III (%)			60	70	80						
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK di lingkup mitra kerja Inspektorat III											
	Rasio jumlah temuan BPK yang tidak beruang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan di mitra kerja Inspektorat III (%)			70	80	90						
	Meningkatnya maturitas penerapan SPiP di lingkup mitra kerja Inspektorat III											
	Peningkatan nilai maturitas SPiP unit eselon I mitra kerja Inspektorat III -> self assessment (Nilai)			3	3	3						
	Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Perernakan dan Kesehatan Hewan dan Badan Karantina Pertanian						7,4	10,31	10,81	11,31	11,81	



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019	
	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Wilayah Kerja Inspektorat IV sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal												
	Peningkatan nilai AKIP di mitra kerja Inspektorat IV (1,4%)		83,02		84,67	86,67							
	Rasio rekomendasi Inspektorat IV yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat IV atas pelaksanaan program di mitra kerja Inspektorat IV		60		70	80							
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK di lingkup Wilayah Kerja Inspektorat IV												
	Rasio jumlah temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan di mitra kerja Inspektorat IV		70		80	90							
	Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di lingkup Wilayah Kerja Inspektorat IV												
	Peningkatan nilai maturitas SPIP Unit eselon I mitra kerja Inspektorat IV -> self assessment		3		3	3							
	Pelaksanaan Pengawasan dengan tujuan tertentu pada Satker lingkup Kementerian Pertanian					5,67	8,34	8,84	9,34	9,84			
	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Wilayah Kerja Inspektorat Investigasi sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal												
	Peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) (7%)		5,25		5,3	5,35							





No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Peningkatan nilai penguatan pengawasan internal (12%)			85	87,5	90							
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal							81,33	85,83	88,66			
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Ijten												
	Nilai AKIP Ijten Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian (Nilai)			83	84	85							
	Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 (Nilai)			95,5	96	96,5							
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan kinerja yang akuntabel di lingkungan Ijten												
	Rasio temuan BPK yang tidak terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK atas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun sebelumnya (%)			100	100	100							
	Rasio temuan Inspektorat IV atas pengelolaan keuangan dan kinerja di lingkungan Ijten Kementerian Pertanian yang tidak terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya (%)			60	70	80							
	Tersedianya data dan informasi laporan hasil pengawasan secara realtime												
	Minimum availability terhadap data dan informasi per hari (Jam/hari)			8	21	22							
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Ijten												
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Ijten (skala likert)			85/3,4	87/3,48	90/3,6							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
3.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan			2.826,30	7.731,26	7.119,64	7.404,42	7.304,00				
	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman pangan			81,2	82,5	84						
	Produksi Padi (juta ton)			26	30	33						
	Produksi jagung (juta ton)			0,68	2,2	2,8						
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman pangan											
	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian tanaman pangan (%)			-	8	10						
	Penurunan volume impor untuk produk pertanian tanaman pangan (%)			-	5	5						
	Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan yang sesuai dengan kebutuhan											
	Rasio ketersediaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen tanaman pangan berdasarkan kebutuhan (%)			38,3	42,5	50						
	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman pangan											
	Rasio serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan (%)			5	5	5						
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan											



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Nilai AKIP Diagen TP berdasarkan penilaian inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (nilai)			83	84	85						
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (nilai)			72	73	74						
	Meningkatnya kualitas layanan publik Diagen Tanaman Pangan											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Diagen TP (indeks)			3.1	3.2	3.3						
	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi				957.62	1.269,86		1.864,80	1.939,39	1.620,37		
	Meningkatnya produksi kedelai											
	Jumlah Produksi Kedelai (juta Ton)			0.68	2.2	2.8						
	Terpenuhinya kebutuhan komoditas aneka kacang dan umbi tanaman pangan untuk komoditas ekspor dan pengendalian impor											
	Jumlah Produksi Ubi Jalar (juta ton)			2.18	2.39	2.5						
	Jumlah Produksi Kacang Tanah (juta ton)			0.6	0.63	0.67						
	Jumlah Produksi ubi kayu untuk komoditas substitusi impor (juta ton)			20.05	20.09	21.7						
	Jumlah Produksi kacang hijau untuk komoditas substitusi impor (juta ton)			0.27	0.28	0.29						
	Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia				1.344.06	3.580,76		3.859,13	4.013,49	4.174,03		
	Meningkatnya produksi padi dan jagung											
	Produksi Padi (juta ton)			81,2	82,5	84						
	Produksi jagung (juta ton)			26	30	33						
	Pengelolaan Sistem Penyelesaian Benih Tanaman Pangan											



No.	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan tanaman pangan untuk produksi pangan strategis tanaman pangan												
	Rasio benih padi yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan (%)			60	61	62							
	Rasio benih jagung yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan (%)			80	80,3	80,5							
	Rasio benih kedelai yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan (%)			35	35,5	36							
	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan tanaman pangan untuk komoditas ekspor dan pengendalian impor												
	Rasio benih ubi jalar yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan (%)			5	5,5	6							
	Rasio benih kacang tanah yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan (%)			10	10,5	11							
	Rasio benih ubi kayu yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan (%)			5	5,5	6							
	Rasio benih kacang hijau yang tersedia sebelum masa tanam selesai terhadap total benih yang dibutuhkan (%)			10	10,5	11							
	Pengkatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI				103,98	180,57	205,37	213,58	222,13				



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya penanggulangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman pangan												
	Rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas tanam tanaman pangan (%)		3	3	3	3							
	Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi dibanding luas tanam tanaman pangan (%)		2	2	2	2							
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan				71,5	2.126,00	702,02	730,1	759,31				
	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan untuk komoditas ekspor dan pengendalian impor												
	Rasio komoditas ekspor tanaman pangan yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor per negara tujuan (kualitas tidak memenuhi persyaratan) (komoditas/ negara tujuan)			-	5	4							
	Rasio penurunan impor produk pangan segar tanaman pangan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya (%)			-	90	100							
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pertanian pasca panen tanaman pangan												
	Rasio pengujian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen Tanaman Pangan yang dapat dipenuhi terhadap seluruh permintaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen (%)		38,3		42,2	50							
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan				233,3	242,77	250,56	260,58	271				



No.	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Tenajudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan												
	Nilai AKIP Ditjen TP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)			83	84	85							
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (%)			72	73	74							
	Tenajudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Ditjen Direktorat Jenderal Tanaman Pangan												
	Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya (%)			30	25	20							
	Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan Ditjen TP yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya (%)												
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan												
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (skala likert)			3,1	3,2	3,3							
	Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih				7,52	10,65					16,6	17,27	17,96
	Meningkatnya kualitas layanan publik Pengembangan dan Pengujian Mutu Benih												



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPPMBTIPH (skala likert)			3,24	3,26	3,28						
	Meningkatnya pemanfaatan metode pengujian mutu benih Tanaman Pangan dan Hortikultura											
	Rasio metode pegujian mutu benih yang dimanfaatkan "pengguna dibanding total metode pengujian mutu benih yang dihasilkan" (*laboratorium penguji benih yang ada di BPSB) (%)			100	100	100						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBPPMBTIPH											
	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPPMBTIPH yang terjadi berulang (Jumlah)			0	0	0						
	Jumlah temuan tijen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB T2 tahun 2015) (Jumlah)			0	0	0						
	Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan				13,18	20,36					27,13	
	Meningkatnya kualitas layanan publik BBPOPT											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPOPT (skala likert)			3,5	3,5	3,5						
	Meningkatnya implementasi rekomendasi peramalan serangan OPT yang diberikan oleh BBPOPT											
	Rasio luas serangan OPT tanaman padi yang terjadi terhadap luas serangan OPT yg diramalkan (%)			68	67	66						



No.	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Rasio luas serangan OPT tanaman jagung yang terjadi terhadap luas serangan OPT yg diramalkan (%)			68	67	66						
	Rasio luas serangan OPT tanaman kedelai yang terjadi terhadap luas serangan OPT yg diramalkan (%)			21	20	19,5						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBPOPT											
	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPOPT yang terjadi berulang (Jumlah)			0	0	0						
	Jumlah temuan Ijin atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015) (Jumlah)			0	0	0						
4.	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura							1.129,09	1.312,00	1.446,00	1.591,00	
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tanaman hortikultura											
	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian hortikultura			3,00%	2,83%	3,29%						
	Penurunan volume impor untuk produk pertanian hortikultura			8,77	7,38	10,65						
	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis tanaman hortikultura											
	Produksi cabai (Ton)			2.196.657	2.245.440	2.295.481						
	Produksi bawang merah (Ton)			1.579.772	1.608.766	1.639.724						
	Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen tanaman hortikultura yang sesuai dengan kebutuhan											





No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen hortikultura)			90	90	90							
	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman hortikultura												
	Rasio luas serangan OPT dan DPI terhadap luas tanam tanaman hortikultura (%)		5	5	5	5							
	Tenajudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura												
	Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi terhadap luas tanam hortikultura (%)				0,5	0,5							
	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura							115,69	128	141	155		
	Terpenuhinya kebutuhan tanaman buah dan florikultura untuk komoditas ekspor dan pengendalian impor												
	Produksi mangga untuk komoditas ekspor (Ton)		1.905.267	1.991.004	1.991.004	2.060.689							
	Produksi nenas untuk komoditas ekspor (Ton)		1.431.044	1.481.131	1.481.131	1.537.414							
	Produksi manggis untuk komoditas ekspor (Ton)		168.562	175.136	175.136	182.317							
	Produksi salak untuk komoditas ekspor (Ton)		739.202	778.779	778.779	824.304							
	Produksi pisang untuk komoditas ekspor (Ton)		7.039.043	7.105.914	7.105.914	7.176.263							
	Produksi krisan untuk komoditas ekspor (Tangkai)		436.564.946	441.367.161	441.367.161	452.401.340							
	Produksi jeruk untuk komoditas substitusi impor (Ton)		2.223.693	2.301.651	2.301.651	2.392.649							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat						614,87	740	814	895	985	
	Terpenuhinya kebutuhan tanaman hortikultura strategis nasional											
	Produksi cabai		2,196,657		2,245,440	2,295,481						
	Produksi bawang merah		1,579,772		1,608,766	1,639,724						
	Terpenuhinya kebutuhan tanaman sayuran dan tanaman obat untuk komoditas ekspor dan pengendali impor											
	Produksi kentang untuk komoditas ekspor		1.437.332		1.471.828	1.508.623						
	Produksi jahe untuk komoditas ekspor		342.043		343.753	345.472						
	Produksi jamur untuk komoditas ekspor		39.292		40.176	41.160						
	Produksi bawang putih untuk komoditas substitusi impor		34.427		109.494	125.951						
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura							61	67	74	81	
	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura untuk komoditas ekspor dan pengendali impor											
	Volume ekspor hortikultura		206,402		212,246	219,226						
	Rasio ketersediaan informasi pasar komoditas hortikultura terhadap informasi yang dibutuhkan		60		70	75						
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pertanian pasca panen dan pengolahan hortikultura											



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019	
	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pasca panen tanaman hortikultura berdasarkan kebutuhan (%)			90	90	90							
	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura							90,71	63	70	77	84	
	Terperuhnya kebutuhan perbenihan cabai dan bawang merah												
	Jumlah benih cabai yang tersedia (Kg)		82.798		81.256	82.543							
	Jumlah benih bawang merah yang tersedia (Kg)		189.228.600		189.640.440	190.268.760							
	Terperuhnya kebutuhan perbenihan hortikultura untuk komoditas ekspor dan pengendali impor												
	Jumlah benih mangga yang tersedia (Batang)		2.223.705		2.323.269	2.415.793							
	Jumlah benih nenas yang tersedia (Benih)		44.959.063		45.852.813	47.220.938							
	Jumlah benih manggis yang tersedia (Batang)		292.848		301.469	311.671							
	Jumlah benih saak yang tersedia (Anakan)		6.332.700		6.631.900	6.948.700							
	Jumlah benih kentang yang tersedia (Kg)		109.083.150		115.193.100	118.072.350							
	Jumlah benih pisang yang tersedia (Stek)		11.249.150		11.266.475	11.316.938							
	Jumlah benih jahe yang tersedia (Bag log)		20.768.550		20.826.300	20.885.700							
	Jumlah benih krisan yang tersedia (Batang)		438.198.000		442.003.600	442.575.480							
	Jumlah benih jamur yang tersedia (Kg)		246.400		251.900	257.400							
	Jumlah benih jeruk yang tersedia (%)		2.425.060		2.509.155	2.584.285							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah benih bawang putih yang tersedia		3.628,240	11.539,440	13,273,920							
	Rasio peningkatan jumlah kelembagaan benih hortikultura (%)		1	1	1							
	Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura					93,05	17	68	77	86		
	Terkendalinya serangan OPT dan DPI pada komoditas Hortikultura											
	Rasio luas serangan OPT terhadap luas tanam hortikultura (%)		5	5	5							
	Rasio luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi terhadap luas tanam hortikultura (%)		-	0,5	0,5							
	Jumlah desa pertanian organik yang dibina		0	250	250							
	Peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura					165,81	150	165	182	200		
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura											
	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektoral Jenderal Kementerian Pertanian		82,5	82,5	83							
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)		73,5	73,75	74							
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura											
	Nilai AKIP Ditjen Hortikultura berdasarkan penilaian Inspektoral Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)		82,5	82,5	83							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) (%)			73,5	73,75	74						
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura											
	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan (%)			80	80	80						
	Rasio tindak lanjut kejadian atas temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di lingkup Ditjen Hortikultura terhadap total kejadian atas temuan (%)			80	80	80						
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura											
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura (skala likert 1-5)			3,5	3,75	4						
	Tingkat kepuasan stakeholder eksternal terhadap layanan rekomendasi dan perijinan			3,5	3,75	4						
	Tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan data dan informasi Hortikultura			3,5	3,75	4						
5.	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan					4.754.20		1.759.31	1.420.24	1.477.05	1.536.13	
	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis perkebunan											
	Produksi Gula Tebu (Ton GKP)			2.400.000	2.800.000	3.000.000						
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian perkebunan											
	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk perkebunan (%)			6,06	4,57	3,82						



No.	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk industri dalam negeri (%)			30	35	40						
	Tersedianya infrastruktur pertanian perkebunan pascapanen											
	Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (Pascapanen Perkebunan) (%)			100	100	100						
	Terkendalinya penyebaran OPT dan tertanggulangnya DPI pada tanaman perkebunan											
	Rasio luas serangan OPT terkendali dan area terkena DPI tertanggulangi terhadap luas lahan terserang OPT dan berpotensi terkena DPI (%)			1,05	1,6	1,6						
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan											
	Nilai AKIP Ditjen. Perkebunan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian (Nilai)			82	83	84						
	Nilai kinerja (NK) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 249 tahun 2011 tentang pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Nilai)			85	90	92						
	Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Ditjen. Perkebunan (Nilai IKM skala Likert 1-4)			3	3	3						



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Nilai pemeringkatan informasi publik Ditjen. Perkebunan (skor nilai)			65	70	75								
	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah									2.277,30	362,59	201,39	209,44	217,82
	Terpenuhinya kebutuhan pangan strategis Perkebunan													
	Produksi tebu (Ton)			34.042.500	34.875.000	40.000.000								
	Produksi Gula Tebu (Ton GKP)			2.400.000	2.800.000	3.000.000								
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas tanaman semusim dan rempah													
	Produksi lada (Ton lada kering)			95.150	96.290	97.350								
	Produksi pala (Ton biji kering)			30.400	31.000	32.000								
	Produksi cengkeh (Ton bunga kering)			116.830	118.990	119.500								
	Produksi nilam (Ton minyak nilam)			4.750	4.800	4.850								
	Produksi tembakau (Ton daun kering)			184.004	202.404	222.644								
	Produksi kapas (Ton serat berbiji)			5.525	6.030	7.000								
	Produksi gambir (Ton getah kering)			21.512	23.663	26.029								
	Produksi vanili (Ton polong kering)			2.594	2.853	3.138								
	Produksi serat wangi (Ton minyak serai wangi)			6.500	8.400	10.500								
	Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di lingkup Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah (%)			100	100	100								



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian atas ketidaksihuan NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria) ketatausahaan di lingkup Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan (%)		100	100	100	100						
	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar						1.886,00	805,25	473,72	492,66	512,37	
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas tanaman tahunan dan penyegar											
	Produksi jambu mete (Ton gelondong kering)		126.630	129.640	132.660							
	Produksi kopi (Ton kopi berasan)		637.539	643.430	661.753							
	Produksi kelapa sawit (Ton CPO)		36.656.580	34.514.850	36.419.870							
	Produksi karet (Ton karet kering)		3.559.000	3.683.000	3.810.000							
	Produksi kakao (Ton biji kering)		688.345	701.867	726.406							
	Produksi kelapa (Ton)		3.400	3.446	3.491							
	Produksi teh (Ton daun kering)		146.168	146.314	146.460							
	Produksi sagu (Ton tepung sagu)		489.643	489.643	489.643							
	Produksi aren (Ton gula merah)		52.182	52.182	52.182							
	Produksi kemiri sunan (Ton gula merah)		7	7	7							
	Rasio permintaan dan keluhan (terulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di lingkup Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar (%)		100	100	100							





No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian atas ketidaksihuan NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria) ketatausahaan di lingkup Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan (%)			100	100	100							
	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan						42,5	116,36	78,02	81,14	84,39		
	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan untuk komoditas ekspor												
	Volume ekspor komoditas unggulan perkebunan (juta ton)			35	36,6	38							
	Rasio pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunan untuk industri dalam negeri (%)			30	35	40							
	Tersedianya infrastruktur pertanian perkebunan pascapanen												
	Rasio pengujian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan yang dapat dipenuhi terhadap seluruh permintaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (%)			100	100	100							
	Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (%)			100	100	100							
	Rasio laporan yang selesai tepat waktu terhadap total laporan yang wajib disajikan di lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (%)			100	100	100							



No.	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Dukungan Perlindungan Perkebunan						179,6	136,35	132,69	137,99	143,51	
	Terkendalinya OPT dan tertanganinya gangguan usaha dan DPI terhadap luas tanaman perkebunan											
	Rasio luas serangan OPT yang dapat dikendalikan dibanding luas lahan terserang OPT yang dilaporkan (%)		0,1		1,2	1,2						
	Rasio Luas area terkena DPI yang dapat ditanggulangi (mitigasi dan adaptasi) dibanding luas lahan yang berpotensi terkena DPI (%)		2		2	2						
	Jumlah kasus gangguan usaha yang ditangani (kasus)			9	21	21						
	Rasio jumlah desa binaan yang siap disertifikasi organik terhadap total desa binaan (%)			20	83	100						
	Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di lingkup Direktorat Perindungan Perkebunan (%)			100	100	100						
	Rasio laporan yang selesai tepat waktu terhadap total laporan yang wajib disajikan di lingkup Direktorat Perindungan Perkebunan (%)			100	100	100						
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya						194,6	168,67	365,68	380,31	395,52	
	Tenwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan											
	Nilai AKIP Ditjen. Perkebunan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian (skor nilai)			82	83	84						



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Nilai kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (%)			85	90	92						
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan											
	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK (%)			95	95	95						
	Rasio rekomendasi Inspektoral Jenderal, Kementerian Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Inspektoral Jenderal, Kementerian Pertanian (%)			95	95	95						
	Meningkatnya kualitas informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan											
	Nilai pemeringkatan informasi publik Direktorat Jenderal Perkebunan (skor nilai)			65	70	75						
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan											
	Tingkat kepuasan unit kerja lain di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan (Skala likert 1-5)			3,5	3,6	3,7						
	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan							11,1	82,21	75,21	78,22	81,35
	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan pangan strategis perkebunan											
	Jumlah benih tebu yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman tebu (mata)			-	1.172.520.000	5.761.800.000						



No.	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019	
	Terpenuhinya kebutuhan perbenihan perkebunan untuk komoditas ekspor												
	Jumlah benih lada yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman lada (batang)			-	1.920.250	607.500							
	Jumlah benih pala yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman pala (batang)			-	1.548.000	700.000							
	Jumlah benih cengkeh yang tersedia untuk keperluan ekspor benih cengkeh (batang)			-	2.016.000	560.000							
	Jumlah benih jambu mete yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman jambu mete (batang)			-	881.760	1.216.320							
	Jumlah benih kopi yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman kopi (batang)			-	11.801.645	18.014.033							
	Jumlah benih kelapa sawit yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman kelapa sawit (batang)				270.500	270.500							
	Jumlah benih karet yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman karet (batang)				2.365.500	2.674.244							
	Jumlah benih kakao yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman kakao (batang)				7.909.145	14.140.364							
	Jumlah benih kelapa yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman kelapa (batang)				2.006.400	2.259.764							
	Jumlah benih teh yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman teh (batang)			-	5.147.800	8.959.929							
	Jumlah benih nilam yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman nilam (batang)			-	-	-							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Jumlah benih kapas yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman kapas (batang)			-	-	-								
	Jumlah benih tembakau yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman tembakau (batang)			-	-	-								
	Jumlah benih gambir yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman gambir (batang)			-	-	-								
	Jumlah benih vanili yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman vanili (batang)			-	-	-								
	Jumlah benih serai wangi yang tersedia sesuai kebutuhan produksi tanaman serai wangi (batang)			-	-	-								
	Jumlah kelembagaan produksi dan pengawasan benih (kelembagaan)			692	698	703								
	Jumlah varietas unggul komoditas perkebunan yang dilepas (Varietas)			17	13	5								
	Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di lingkup Direktorat Perbenihan Perkebunan (%)			100	100	100								
	Rasio laporan yang selesai tepat waktu terhadap total laporan yang wajib disajikan di lingkup Direktorat Perbenihan Perkebunan (%)			100	100	100								
	Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyediaan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan									70,40	87,88	93,54	97,28	101,17
	Meningkatnya pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan													



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah teknik dan metode pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan (metode)		7	7	10	11						
	Jumlah perakitan teknologi proteksi spesifik lokasi yang dihasilkan (paket teknologi)		38	33	34	39						
	Jumlah metode di bidang proteksi tanaman perkebunan yang dikembangkan dan dihasilkan (metode)		16	14	18	19						
	Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan (rekomendasi)		129	154	202	234						
	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan											
	Tenajudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan (nilai IKM)		3	3	3	3						
	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan yang terjadi berulang (Temuan)		0	1	2	2						



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016		2017	2018	2019		
	Jumlah temuan Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja di lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan (1 temuan)		0	1	2	2								
	Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan (%)		0	80	85	90								
6.	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis. Pernerakan Rakyat Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional										4.318,93	4.798,65	5.199,93	
	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak (%)			5,7	20,5	25								
	Penurunan volume impor untuk produk pangan hewani asal ternak (%)			2	2,7	4,2								
	Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional													
	Produksi daging sapi dan kerbau (juta ton)			639,61	695	755								
	Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan													



No.	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018
	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) (%)		25	27	30						
	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis										
	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (%)		77	79	80						
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan										
	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan penilaian Inspektoral Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)		80	81	82						
	Nilai Kinerja (NK) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (Nilai)		75	80	85						
	Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan										
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Skala likert 1-4)		3,1	3,2	3,3						
	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia										
	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi/penularan kepada manusia (Jumlah)		138	132	127						





No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Terjadinya keamanan pangan strategis nasional													
	Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia (Jumlah)		25	20	18									
	Peningkatan Produksi Pakan Ternak						800,43	874	980					
	Tersedianya pakan hewan untuk produksi dalam mendukung ekspor maupun substitusi impor produk pangan hewani asal ternak													
	Jumlah pakan untuk ayam (Ton)		1.095.562	1.124.740	1.162.716									
	Jumlah pakan untuk kambing dan domba (Ton)		-	635	1.588									
	Jumlah pakan untuk babi (Ton)		112.508	114.758	117.053									
	Jumlah pakan untuk itik (Ton)		18.537	19.863	21.284									
	Tersedianya pakan hewan untuk mendukung produksi pangan strategis nasional													
	Jumlah pakan untuk produksi sapi dan kerbau (Ton)		16.187.578	17.859.560	19.758.756									
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan													
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional						1.641,10	1.828,00	1.975,80					
	Rasio jumlah kambing yang berstatus sehat terhadap jumlah kambing yang akan diekspor (%)		100	100	100									
	Rasio jumlah domba yang berstatus sehat terhadap jumlah domba yang akan diekspor (%)		100	100	100									



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Rasio jumlah ayam yang berstatus sehat terhadap jumlah ayam yang akan diekspor (%)			100	100	100							
	Rasio jumlah babi yang berstatus sehat terhadap jumlah babi yang akan diekspor (%)			100	100	100							
	Jumlah volume ekspor obat hewan (Liter)			1000	2000	3500							
	Jumlah volume ekspor obat hewan (kg)			1 juta	2 juta	3,5 juta							
	Jumlah volume ekspor obat hewan (Dosis)			300 juta	450 juta	650 juta							
	Rasio ekspor komoditas ternak yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor ternak per negara tujuan (kesehatan tidak memenuhi persyaratan) (%)			0	0	0							
	Rasio hewan itik hidup yang berstatus sehat terhadap total hewan itik untuk produksi (%)			98,5	98,6	99							
	Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional												
	Rasio hewan sapi hidup yang berstatus sehat terhadap total hewan sapi untuk produksi (%)			95	96	97							
	Rasio hewan kerbau hidup yang berstatus sehat terhadap total hewan kerbau untuk produksi (%)			95	96	97							
	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis												



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis (propinsi/kabupaten/kota/ pulau/gugusan pulau/zona/kompertemen (%)			77	79	80						
	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak									1.062,19	1.198,43	1.252,20
	Meningkatnya volume ekspor untuk komoditas pangan hewani asal ternak											
	Jumlah kambing (Ekor)			210	250	300						
	Jumlah Domba (Ekor)				200	300						
	Produksi daging ayam (Ton)			65.063.111	67.320.776	70.099.448						
	Jumlah Babi (Ekor)			312521	318.772	325.147						
	Produksi telur tetas (hatching egg) (Butir)			9.119.752	10.407.808	11.963.157						
	Rasio ekspor komoditas ternak yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor ternak per negara tujuan (kualitas tidak memenuhi persyaratan) (%)			30	25	20						
	Menurunnya volume impor untuk komoditas pangan hewani asal ternak											
	Produksi susu (Ton)			920.771	957.977	996.686						
	Jumlah itik (Ekor)			588.472	630.556	675.694						
	Terpenuhinya kebutuhan daging sapi dan kerbau nasional											
	Produksi daging sapi dan kerbau (juta ton)			639,61	695	755						
	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)									346	397	455,2



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya kualitas produk ekspor pangan dan non pangan asal ternak serta kesejahteraan ternak												
	Rasio daging ayam yang berstatus sehat terhadap total ayam yang dipotong (%)		100		100	100							
	Rasio ekspor produk pangan dan non pangan asal ternak yang ditolak negara tujuan terhadap total ekspor produk pangan dan non pangan asal ternak per negara tujuan (kualitas tidak memenuhi persyaratan) (%)		0		0	0							
	Rasio ekspor komoditas ternak yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor ternak per negara tujuan (kesejahteraan tidak memenuhi persyaratan di unit usaha) (%)		0		0	0							
	Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional												
	Rasio daging sapi yang berstatus sehat terhadap total hewan sapi yang di potong (%)		95		96	97							
	Rasio daging kerbau yang berstatus sehat terhadap total hewan kerbau yang di potong (%)		95		96	97							
	Tersedianya infrastruktur Peternakan yang sesuai kebutuhan												
	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) (%)		25		27	30							
	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia												
	Jumlah kasus penularan zoonosis dari hewan ke manusia (Jumlah)		138		132	127							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Terjaminnya keamanan pangan strategis nasional												
	Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia (Jumlah)		25	20	18								
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan							368,63	385,45	403,71			
	Tenwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan			80	81	82							
	Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Inspektora Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)			75	80	85							
	Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (Nilai)												
	Tenwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan												
	Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya (%)			70	60	40							
	Rasio temuan Inspektora Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan Ditjen PKH yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya (%)			65	50	40							
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan												



No.	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III dan IV terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Skala likert 1-4)			3	3,2	3,3							
	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak							100,58	115,66		133,03		
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional												
	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang siap melakukan ekspor komoditas peternakan (%)			1,6	6,5	7,7							
	Jumlah usaha dibidang peternakan untuk mendukung substitusi impor (Unit)			266	272	278							
	Meningkatnya efektivitas pengolahan pangan dan non pangan hewani asal ternak												
	Rasio produk pangan dan non pangan hewani olahan asal ternak yang diekspor terhadap total ekspor produk hewani asal ternak (%)			68,83	69,28	69,63							
7.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian							12.331,72	11.125,09	11.048,81	10.761,85		
	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan												
	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan (%)			33	33	33							
	Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian (%)			1,24	1,55	2,12							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan (%)			63	62	62										
	Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan (%)			98,51	97,67	96,83										
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional															
	Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional (%)			65	67	68										
	Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan															
	Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan (Pelaku usaha)			-	80	82										
	Tenajudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian															
	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)			82	83	84										
	Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (Nilai)			75	80	82										
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian										4.698,00	1.461,25	870	670	500	8.199,25
	Meningkatnya pemenuhan jaringan irigasi tersier															



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan (%)			33	33	33							
	Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian			1,24	1,55	2,12							
	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian						2.065,80	3.837,00	4.712,00	5.148,00	5.159,00		
	Meningkatnya luas baku lahan pertanian												
	Jumlah luas baku lahan pertanian (Ha)			63.704.626	63.664.626	63.614.626							
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian						3.304,00	3.859,00	3.960,00	3.589,50	3.322,50		18.035,00
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pertanian pra panen												
	Rasio alat mesin pertanian (alsintan) pra panen yang dimanfaatkan terhadap total alat mesin pertanian pra panen (%)			63	62	62							
	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian						1.076,10	224,93	224,93	224,93	224,93		
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian												
	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)			82	83	84							
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (%)			75	80	82							





No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Tenjujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian												
	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian		85	85	85	85							
	Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total Rekomendasi Inspektorat Jenderal		85	85	85	85							
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian												
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Skala likert 1-5)		4	4	4	4							
	Fasilitas Pupuk dan Pestisida						458,33	57,5	57,5	57,5	57,5		
	Tersedianya pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional												
	Rasio ketersediaan pupuk subsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional (%)		65	67	68	68							
	Rasio pupuk dan pestisida ilegal terhadap total pupuk dan pestisida beredar		1,70%	1,50%	1,30%	1,30%							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian						504,32	214,2	329,5	325	400	
	Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan											
	Jumlah pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan (pelaku usaha)			3.720		4.200						
8.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian								1.248,60		3.158,98	
	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan											
	Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional			-	10	15						
	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional.											
	Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional			25	27,5	30						
	Rasio kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional			2,27	2,3	2,4						
	Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP			3,3	3,32	3,34						
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan Pertanian											
	Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan			25	22	20						



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian												
	Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektoral Jenderal Kementerian Pertanian	81		81	82	83							
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	86,05		86,05	86,25	86,5							
	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian												
	Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu												
	Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu pada tahun berjalan	-		-	34.770	34.770							
	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kelas kemampuannya	-		-	120.000	120.000							
	Jumlah kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	10		10	50	75							
	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian									195,69		877,69	
	Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu												
	Competency Gap Index (CGI) Peserta Pelatihan	25		25	22	20							
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian												
	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3,7		3,7	3,75	3,85							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyeluluh dan Pengembangan SDM Pertanian													
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BPPSDMP													
	Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektori Jendral Kementerian Pertanian (Nilai)		81		82	83								
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (Nilai)		86,05		86	86,5								
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan BPPSDMP													
	Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya (%)		57,14		12,5	10								
	Rasio temuan Inspektori Jendral Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan BPPSDMP yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya (%)		30		20	10								
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan BPPSDMP													
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Badan BPPSDMP (skala likert 1-4)		3,73		3,76	3,81								
9.	Program Pendidikan Pertanian										404,3	429,66	449,72	
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian													
	Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan (%)				90	90								



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Pendidikan Pertanian												
	Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu												
	Jumlah lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian (orang)				794	1.073							
	Rasio lembaga pendidikan pertanian yang memiliki akreditasi minimal B terhadap total lembaga pendidikan pertanian (%)				80	80							
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pertanian												
	Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan pertanian (skala likert)				3	3,08							
10.	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan						1.990,05	1.891,52	2.435,39	2.757,48	2.702,36		
	Dimanafaatkannya inovasi teknologi pertanian												
	Rasio hasil penelitian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) terhadap hasil penelitian yang dihasilkan (5 tahun terakhir)			40%	60%	70%							
	Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balitbang Pertanian			3	3	3							
	Nilai pemeringkatan informasi publik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian			90	90	90							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Balitbangtan												
	Nilai AKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (nilai)		82,5		82,75	83							
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)		92,75	93		93,5							
	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian						40,43	53,01	57,08	59,93	62,93		
	Dimanafaatkannya inovasi teknologi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian												
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)		5	7		7							
	Rasio hasil penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan		100	100		100							
	Jumlah rekomendasi kebijakan bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian yang dihasilkan		2	2		2							
	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian												



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian		3	3	3	3						
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian											
	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian			5	5	5						
	Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian						32,57	38,99	55,31	58,07	60,97	
	Dimanfaatkannya inovasi teknologi Pascapanen Pertanian											
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan pascapanen yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)		32	41	49	49						
	Rasio hasil penelitian dan pengembangan pascapanen pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan pascapanen yang dilakukan pada tahun berjalan (%)		100	100	100	100						
	Jumlah rekomendasi kebijakan pasca panen yang dihasilkan		4	3	3	3						



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen pertanian		4	4	4	4						
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian											
	Jumlah temuan tjién atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian		4	4	4	4						
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian						147,35	167,07	133,74	140,43	147,45	
	Dimanaaatkannya inovasi teknologi sumberdaya lahan pertanian											
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)		316	298	70							
	Rasio hasil penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian pada tahun berjalan terhadap kegiatan sumberdaya lahan pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan		100	100	100							
	Jumlah rekomendasi kebijakan sumberdaya lahan pertanian yang dihasilkan		5	5	5							





No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Balai Besar Penelitian dan Pengembangan sumberdaya lahan pertanian												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian beserta UPT di lingkup Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian		3	3	3	3							
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian												
	Jumlah temuan tjejen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian		3	3	3	3							
	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian						746,78	756,24	1208,02	1468,75	1349,18		
	Dimanfaatkannya hasil kajian dan pengembangan teknologi pertanian												
	Jumlah paket teknologi yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)		446		431	372							
	Rasio hasil paket teknologi pertanian terhadap paket teknologi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan		100		100	100							
	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan		34		34	34							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BB Pengkajian)			3	3	3							
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian												
	Jumlah temuan tjién atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian			5	5	5							
	Penelitian/perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian							34,03	43,45	46,88	49,23	51,69	
	Dimanfaatkannya inovasi teknologi mekanisasi pertanian												
	Jumlah hasil perekayasaan/ pengembangan mekanisasi pertanian yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)			15	20	24							
	Rasio hasil perekayasaan/ pengembangan mekanisasi pertanian pada tahun berjalan terhadap kegiatan perekayasaan/ pengembangan mekanisasi pertanian yang dilakukan pada tahun berjalan			100	100	100							
	Jumlah rekomendasi kebijakan mekanisasi pertanian yang dihasilkan			2	2	2							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian		3	3	3	3							
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian												
	Jumlah temuan tijen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian		5	5	5	5							
	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura						103,73	103,78	119,89	125,88	132,18		
	Dimanfaatkannya inovasi teknologi hortikultura												
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hortikultura yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)		161	197	230	230							
	Rasio hasil penelitian dan pengembangan hortikultura pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan hortikultura yang dilakukan pada tahun berjalan		100	100	100	100							
	Jumlah rekomendasi kebijakan hortikultura yang dihasilkan		2	2	2	2							



No.	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Penelitian dan Pengembangan hortikultura													
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Penelitian dan Pengembangan hortikultura beserta UPT di lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura			3	3	3								
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura													
	Jumlah temuan tjeen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura			0	0	0								
	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan									119,10	131,86	148,77	156,21	164,02
	Dimanfaatkannya inovasi teknologi perkebunan													
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan perkebunan yang siap dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)			50	55	55								
	Rasio hasil penelitian dan pengembangan perkebunan pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan yang dilakukan pada tahun berjalan			100	100	100								
	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan			6	6	6								



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan beserta UPT di lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan		3,4	3,4	3,4	3,4							
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan												
	Jumlah temuan Ijen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan			5	4	3							
	Penelitian dan Pengembangan Peternakan							115,34	113,92	127,28	133,65	140,33	
	Dimanfaatkannya inovasi teknologi peternakan												
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan peternakan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)			42	44	47							
	Rasio hasil penelitian dan pengembangan peternakan pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan peternakan yang dilakukan pada tahun berjalan			100	100	100							
	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan			9	7	7							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Penelitian dan Pengembangan peternakan beserta UPT di lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan peternakan		3	3	3	3							
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan												
	Jumlah temuan tjeen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan		3,2	3,2	3,2	3,2							
	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan						165,84	158,30	224,71	235,94	247,74		
	Dimanfaatkannya inovasi teknologi tanaman pangan												
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)		15	16	18	18							
	Rasio hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang dilakukan pada tahun berjalan		100	100	100	100							
	Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan		6	5	5	5							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan beserta UPT di lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan		3	4	4	4							
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan												
	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan		2	0	0	0							
	Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian							419,08	254,61	313,71	329,40	345,87	
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian												
	Nilai AKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (nilai)		82,5	82,75	83	83							
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (%)		92,75	93	93,5	93,5							
	Meningkatnya kualitas informasi publik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian												



No.	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Nilai pemeringkatan informasi publik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (nilai)			90	90	90								
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian													
	Rasio temuan BPK yang terjadi berulang terhadap total temuan BPK			75	67	67								
	Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang terjadi berulang terhadap total temuan (%)			75	67	67								
	Meningkatnya kompetensi ASN di lingkup Balitbang Pertanian													
	Job-person fit			135	151	171								
	Competency-gap index			60	80	85								
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian													
	Tingkat kepuasan unit kerja lain di lingkup Balitbang Pertanian terhadap layanan Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian			4	4	4								
	Rasio pemenuhan layanan ijin pemasangan dan pengeluaran SDG tanaman untuk penelitian terhadap total permintaan ijin pemasangan dan pengeluaran SDG tanaman untuk penelitian			100	100	100								
11.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat									635,26	728,93	740,32	820,28	914,86





No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Terwujudnya pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan												
	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional												
	Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia (Jumlah)		12		11	10							
	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis												
	Koefisien variasi harga komoditas pertanian strategis nasional (%)			Okt-30	Okt-30	Okt-30							
	Meningkatnya konsumsi pangan nasional												
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		86,47		88,09	92,5							
	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan							107,27	206,96	271,54	319,37	492,58	
	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen												
	Koefisien variasi harga komoditas gabah di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen (%)		10		10	10							
	Koefisien variasi harga komoditas jagung di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen (%)		10		10	10							
	Koefisien variasi harga komoditas kedelai di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen (%)		10		10	10							
	Koefisien variasi harga komoditas bawang merah di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen (%)		25		25	25							



No.	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
	Koefisien variasi harga komoditas cabai di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen (%)			30	30	30						
	Koefisien variasi harga komoditas daging sapi di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen (%)			10	10	10						
	Koefisien variasi harga komoditas gula pasir di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen (%)			10	10	10						
	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan						274,69	253,03	161,87	193,82	82,78	
	Stabilnya harga komoditas pertanian strategis di tingkat konsumen dan produsen											
	Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis nasional (%)			100	100	100						
	Pengembangan Pengane karagaman Konsumsi dan Keamanan Pangan						132,89	164,86	195,43	185,08	205,29	
	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional											
	Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia (Pangan Segar Asal Tumbuhan-PSAT) (Jumlah)			12	11	10						
	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan nasional											
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)			85,64	86,41	92,5						
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan						120,41	104,08	111,48	122,02	134,22	
	Tenwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Ketahanan Pangan											



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Nilai AKPD Badan Ketahanan Pangan berdasarkan penilaian Inspektoriat Jenderal Kementerian (Nilai)			89,5	90	90						
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (Nilai)			92	92	92						
	Tenajudnya pengeluaran keuangan yang akuntabel di lingkungan Badan Ketahanan Pangan											
	Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya (%)			90	90	100						
	Rasio temuan Inspektoriat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengeluaran keuangan di lingkungan Ditjen PKH yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya (%)			90	90	100						
	Tersedianya peraturan perundang-undangan ketahanan pangan sesuai kebutuhan											
	Rasio peraturan ketahanan pangan yang dihasilkan dibanding total peraturan ketahanan pangan yang dibutuhkan pada tahun berjalan (%)			100	100	100						
	Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Ketahanan Pangan (skala likert 1-4)											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Ketahanan Pangan (skala likert 1-4)			3	3	3						
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan											



No.	Program/Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III dan IV terhadap layanan Sekretariat Badan Ketahanan Pangan (Skala likert 1-4)		3	3,05	3,1						
12.	Program Peningkatan Kualitas Pengkantaranan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati					747,91	1.439,76	1.442,90	1.479,80	1.501,70	
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional										
	Rasio impor komoditas hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan persyaratan impor Indonesia (SPS) terhadap total Komoditas impor hewan dan tumbuhan yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditentukan (%)			100	100						
	Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian (%)			0,1	0,1						
	Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional										
	Rasio kasus komoditas pertanian impor pangan strategis yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor (%)			40	40						
	Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan										
	Rasio temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan (%)			0,007	0,006						
	Terkendalinya penyebaran HPHK pada hewan										



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Rasio temuan HPHK pada hewan melalui media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan (%)			0,000190		0,000185							
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Karantina Pertanian												
	Nilai AKIP Sadan Karantina Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian			84		85							
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)			87		90							
	Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Karantina Pertanian			83		84							
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian							118,7	130,7	142,7	157	172,6	
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Karantina Pertanian												
	Nilai AKIP Badan Karantina Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)			83		85							
	Nilai kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011) (Nilai)			85		90							
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Badan Karantina Pertanian												
	Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya (%)			10		0							



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Karantina Pertanian yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya (%)		10	10	10	0						
	Tersedianya peraturan perundang-undangan perkarantina sesuai kebutuhan											
	Rasio peraturan perkarantina yang dihasilkan dibanding total peraturan perkarantina yang dibutuhkan pada tahun berjalan (%)		100	100	100	100						
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan Karantina Pertanian											
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II, III dan IV terhadap layanan Sekretariat Badan Karantina Pertanian (Skala likert 1-4)		3	3	3	3						
	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Kesehatan Hayati Hewan						8,2	12,46	13,8	15,2	16,8	
	Meningkatnya kepatuhan komoditas impor terhadap persyaratan impor Indonesia											
	Rasio komoditas impor hewani dan hayati hewani yang sesuai persyaratan kesehatan dan keamanan impor Indonesia terhadap total komoditas impor hewani dan hayati hewani yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan (%)		100	100	100	100						
	Menurunnya jumlah kasus komoditas ekspor hewan dan hayati hewani yang ditolak negara tujuan ekspor											



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Jumlah komoditas ekspor hewan dan hayati hewan yang ditolak negara tujuan ekspor karena masalah kesehatan dan keamanan			0	0	0							
	Terkendalinya penyebaran HPHK pada hewan												
	Rasio temuan HPHK pada komoditas perikanan melalui media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan				0,000190	0,000185							
	Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan						10,51	18,6	20,6	22,8			
	Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total komoditas pertanian impor												
	Jumlah kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan pada tahun berjalan (Jumlah)			14	12	10							
	Rasio perjanjian kerjasama yang ditandatangani terhadap total perjanjian kerjasama perkarantinaaan yang ditanandatangani (%)			100	100	100							
	Tingkat ketersediaan (availability) informasi perkarantinaaan per tahun (Jam/Tahun)			8322	8322	8322							
	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati						9,9	12,8	13,8	15,2	16,8		
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional												



No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Rasio komoditas impor tumbuhan dan hayati nabati yang sesuai persyaratan impor Indonesia (SPS) terhadap total komoditas impor tumbuhan dan hayati nabati yang masuk melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan (Jumlah)			100	100	100						
	Jumlah komoditas ekspor tumbuhan dan hayati nabati yang ditolak negara tujuan ekspor karena masalah kesehatan dan keamanan (%)			37	37	37						
	Terkendalinya penyebaran OPTK											
	Rasio temuan OPTK pada komoditas tumbuhan melalui media pembawa di tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan (%)			0,01%	0,01%	0,01%						





## B. Matrik Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 (Permentan No. 09 Tahun 2016), Sebelum Revisi

No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
	<b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>						32.810,51	32.392,59	37.412,75	39.105,75	41.284,19	
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pertanian						1.314,28	1.744,63	1.820,41	1.898,07	2.017,49	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian serta Koordinasi, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Administrasi Lingkup Kementan											
	Nilai AKIP Kementan (Nilai)	75	80	81	82	83						
	Opini Laporan Keuangan Kementan (Nilai)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementan (Nilai)	72	73	74	75	76						
	Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri yang Ditindaklanjuti (%)	80	82	82	82	82						
	Nilai Kualitas Pelayanan Publik Kementan (IKM)	80	81	82	83	84						
	Pembinaan Hukum Bidang Pertanian						17,09	18,80	29,13	30,36	31,94	
	Terusunnya Peraturan Perundang-undangan, Naskah Perjanjian dan Menurunnya Permasalahan Hukum Bidang Pertanian											
	Persentase peraturan perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan Prolegnas dan Prolegnas (%)	70	75	80	85	90						
	Persentase layanan bantuan hukum lingkup Kementerian Pertanian yang terselesaikan (%)	70	72	75	78	80						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
	Persentase naskah perjanjian yang dihasilkan (%)	80	82	84	86	88						
	Indeks kepuasan pemohon layanan informasi publik bidang pertanian (IKM)	80										Mulai Tahun 2016 masuk ke Biro Humas dan IP
	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Import dan Tata Niaga Pangan											
	Jumlah Peraturan terkait Rekomendasi Import dan Tata Niaga Pangan Bidang Pertanian			2	2	2						
	Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian Dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral						29,96	28,66	31	33,60	35,50	
	Meningkatnya Intensitas dan Kualitas Kerja Sama Luar Negeri di Bidang Pangan dan Pertanian											
	Kesepakatan Kerjasama Luar Negeri yang dtindaklanjuti (%)		82	82	82	82						
	Pengadministrasian proyek yang didanai dengan PHLN (%)		80	80	82	82						
	Kerjasama bidang pertanian yang difasilitasi oleh Atase Pertanian di Luar Negeri (%)		70	70	72	72						
	Fasilitas dalam mendukung peningkatan kerjasama luar negeri sektor pertanian (laporan)	4										
	Kerjasama bidang pertanian yang ditindak lanjuti dalam kerangka forum bilateral, regional dan multilateral (kegiatan)	10										



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	12 Dukungan kegiatan pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral (bulan)												
	Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Kementerian Pertanian						809,66	1.196,13	1.013,24	1.046,67	1.092,73		
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan perencanaan secara akuntabel dan transparan												
	Peningkatan kapasitas pengelola keuangan (orang)	400	400	400	400	400							
	Peningkatan sumber-sumber potensi PNBPP (satker)	20	20	20	20	20							
	Ketepatan pengelola belanja pegawai (nilai)	90	91	92	93	95							
	Laporan keuangan lingkup kementerian berbasis akrual (%)	100	100	100	100	100							
	Peningkatan kapasitas SDM penyusun laporan keuangan (orang)	60	70	80	90	100							
	Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara kementerian (Rp. Trilyun)	1	1,50	1,50	1,50	1,50							
	Pembukuan nilai BMN atas realisasi anggaran tahun berjalan (%)	100	100	100	100	100							
	Ketersediaan Atsip Dinamis Unit Kearsipan I Kementerian Pertanian (%)	70											
	Kecepatan Layanan Kearsipan (menit)	30											
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian						22,12	23,23	32,05	33,11	34,57		



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Kepegawaian Dalam Agenda Reformasi Birokrasi yang Berkelanjutan											
	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat/Daerah Bidang Pertanian (Indeks)			80	82	85						
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Kepatuhan SPP) (Indeks)			96	98	100						
	Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan (Indeks)			76	80	85						
	Penataan Sistem Manajemen ASN (Indeks)			80	83	86						
	Tingkat Kepuasan Layanan di Bidang Kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Kepegawaian serta Reformasi Birokrasi (Indeks)			80	82	85						
	Penataan kelembagaan Kementerian Pertanian (dokumen)	4	2									
	Pembinaan jabatan fungsional (laporan)	6	2									
	Peningkatan pelayanan publik dan budaya kerja (laporan)		2									
	Penataan Bidang Ketatalaksanaan (dokumen)	4	3									
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi (laporan)	4	1									
	Perencanaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai (dokumen)	19	9									



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Peningkatan Pelayanan Mutasi, Pensiun dan Pemberhentian Pegawai (dokumen)	9	4										
	Pembinaan SDM Aparatur Pertanian melalui Organisasi Kedinasan (laporan)	2	1										
	Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian						71,59	56,75	71,30	74,51	77,86		
	Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, Perwilayahan, Evaluasi dan Pelaporan Sesuai Siklus Perencanaan												
	Nilai AKIP Setjen (nilai)	75	76	87	88	89							
	Nilai penguatan Akuntabilitas Kinerja Kementan (nilai)		3	3,25	3,50	3,75							
	Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan perencanaan, anggaran, perwilayahan, evaluasi dan pelaporan sesuai siklus perencanaan (skala likert 1-5)		3	4	4,50	5							
	Nilai SAKIP Sejen (nilai)	75											
	Jumlah Revisi Anggaran yang dilakukan (kali)	5											
	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti (rekomendasi)	6											
	penyusunan peta pengembangan kawasan dan fasilitas penguatan UPSUS	1											
	Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian						53,59	86	88,27	90,24	92,39		



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Tersedianya Buku Statistik Data Komoditas dan Non Komoditas Pertanian Serta Sistem Informasi Bagi Stakeholders di Pusat dan Daerah												
	Jumlah Buku Statistik Data Komoditas Pertanian (buku)		8	8	8	8							
	Jumlah Buku Statistik Data Non Komoditas Pertanian (buku)		13	13	13	13							
	Jumlah Sistem Informasi Pertanian (sistem)	7	7	7	7	7							
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (bulan)	12	12	12	12	12							
	Laporan Data Komoditas Pertanian (laporan)	10											
	Laporan Data Non Komoditas Pertanian (laporan)	10											
	Pembinaan dan Pengembangan SDM Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian (orang)	527											
	Perindungan Varietas Tanaman dan Perzinan Pertanian						27,02	26,31	34,06	35,77	37,55		
	Peningkatan Kinerja Pelayanan Teknis, Perzinan Pertanian dan dukungan manajemen serta pelaksanaan tugas teknis Pusat PVT/PP												
	Pelayanan Permohonan Hak PVT (varietas)	55	60	60	45	45							
	Pelayanan Proses Pemberian Hak PVT (sertifikat)	45	50	15	30	30							
	Pemantauan dan Evaluasi Varietas yang Telah Dilindungi (varietas)		30	65	40	45							



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pelayanan Pendaftaran Varietas Lokal dan Hasil Pemuliaan (tanda daftar)			180	180	195						
	Pelayanan Pendaftaran Peredaran Varietas (SK tanda daftar)			200	200	215						
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Pusat PVTPP (bulan)			12	12	12						
	Pelayanan Proses Rekomendasi Teknis Bidang Peternakan (rekomendasi)	400	400	2.200	4.000	6.500						
	Pelayanan Proses Penerbitan Surat Ijin Bidang Peternakan (surat ijin)	200	200	250	400	1.100						
	Pelayanan Proses Penerbitan Surat Ijin Pupuk dan Pestisida (surat ijin)	2.100	2.105	2.105	5.100	5.100						
	Pelayanan Proses Perizinan Pemasukan/Pengeluaran Benih/SDG Tanaman (surat ijin)	1.010	1.015	1.200	1.400	1.400						
	Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)		75	75	76	77						
	Administrasi dan Manajemen (laporan)	4										
	Jumlah pelayanan pendaftaran Tanda Daftar varietas SDG tanaman (tanda daftar)	175										
	Jumlah proses pelayanan pendaftaran varietas hortikultura dalam rangka peredaran (tanda daftar)	200										
	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa											



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya Kepuasan Publik Dalam Pelayanan Kearsipan dan Tata usaha, Sarana Prasarana Kantor dan Layanan Pengadaan Barang Jasa						281,04	281,04					
	Ketersediaan Atsip Dinamis inaktif Unit Kearsipan Kementerian Pertanian (%)		82	90	95	100							
	Tingkat kepuasan pengguna sarana dan prasarana Kantor Pusat lingkup Sekretariat Jenderal (Indeks)	65	80	83	85	90							
	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik (%)		100	0	0	0							Kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik tidak dilakukan sesuai dengan IKU yang dibahas bersama konsultan
	Indeks Kepuasan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Indeks)		82	85	90	95							
	Laporan ketatausahaan Kementerian Pertanian (Laporan)	10											
	Meningkatnya pemberitaan positif program pembangunan pertanian. (persen)	7											
	Laporan kerjasama dengan lembaga tinggi negara, organisasi profesi, dan asosiasi (laporan)	2											
	Laporan Keprotokolan dan pelayanan pimpinan (laporan)	2											
	Operasionalisasi gerakan UPSUS	1											





No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016		2017	2018
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Informasi Publik, Hubungan Antar Lembaga, Serta Keprotokolanan di Bidang Pertanian						34.975	41.971	50.365	60.437	
	Terinformasinya Program Pembangunan Pertanian Melalui Media Massa dan Terkelolanya Informasi Publik										
	Penyebarluasan Informasi Program Pembangunan Pertanian (media)	1.500	1.750	2.000	2.250	2.250	25.242	30.290	36.348		
	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan informasi publik (IKM) (%)	81	85	88	90	90	7.997	9.597	11.516		
	Layanan keprotokolanan dan hubungan Antar Lembaga (kegiatan)	96	98	100	102	102	8.732	10.478	12.573		
	Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian							45.585,32	47.864,58	50.257,81	Sesuai Kepmenan No. 232/kpts/OT.01014/2016 masuk ke Sejen
	Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian		22	22	22	22					
	Tersedianya layanan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan										
	Jumlah layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan (rekomendasi kebijakan)		12	12	12	12					



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
	Jumlah layanan rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian (Rekomendasi kebijakan)			10	10	10								
	Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian												Sesuai Kementan No. 233/kpts/ OT.01014/2016 masuk ke Sejien	
	Tersedianya berbagai informasi iptek pertanian dan pemanfaatannya secara intensif oleh pengguna melalui pengembangan produk dan layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna										34.913,06	31.538,71	33.254,75	
	Jumlah artikel dalam publikasi yang diterbitkan (judul)			150	152	157					6.500	6.955	7.441,85	
	Jumlah tambahan koleksi perpustakaan (judul)			950	1.000	1.050					2.891,74	3.036,33	3.188,15	
	Dukung pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian (bulan)			12	12	12					20.521,32	21.547,38	22.624,75	
2.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian									115,53	121,30	127,08	138,64	
	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian													



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Tingkat efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit (%)	95	95,50	96	96,50	97						
	Tingkat efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit (%)	95	95,50	96	96,50	97						
	Tingkat keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit (%)	99	99	99	99	99						
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan tidak ekonomis/kerugian Negara (%)	80	80	80	80	80						
	Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian yang dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (%)	75	76	77	78	80						
	Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian yang menerapkan SPI dan dinilai handal (%)	75	77	79	81	85						
	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian						8,03	8,83	9,64	10,11	10,44	
	Tenwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian secara efektif dan efisien											



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Revisi Laporan Keuangan pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta Revisi Laporan Keuangan Kementan (Laporan Revisi)	8	8	8	8	8						
	Evaluasi/pengawasan program dan kegiatan strategis pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Laporan Evaluasi/Pengawasan)	1	1	1	1	1						
	Audit kinerja pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Laporan Hasil Audit)	106	99	99	99	99						
	Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian serta revisi Laporan Kinerja Kementerian Pertanian (Laporan Evaluasi)	4	4	4	4	4						
	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan						7,98	8,54	9,10	10,21	10,77	



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Tenwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan secara efektif dan efisien												
	Revisi Laporan Keuangan pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan (Laporan Revisi)	6	6	6	6	6							
	Evaluasi/pengawalan program dan kegiatan strategis pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan (Laporan Evaluasi/ Pengawalan)	1	1	1	1	1							
	Audit kinerja pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan (Laporan Hasil Audit)	106	99	99	99	99							
	Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan (Laporan Evaluasi)	3	3	3	3	3							
	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian						7,48	8,23	8,98	9,72	10,47		



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019
	Tenwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan secara efektif dan efisien											
	Revisi Laporan Keuangan pada satker Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian (Laporan Revisi)	6	6	6	6	6						
	Evaluasi/pengawalan program dan kegiatan strategis pada satker Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian (Laporan Evaluasi/ Pengawalan)	1	1	1	1	1						
	Audit kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian (Laporan Hasil Audit)	109	99	99	99	99						
	Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian (Laporan Evaluasi)	3	3	3	3	3						
	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian						7,40	8,14	8,88	9,62	10,36	



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian secara efektif dan efisien												
	Revisi Laporan Keuangan pada satker Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian (Laporan Revisi)	6	6	6	6	6							
	Evaluasi/pengawasan program dan kegiatan strategis pada satker Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian (Laporan Evaluasi/ Pengawasan)	1	1	1	1	1							
	Audit kinerja pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian (Laporan Hasil Audit)	106	99	99	99	99							
	Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian (Laporan Evaluasi)	3	3	3	3	3							
	Peningkatan pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu pada Satker lingkup Kementerian Pertanian						5,67	6,24	6,80	7,37	7,94		
	Terwujudnya pelaksanaan pembinaan komitmen anti korupsi dan pengawasan tujuan tertentu pada satker lingkup Kementerian Pertanian												



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pembinaan Komitmen Anti Korupsi lingkup Kementerian Pertanian (Laporan)	1	1	1	1	1						
	Audit investigasi lingkup Kementerian Pertanian (Laporan Hasil Audit)	24	24	24	24	24						
	Pengawasan dengan tujuan tertentu lingkup Kementerian Pertanian (Laporan Hasil Audit)	2	2	2	2	2						
	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal						78,97	81,33	83,68	85,83	88,66	
	Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya, sarana dan prasarana, serta anggaran lingkup Inspektorat Jenderal											
	Terusunnya dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran serta laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Bagian Perencanaan (Dokumen)	14	14	14	14	14						
	Terusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas (Laporan)	9	9	9	9	9						
	Terusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit (Laporan)	4	4	4	4	4						
	Terusunnya laporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Audit (Laporan)	3	3	3	3	3						





No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pendukung pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian (Kegiatan)	5	5	5	5	5						
3.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan						2.826.300	7.731.256	7.119.635	7.404.420,40	6.884.772,29	
	Tenwujudnya Peningkatan Produksi dan Daya Saing Tanaman Pangan											Baru
	Tercapainya Produktivitas Padi (ku/ha)	51,40	52,35	52,61	52,87	53,14						
	Tercapainya Produktivitas Jagung (ku/ha)	50,54	52,63	53,67	54,75	55,84						
	Tercapainya Produktivitas Kedelai (ku/ha)	15,55	15,76	16	16,50	17						
	Tercapainya Produktivitas Ubi Jalar (ku/ha)	168,85	173,85	178,85	183,85	188,85						
	Tersedianya benih unggul bersertifikat untuk padi (%)	50	50	50	50	50						
	Tersedianya benih unggul bersertifikat untuk jagung (%)	50	50	50	50	50						
	Tersedianya benih unggul bersertifikat untuk kedelai (%)	35	35	35	35	35						
	Terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan terkena DPI Padi (%)	93	93	93	93	93						
	Terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan terkena DPI Jagung (%)	98	98	98	98	98						
	Terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan terkena DPI Kedelai (%)	97	97	97	97	97						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan terkena DPI Ubi Kayu (%)	98	98	98	98	98						
	Terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan terkena DPI Ubi Jalar (%)	98	98	98	98	98						
	Terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan terkena DPI Kacang Tanah (%)	98	98	98	98	98						
	Terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan terkena DPI Kacang Hijau (%)	98	98	98	98	98						
	Terwujudnya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan mendukung penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi berkelanjutan											
	Tercapainya Produktivitas Ubi kayu (ku/ha)	234	240	245	250	255						
	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi						957.620	1.743.268	1.864.797	1.939.389	1.620.370	
	Meningkatnya Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Aneka Kacang dan Umbi yang Tepat dan berkelanjutan untuk Peningkatan Produksi Melalui Peningkatan Produktivitas per satuan luas.											
	Luas lahan yang mendapatkan fasilitas penerapan budidaya kedelai (Ha)	481.500	700.000	500.000	700.000	700.000						
	Luas lahan yang mendapatkan fasilitas penerapan budidaya Ubi Kayu (Ha)	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
	Luas lahan yang mendapatkan fasilitas penerapan budidaya Ubi Jalar (Ha)	-	2.700	5.000	5.000	5.000						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Luas lahan yang mendapatkan fasilitas penerapan budidaya kacang tanah (ha)	-	-	6.500	6.500	6.500						
	Luas lahan yang mendapatkan fasilitas penerapan budidaya kacang hijau	-	-	5.000	5.000	5.000						
	Luas lahan yang mendapatkan fasilitas penerapan budidaya aneka kacang dan umbi lainnya	-	-	1.100	1.100	1.100						
	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia						1.344.060	4.517.985	3.859.125	4.013.490	4.174.030	
	Meningkatnya Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Serealia yang Tepat untuk Peningkatan Produksi Melalui Peningkatan produktifitas per satuan luas											
	Luas lahan yang mendapatkan fasilitas penerapan budidaya padi (ha)	350.000	4.605.302	4.600.000	4.600.000	4.600.000						
	Luas lahan yang mendapatkan fasilitas penerapan budidaya jagung (ha)	102.000	550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000						
	Luas lahan yang mendapatkan fasilitas penerapan budidaya serealia lainnya (ha)		1.000	1.750	1.750	1.750						
	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan						95.140	117.027	196.082	203.925	212.082	
	Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga pembenihan tanaman pangan yang efisien di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat											
	Luas lahan yang mendapatkan fasilitas untuk perbanyakan benih sumber (ha)	530	545	545	545	545						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah balai benih yang melakukan pengawasan dan sertifikasi (Balai Benih)	32	32	32	32	32						
	Jumlah pengawasan dan pengujian benih tanaman pangan		80.954	85.000	90.000	95.000						
	Luas lahan yang mendapatkan fasilitas untuk memproduksi benih bersertifikat (ha)		2.000	2.000	2.000	2.000						
	Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI						103.980	195.168	205.368	213.583	222.126	
	Mengamankan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI											
	Luas lahan yang mendapatkan Fasilitas penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI (ha)	850	42.005	6.646.375	7.309.912,50	8.040.903,75						
	Luas Penerapan PHT (ha)	12.165										
	Dokumen penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI (dokumen)		269	269	295,90	325,49						
	Hasil pengujian mutu produk tanaman (LHP/Sertifikat)		2.350	2.375	2.612,50	2.873,75						
	Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Dipten Tanaman Pangan						233.300	242.772	250.555	260.577	271.000	
	Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan											
	Dokumen layanan dukungan manajemen Eselon I (paket)	1	1	1	1	1						
	Dokumen layanan internal (Overhead) (paket)	1	1	1	1	1						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Dokumen layanan perkantoran (paket)		12	12	12	12							
	Pengembangan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan						13.180	16.963	25.083	26.086	27.130		
	Tersedianya Informasi dan Model Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Sebagai Rujukan dalam Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura												
	Jumlah model peramalan OPT (model)	15	15	15	15	15							
	Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih						7.520	9.900	16.603	17.267	17.958		
	Berkembangnya Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura												
	Jumlah metode pengujian mutu benih (metode)	10	10	10	10	10							
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan						71.500	888.173	702.022	730.103	759.307		
	Penurunan susut hasil tanaman pangan												
	Jumlah fasilitas sarana pascapanen tanaman pangan (unit)	7.001	26.598	6.601	7.261,10	7.987,21							
	Jumlah fasilitas sarana pengolahan hasil tanaman pangan (unit)		90	137	150,70	165,77							
	Jumlah fasilitas penerapan standarisasi dan mutu hasil tanaman pangan (sertifikat/register)		75	75	82,50	90,75							



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah fasilitas pemasaran dan investasi hasil tanaman pangan (Informasi Harga)		276	278	305,80	336,38						
4.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan						1.129,09	1.148	1.312	1.446	1.591	
	Terpenuhi konsumsi cabai, bawang merah, jeruk dan aneka produk hortikultura lainnya dalam negeri dan ekspor											
	- Jumlah Produksi Aneka Cabai (ton)	1.833.419										
	- Jumlah Produksi Bawang Merah (ton)	1.125.247										
	- Jumlah Produksi Buah (ton)											
	- Jumlah Produksi Jeruk (ton)	1.640.377										
	- Jumlah Produksi Buah Lainnya (ton)	17.988.469										
	- Jumlah Produksi Sayuran Lainnya (ton)	10.887.768										
	- Jumlah Produksi Tanaman Obat (ton)	563.702										
	- Jumlah Produksi florikultura (tangkai)	660.308.904										
	- Jumlah Rata-rata kehilangan hasil pasca panen hortikultura (%)											
	pengamanan produksi dari serangan OPT (%)											
	Ketersediaan benih:											
	a. Benih buah (%)		4									
	b. Benih sayur (%)		3									
	c. Benih tanaman obat (%)		2									
	d. Benih florikultura (%)		3									



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019	
	laporan kinerja (%)	-											
	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura						115,69	117	128	141	155		
	Terpenuhinya Konsumsi Jeruk, Aneka Produk Buah Lainnya dan Florikultura Dalam Negeri dan Ekspor												
	Luas Kawasan Jeruk (ha)	-											
	Luas Kawasan Buah lainnya (ha)	-											
	Desa Organik Berbasis Tanaman Buah (desa)	-											
	Registrasi kebun GAP Buah (kebun)	870											
	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Tanaman Buah (unit)	-											
	Luas Kawasan Tanaman Florikultura (m <sup>2</sup> )	450.000											
	Jumlah Lahan Usaha GAP Florikultura yang telah dilakukan registrasi (LU)	50											
	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Tanaman Florikultura (unit)	-											
	Pengembangan kawasan buah (ha) <sup>*)</sup>	6.307											
	fasilitas pengelolaan pascapanenan tanaman buah (unit) <sup>*)</sup>	615											
	fasilitas pengelolaan pascapanenan tanaman florikultura (unit) <sup>*)</sup>	200											
	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat						614,87	740	814	895	985		



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Terperluhinya Konsumsi Aneka Cabai, Bawang Merah, Sayuran Lainnya dan Tanaman Obat Untuk Konsumen Dalam Negeri dan Ekspor												
	Luas Kawasan Cabai (Ha)												
	Luas Kawasan Bawang Merah (Ha)												
	Luas Kawasan sayuran lainnya (Ha)	7.991											
	Luas Kawasan Tanaman Obat (Ha)	751											
	Desa Organik/Berbasis Tanaman Sayuran dan Obat (Desa)												
	Jumlah Lahan usaha GAP Sayuran dan Tanaman Obat yang telah dilakukan Registrasi(LU)	1.200											
	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Sayuran dan tanaman obat (Unit)												
	Fasilitas Kelompok Penggerak Pembanguan Hortikultura (Sayuran dan Tanaman Obat) di Wilayah Penyangga (Kelompok)												
	fasilitas pengelolaan pascapanen sayuran dan tanaman obat (unit)*	742											
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura						61	67	74	81			
	Terperluhinya standar mutu, nilai tambah dan daya saing produk hortikultura												
	Jumlah Bangsal pascapanen (Unit)												
	Jumlah Sarana Prasarana Pascapanen (unit)												
	Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan (unit)												





No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Fasilitasi Pemasaran Hortikultura (kali)												
	Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu Hortikultura (kali)												
	Jumlah Cold Storage Hortikultura (unit)												
	Fasilitasi Hortipark (Lokasi)												
	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura						90,71	63	70	77	84		
	Terpenuhiya Benih Bermutu Untuk Kebutuhan Dalam Negeri dan Ekspor												
	Jumlah Produksi benih Bawang Merah (Kg)												
	Jumlah Produksi Benih Kentang (K No)												
	Jumlah Produksi benih Jeruk (batang)												
	Jumlah Produksi benih tanaman buah lainnya (batang)												
	Jumlah fasilitasi Penguatan kelnmbagaan (lembaga)	160											
	Jumlah penangkar benih yang mendapatkan fasilitasi (kelompok)												
	Jumlah Varietas baru hortikultura (calon varietas)												
	Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih hortikultura (unit)												
	Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura						93,05	17	68	77	86		
	Terlaksananya usaha pengamanan dan berkembangnya sistem perlindungan hortikultura												



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019	
	Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium dan Klinik PHT (unit)												
	Jumlah Gerakan Pengendalian OPT (kali)												
	Jumlah Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi)	75											
	Pengelolaan OPT Ramah Lingkungan	2.045											
	SLPHT/Penerapan PHT (kelompok)	660											
	lembaga perlindungan tanaman hortikultura	310											
	Peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Dityen Hortikultura						165,81	150	165	182	200		
	Meningkatnya usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Dityen Hortikultura												
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Hukum, Kehumasan dan Kepegawaian serta keuangan dan Perencanaan (dokumen)												
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura (Laporan)												
	SAKIP (%)												
	Laporan pemantauan produksi cabai dan bawang merah (bulan)												
	Lembaga pengembangan hortikultura: penggerak membangun desa (PMD)/ kelompok tani pada area periruban (kelompok)*	240											
	pelayanan manajemen (bulan)*	12											



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	laporan kinerja (laporan*)	7											
	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura												
	Stabilitasnya produksi cabai dan bawang merah												
	Koefesien variasi produksi bulanan cabai besar (CV %)	≤15	≤11	≤10	≤10	≤10							
	Koefesien variasi produksi bulanan cabai rawit (%)	≤18	≤16	≤15	≤15	≤15							
	Koefesien variasi produksi bulanan bawang merah (%)	≤20	≤17	≤16	≤16	≤15							
	Produksi Aneka Cabai (ton)	2.132.676	2.196.657	2.245.440	2.295.481								
	a. Produksi Cabai Besar (ton)	1.209.455	1.245.739	1.283.111	1.321.604								
	b. Produksi Cabai Rawit (ton)	923.221	950.918	962.329	973.877								
	Produksi Bawang Merah (ton)	1.292.808	1.390.207	1.436.407	1.484.976								
	Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saling												
	Produksi Jeruk (ton)	2.005.118	2.049.868	2.098.767	2.151.982								
	Produksi Manggis (ton);	2.520.140	2.566.763	2.615.531	2.666.534								
	Produksi Nenas (ton);	1.879.799	1.902.356	1.925.184	1.948.287								
	Produksi Manggis (ton);	118.713	120.791	122.929	125.129								
	Produksi Salak (ton)	1.141.443	1.152.858	1.164.386	1.176.630								
	Produksi Kentang (ton)	1.405.016	1.437.332	1.471.828	1.508.623								
	Produksi Sayuran Lainnya (ton)	7.702.384	7.845.278	8.013.641	8.201.133								
	Produksi Tanaman Obat (kg)	623.877.523	640.086.113	657.095.966	675.008.971								
	Produksi Buah Lainnya (ton)	12.670.725	12.827.614	12.991.747	13.164.105								
	Produksi Daun dan Bunga Potong (tangkai)	781.204.365	803.824.652	827.579.765	852.615.087								



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)			Keterangan			
		2015	2016	2017	2018	2019	2016		2017	2018	2019
	Produksi Tanaman Pot dan Lanskap (Pohon)	48.098,466	49.436.171	50.834.098	52.303.868						
	Produksi Bunga Tabur (kg)	38.680.522	40.053.681	41.515.640	43.176.266						
	Produksi Aneka Cabai (ton)	2.132.676	2.196.657	2.245.440	2.295.481						
	Koefesien variasi produksi bulanan	≤ 15	≤ 11	≤ 10	≤ 10						
	Cabai Besar (cv %)										
	Koefesien variasi produksi bulanan	≤ 18	≤ 16	≤ 15	≤ 15						
	Cabai Rawit (cv %)										
	a. Produksi Cabai Besar (ton)	1.209.455	1.245.739	1.283.111	1.321.604						
	b. Produksi Cabai Rawit (ton)	923.221	950.918	962.329	973.877						
	Luas Kawasan Aneka Cabai (Ha)	15,168	15	16,5	18,15						
	Produksi Bawang Merah (ton)	1.292.808	1.390.207	1.436.407	1.484.976						
	Koefesien variasi produksi bulanan	≤ 20	≤ 17	≤ 16	≤ 15						
	Bawang Merah (cv %)										
	Luas Kawasan Bawang Merah (Ha)	4.888	7	7,7	8,47						
	Produksi benih Bawang Merah (kg)	2.000.000	3.065.000	2.205.000	2.315.250						
	Produksi Jeruk (ton)	2.005.118	2.049.868	2.098.767	2.151.982						
	Luas Kawasan Tanaman Jeruk (Ha)	2.400	1.563	2.200	2.600						
	Produksi Benih Jeruk (Batang)		252.000	264.600	277.830						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Produksi Mangga (ton);	2.520.140	2.566.763	2.615.531	2.666.534							
	Produksi Nenas (ton);	1.879.799	1.902.356	1.925.184	1.948.287							
	Produksi Manggis (ton);	118.713	120.791	122.929	125.129							
	Produksi Salak (ton)	1.141.443	1.152.858	1.164.386	1.176.030							
	Produksi Buah Lainnya (ton)	12.670.725	12.827.614	12.991.747	13.164.105							
	Luas Kawasan Buah Lainnya (Ha)	1500	283	2300	2400							
	Registrasi Kebun GAP Buah (Kebun)	-	-	350	355							
	Produksi Benih Tanaman Buah Lainnya (Batang)	170.000	178.500	187.425	196.796							
	Produksi Kentang (ton)	1.405.016	1.437.332	1.471.828	1.508.623							
	Produksi Benih Kentang (K Nol)	243.000	257.250	270.113	283.618							
	Produksi Sayuran Lainnya (ton)	7.702.394	7.845.278	8.013.641	8.201.133							
	Luas Kawasan sayuran lainnya (Ha)	1.402	1.678	1.770	1.900							
	Produksi Tanaman Obat (ton)	623.877.523	640.086.113	657.095.966	675.008.971							
	Luas Kawasan Tanaman Obat (Ha)	91	105	110	115							
	Registrasi Lahan Usaha GAP Sayuran dan Tanaman Obat (Kebun)		525	550	575							
	Produksi Bunga Potong dan Daun Potong (tangkal)	781.204.365	803.824.652	827.579.765	852.615.087							
	Produksi Bunga Pot dan Tanaman Lanskap (pohon)	48.098.466	49.436.171	50.834.096	52.303.868							
	Produksi Bunga Tabur (kg)	38.680.522	40.053.681	41.515.640	43.176.266							
	Kawasan Tanaman Florikultura (M2)	8.800	40.000	45.000	50.000							
	Registrasi Lahan Usaha GAP Florikultura (LU)		21	22	23							



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016		2017	2018	2019	
	Desa Organik Berbasis Tanaman Buah/ Florikultura (Desa)		100	100	100	100							
	Desa Organik Berbasis Tanaman Sayuran dan Obat (Desa)		150	150	150	150							
	Jumlah Bangsa/ pascapanen (Unit)		30	35	35	75	100						
	Jumlah Sarana Prasarana Pascapanen (unit)		161	34	34	225	300						
	Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan (unit)		109	30	30	40	50						
	Fasilitasi Pemasaran Hortikultura (kali)		30	37	37	39	41						
	Fasilitasi Penerapan Jaminan Mutu (kali)		-	-	-	250	250						
	Fasilitasi Hortipark (lokasi)		-	-	-	15	15						
	Pembinaan lembaga Perbenihan Hortikultura (lembaga)		65	65	65	65	65						
	Jumlah penangkar benih yang mendapatkan fasilitasi (kelompok)		28	30	30	38	42						
	Jumlah Varietas baru hortikultura (calon varietas)		25	35	35	45	55						
	Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih hortikultura (unit)		1,52	1,575	1,575	1,651	1,734						
	Gerakan Pengendalian OPT (Ha)		-	-	-	4000	4800						
	SLPHT (Kelompok)		-	-	-	300	350						
	Fasilitasi Sarana Prasarana Kelembagaan Perlindungan Hortikultura (Unit)		116			270	325						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (Ha)		15		70	84						
	SAKIP (%)		78	80	81	82						
5.	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan						4.754.200	1.759.314,99	1.420.237,12	1.477.046,60	1.536.126,47	
	Meningkatnya Produksi dan Daya Saling Komoditas Tebu dan Komoditas Perkebunan Lainnya											
	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu (%)	12,91	10,03	7,03	4,57	4,37						
	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan Lainnya (%)	16,35	2,45	2,90	2,89	2,86						
	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah						2.277.300	362.586,44	201.385,78	209.441,21	217.818,86	
	Terlaksananya Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah											
	Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu (ribu Hektar)	66,71	31,16	18,51	18,51	18,51	1.619.900	237.485,49	125.344,95	130.358,75	135.573,10	
	Pengembangan Areal Produktif Tanaman Semusim Lainnya (ribu Hektar)	8,44	2,45	0,90	0,90	0,90	50.600	15.605,80	11.629,78	12.094,97	12.578,77	
	Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering (ribu Hektar)	0	6,83	2,77	2,77	2,77	0	75.870,12	27.903,75	29.019,90	30.180,70	
	Pengembangan Areal Produktif Tanaman Rempah (ribu Hektar)	31,13	5,94	5,34	5,34	5,34	145.900	24.646,30	27.748,93	28.858,88	30.013,24	
	Fasilitasi Teknis Pengembangan tanaman Semusim dan Rempah (Bulan)	12	12	12	12	12	460.900	8.978,74	8.758,37	9.108,71	9.473,06	



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar						1.886.000	805.254,36	473.715,92	482.664,55	512.371,13	
	Terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar											
	Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao (ribu Hektar)	184,91	81,97	11,50	11,50	11,50	1.274.300	483.728,86	85.098,65	88.502,60	92.042,70	
	Pengembangan Areal Produktif Tanaman Penyegar Lainnya (ribu Hektar)	37,37	15,48	30,30	30,30	30,30	225.700	116.612,17	188.251,40	195.781,46	203.612,71	
	Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tahunan (ribu Hektar)	66,45	16,43	28,55	28,55	28,55	319.600	95.740,76	162.363,38	168.857,91	175.612,23	
	Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Lahan Kering (ribu Hektar)	0	11,01	1,90	1,90	1,90	0	87.738,27	17.745,97	18.455,80	19.194,04	
	Fasilitas Teknis Pengembangan tanaman Tahunan dan Penyegar (Bulan)	12	12	12	12	12	66.400	21.434,31	20.256,52	21.066,78	21.909,46	
	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Perkebunan						42.500	116.365,68	78.020,83	81.141,66	84.387,33	
	Terlaksananya pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan											
	Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan (kelompok Tani)	299	190	83	83	83	30.000	43.287,21	20.768,28	21.599,01	22.462,97	
	Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)	0	56	30	30	30	0	28.514,49	13.678,30	14.225,43	14.794,45	
	Pembinaan usaha perkebunan (provinsi)	32	32	32	32	32	5.000	13.891,92	12.205,22	12.693,43	13.201,17	
	Pembinaan penerapan standar dan sistem jaminan mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan (kegiatan)	0	53	54	54	54	0	6.931,88	8.411,23	8.747,68	9.097,59	





No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pengembangan pemasaran hasil perkebunan (kegiatan)	0	197	281	281	281	0	17.397,86	9.739,55	10.129,13	10.534,30	
	Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Bulan)	12	12	12	12	12	7.500	6.342,32	13.218,25	13.746,98	14.296,86	
	Dukungan Perlindungan Perkebunan						179.600	136.349,94	132.686,99	137.994,47	143.514,25	
	Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan Terfasilitasinya Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Bencana Alam serta Dampak Perubahan Iklim dan Gangguan/ Konflik Usaha Perkebunan											
	Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan (Unit)	135	77	75	75	75	48.000	24.175,39	16.165,44	16.812,06	17.484,54	
	SL-PHT Tanaman Perkebunan (KT)	224	93	84	84	84	22.100	9.746,48	8.609,40	8.953,78	9.311,93	
	Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun (dokumen)	18	26	39	39	39	5.500	2.820,65	11.061,58	11.504,04	11.964,20	
	Antisipasi Dampak Perubahan Iklim (KT)	77	94	9	9	9	23.700	10.130,09	2.308,87	2.401,22	2.497,27	
	Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan (ribu Ha)	33,37	11,46	11,25	11,25	11,25	66.800	31.964,82	36.238,03	37.687,55	39.195,06	
	Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan (Desa)	0	150	150	150	150	0	45.300,83	40.461,28	42.079,73	43.762,92	
	Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (Kasus)	42	42	42	42	42	5.300	2.620	2.546	2.647,84	2.753,75	
	Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan (Bulan)	12	12	12	12	12	8.200	9.591,68	15.296,40	15.908,25	16.544,59	
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya						194.600	168.673,70	365.679,92	380.307,12	395.519,41	



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
	Terlaksananya Pelayanan Teknis dan Administrasi Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan											
	Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (Bulan)	12	12	12	12	12	73.641,34	264.441,01		275.018,65		286.019,40
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Umum, serta Evaluasi dan Layanan Rekomendasi (Dokumen)	19	12	12	12	12	95.032,36	101.238,92		105.288,47		109.500,01
	Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyediaan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan						7.040	87,88	93,54	97,28		101,17
	Meningkatnya pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan											
	Jumlah teknik dan metode pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan (metode)		7	7	10	11						
	Jumlah perakitan teknologi proteksi spesifik lokasi yang dihasilkan (paket teknologi)		38	33	34	39						
	Jumlah metode di bidang proteksi tanaman perkebunan yang dikembangkan dan dihasilkan (metode)		16	14	18	19						
	Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan (rekomendasi)		129	154	202	234						
	Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan											



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Tenwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan												
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan (nilai IKM)	3	3	3	3	3							
	Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan yang terjadi berulang (Temuan)	0	1	2	2	2							
	Jumlah temuan Inspektorat Jenderal, Kementerian Pertanian atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai PermenPAN RB Nomor 12 tahun 2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja di lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan (Temuan)	0	1	2	2	2							
	Rasio permintaan dan keluhan (tertulis) yang ditindaklanjuti terhadap layanan ketatausahaan di lingkup Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan (%)	0	80	85	90	90							
	Terlaksananya Pengawasan dan Penujian Benih Tanaman Perkebunan dan Pemyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan												



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pembangunan Kebun Contoh, Uji Demplot dan Uji Koleksi Tanaman Perkebunan (Unit)	100	16	16	16	16	1.000	406,90	423,18	440,10	457,71	
	Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan (Juta Batang)	17,19	147,74	147,74	147,74	147,74	700	3.804,31	3.956,48	4.114,74	4.279,33	
	Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan (Paket Teknologi)	29	27	73	73	73	2.200	5.050,27	5.252,28	5.462,37	5.680,86	
	Eksplorasi, Pemanfaatan, Pengembangan, Pengujian Agenasia Pengendali Hayati Tanaman Perkebunan (Jenis)	15	13	20	20	20	800	1.068,62	1.111,36	1.155,82	1.202,05	
	Fasilitasi Teknis Dukungan Pengawasan dan Pengujian Benih dan Teknologi, Proteksi Tanaman Perkebunan (Bulan)	12	12	12	12	12	65.700	77.545,05	82.794,65	86.106,44	89.550,69	
	Dukungan Perbenihan Perkebunan						11.100	82.209,73	75.209,73	78.218,12	81.346,84	
	Terlaksananya penyediaan benih unggul tanaman perkebunan											
	Pengawasan mutu benih tanaman perkebunan (Provinsi)	0	0	32	32	32	0	0	5.791,58	6.023,24	6.264,17	
	Pengembangan sumber benih unggul tanaman perkebunan ( ribu Hektar)	0,32	2,49	0,59	0,59	0,59	11.100	77.430,38	52.415,05	54.511,66	56.692,12	
	Pengembangan Keliembagaan Perbenihan Tanaman Perkebunan (Provinsi)	0	0	33	33	33	0	0	7.116,06	7.400,70	7.696,73	
	Fasilitasi Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan (Bulan)	0	12	12	12	12	0	4.779,36	9.887,04	10.282,52	10.693,82	
6.	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat							1.594,46	4.318,93	4.798,65	5.199,93	
	Meningkatkan produksi pangan hewani asal ternak											



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
	-Produksi daging sapi kerbau (000 ton)		588,56	639,61	694,96	755,04						
	-Produksi daging ternak lainnya (000 ton)		3.678,67	3.796,88	3.969,57	4.167,51						
	-Produksi telur (000 ton)		3.393,36	3.565,86	3.655,43	3.770,04						
	-Produksi susu (000 ton)		850,77	910,57	980,88	1.063,56						
	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing peternakan											
	-Ternak yang bersertifikat/SKLB (ekor)		10.880	2.950	3.245	3.730						
	-Peryaratan mutu dan keamanan produk hewan (%)		66,57	72,76	80,37	88,16						
	-Volume ekspor komoditi peternakan (%)		3	4	5	6						
	-Status kesehatan hewan (%)		73	76	78	80						
	-Investasi subsektor peternakan PMA (%)		1	2	2	2,50						
	Investasi subsektor peternakan PMDN (%)		1	2	2,50	3						
	Meningkatkan kesejahteraan peternak											
	-PDB peternakan perjumlah tenaga kerja peternakan (Rp. juta)		37,14	39,49	41,83	44,17						
	-Nilai Tukar Peternak (NTP)		107,23	107,53	107,82	108,12						
	Peningkatan Produksi Pakan Ternak											
	Meningkatnya Produksi Mutu Dan Keamanan Pangan											
	Pengembangan hijauan pakan ternak (ha)		7.857	10.348	12.062	13.776						
	Pengembangan pakan olahan dan bahan pakan (ton)		5.792	14.365,15	16.555,15	18.242,20						
							510,02	800,43	874	980		



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pengembangan mutu dan keamanan pakan (sampel)		11.166	7.850	8.100	8.350						
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan										1.828	1.975,80
	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan											
	Penanganan dan pengendalian PHMSZ (provinsi/kabupaten/pulau) (dosis)	7.500.000		12.456.872	13.073.379	13.808.630						
	Penanganan dan pengendalian penyakit Anthrax (provinsi/kabupaten/pulau) (dosis)	178.300		301.455	316.528	332.354						
	Penanganan dan pengendalian Rabies (provinsi/kabupaten/pulau) (dosis)	0		1.496.660	1.571.493	1.728.642						
	Penurunan angka kematian ternak (dokumen)	120		120	120	120						
	Peningkatan kesehatan hewan pemusukan dan pengeluaran (dokumen)	120		120	120	120						
	Peningkatan mutu dan kemanan bahan pakan asal hewan (dokumen)	34		35	38	40						
	Peningkatan Volume ekspor obat hewan (dokumen)	120		120	120	120						
	Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak										1.198,43	1.252,20
	Meningkatnya Produktifitas Ternak										1.062,19	
	Pengembangan populasi sapi dan kerbau (kipk/pkt)	82		331	177	485						
	Produksi benih sapi dan kerbau (dosis)	5.045.800		5.045.800	5.192.800	5.440.800						
	Pengembangan populasi kambing dan domba (kipk/pkt)	10		113	130	172						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pengembangan populasi babi (klpk/pkt)		84	82	80	117						
	Pengembangan populasi unggas dan aneka ternak (klpk/pkt)		20	307	352	163						
	Peningkatan produktivitas ternak sapi dan kerbau (akseptor)	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000						
	Penambahan induk/pejantan sapi (ekor)	0	0	1.000	1.000	1.000						
	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)							205,20	346	397,10	455,20	
	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Produk Hewan											
	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan produk hewan yang ASUH (unit)		398	373	526	695						
	Penerapan kesejahteraan hewan (unit)		90	90	123	150						
	Pencegahan penularan zoonosis (unit)		144	184	218	218						
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan							291,84	368,63	385,45	403,71	
	Meningkatnya Akuntabilitas Ditjen PKH											
	Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya (bulan)		12	12	12	12						
	Pelaksanaan SAKIP (dokumen)		329	329	328	294						
	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak							75,53	100,58	115,66	133,03	
	Meningkatnya Nilai tambah dan daya saing Produk Peternakan											
	Peningkatan fasilitas UPH peternakan pangan dan nonpangan (UPH)		48	60	65	70						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Peningkatan fasilitas Pengolahan Biogas, Kompos dan Pupuk Cair (UPH)	17	50	60	70							
	Peningkatan volume ekspor komoditi peternakan (laporan)	3	6	6	6							
	Peningkatan investasi subsektor peternakan (lokasi)	19	24	26	28							
	Perbaikan tatanaga peternakan (lokasi)	94	150	198	249							
	Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan (kelompok)	114	126	138	152							
	Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha terhadap asuransi ternak (ekor)	2.000	2.500	3.000	3.500							
	Penguatan kelembagaan peternakan (kelompok)	53	65	85	90							
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian						12.331,72	11.125,09	11.126,80	11.048,81	10.761,85	
	Penambahan Luas Pertanian											
	Tercapainya Perluasan Areal Tanam											
	1. Jumlah Penambahan Luas Baku Lahan Padi (Ha)	23.000	200.600	243.100	266.700	266.600						
	2. Jumlah Penambahan Luas Tanam Padi (Ha)	600.000	118.964	65.000	40.000	26.036						
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian						4.698	1.461,25	870	670	500	8.199,25
	Meningkatnya Infrastruktur Air Irigasi Mendukung Produksi Pertanian											





No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya (Ha)	2.478,182	469.532	300.000	200.000	100.000	4.698	751,25	480	320	160	
	Jumlah bangunan konservasi air yang dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim (Unit)	0	2.500	500	500	500	0	250	50	50	50	
	Jumlah bangunan dan peralatan pelengkapnyanya pemanfaatan sumber air yang dibangun (unit)	0	2.000	1.250	1.500	1.750	0	160	100	120	140	
	Jumlah luas areal lahan rawa yang jaringan irigasinya dibangun/direhabilitasi (Ha)	0	100.000	80.000	60.000	50.000		300	240	180	150	
	Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (paket)			1	1	-			2	2		
	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian						2.065,80	3.837	4.712	5.148	5.159	
	Meningkatnya luasan areal pertanian, Pengoptimalan lahan, dan mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta mendorong peningkatan status kepemilikan lahan petani dan mengevaluasi pemanfaatan sertifikat tanah petani.											
	Jumlah Cetak sawah (Ha)	23.000	200.600	243.100	266.700	266.600	577,90	3.801	4.619	5.067	5.065	
	Jumlah bidang tanah petani yang di prasertifikasi / pasca sertifikasi (persil)		80.000	80.000	80.000	85.000	0	16	16	16	17	
	Jumlah Updating data lahan sawah (dokumen)		0	228	222	228		0	57	45	57	
	Jumlah Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu (Ha)		5.000	5.000	5.000	5.000	0	20	20	20	20	
	Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian (Ha)	951.301	-	-	-	-	1.144,20					



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Jumlah Pengembangan Metode SRI (Ha)	163.833	-	-	-	-	343,70						
	Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP) (unit)	-	-	-	-	-							
	Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) (unit)	-	-	1.600	-	-							
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian						3.304	3.859	3.960	3.589,50	3.322,50	18.035	
	Penyaluran dan Meningkatkan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian												
	Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian (unit)	56.937	81.000	83.025	66.420	56.457	3.304	3.859	3.955	3.582	3.315	18.015	
	Jumlah Pembentukan dan peningkatan kapasitas UPJA (kelompok)	0	0	20	30	30	0		5	7,50	7,50		
	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Diljen Prasarana dan Sarana Pertanian						1.076,10	224,93	224,93	224,93	224,93		
	Meningkatnya fasilitas pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal						1.299,60	1.458,99	1.000,93	1.052,66	1.106,96		
	Jumlah dokumen perencanaan (Program, Anggaran dan Kejasama), keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan program peningkatan nilai tambah, daya saing, sarana dan prasarana pertanian.	6	6	6	6	6	1.299,60	1.458,99	1.000,93	1.052,66	1.106,96		
	Fasilitas Pupuk dan Pestisida						458,33	57,50	57,50	57,50	57,50		



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Tersalurinya Pupuk Bersubsidi dan Dioptimalkannya Rumah Kompos di Daerah Sentra Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Sentra Peternakan.												
	Jumlah Rumah Kompos yang dibangun untuk mendukung pengembangan pertanian organik (unit)	897	650	250	250	250	460	178,75	68,75	68,75	68,75	68,75	
	Jumlah Layanan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi (layanan)		500	500	500	500	0	87	147	147	154,35	162,07	
	Jumlah Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) (Paket)		500	500	500	500	0	28,90	35,44	35,44	37,22	39,08	
	Jumlah Penguatan PPNS Pupuk dan Pestisida (Paket)		0	30	30	30		0	3,17	3,17	3,33	3,50	
	Jumlah Pupuk Bersubsidi yang disalurkan (juta ton)	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	28.256,34 *)	30.063,19 *)	31.942,32 *)	33.652,32 *)	33.652,32 *)	35.422,17 *)	
	Jumlah Bantuan Langsung Pupuk (juta ton)	0,39											
	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian						504,32	214,20	329,50	325	400		
	Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan, Pembiayaan Kelembagaan, dan Permodalan Pertanian, Serta Peningkatan Perlindungan Terhadap Resiko Gagal Panen Melalui Asuransi Pertanian												
	Jumlah Pembentukan LKMA (LKMA)	50	0	200	200	200	0,32	0	4	4	4	4	
	Jumlah Layanan Pembiayaan Pertanian (Layanan)	0	500				0	45	40,50	40,50	36	36	
	Dukungan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian (Bln)	0	0	12	12	12	0	0	60	60	60	60	



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Luas lahan sawah yang tercekup dalam asuransi pertanian (Ha)	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	144	150	225	225	300	
	Jumlah Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dan Penguatan Modal Usaha (Gapoktan)	3.000	0	0	0	0	360	0	0	0	0	
	Jumlah Asuransi Ternak Sapi	0	120.000	0	0	0	0	19,20	0	0	0	
8	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bioindustri Berkelanjutan						1.990,05	1.891,52	2.435,39	2.757,48	2.702,36	
	Meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian											
	Jumlah Varietas (Galur /klon Unggul baru) (varietas/galur)	79	82	82	85	89						
	Jumlah Teknologi dan Inovasi Peningkatan Produksi Pertanian (teknologi)	195	270	309	312	322						
	Jumlah model pengembangan kelembagaan dan inovasi pertanian (Model)	77	68	79	79	79						
	Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) (Provinsi)	6	4	10	10	4						
	Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP) (Kabupaten)	16	10	20	30	24						
	Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian (rekomendasi)	91	90	52	52	52						
	Jumlah benih sumber tanaman (ton)	3.487	1.725	1.801	1.814	1.814						
	Jumlah bibit sumber ternak (ekor)	11.675	13.500	14.235	14.570	14.960						
	Jumlah teknologi yang didiseminasikan ke pengguna (teknologi)	96	164	148	198	198						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian						40,43	53,01	57,08	59,93	62,93	
	Meningkatnya inovasi pengelolaan dan konservasi SDG, serta sistem produksi pertanian berkelanjutan berbasis bioteknologi											
	Jumlah SDG yang terakreditasi dan terdokumentasi (akselerasi)	1.340	1.340	1.340	1.350	1.350						
	Jumlah galur harapan unggul tanaman (galur)	18	19	21	21	23						
	Jumlah teknologi berbasis bioteknologi dan bioprospeksi (teknologi)	5	5	5	5	5						
	Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan dan pemanfaatan bioteknologi dan SDG pertanian (rekomendasi)	2	2	1	1	1						
	Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian						32,57	38,99	55,31	58,07	60,97	
	Tersedianya teknologi dan rekomendasi kebijakan pasca panen hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing dalam upaya mendukung sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.											
	Jumlah teknologi pascapanen (penanganan dan pengolahan) (teknologi)	13	20	22	24	26						
	Jumlah Model Agrobioundustri Terpadu (model)	2	0	0	0	0						
	Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan pascapanen pertanian (rekomendasi)	3	3	1	1	1						
	Terbangunnya model penanganan pasca panen tanaman pangan (Unit)											



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah model revitalisasi penggilingan padi kecil dan penanganan pasca panen jagung dan kedelai (unit)	13	0	0	0	0						
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian						147,35	167,07	133,74	140,43	147,45	
	Tersedianya Data, Informasi dan Peningkatan Inovasi Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian											
	Jumlah Sistem Informasi Pertanian (Sistem Informasi)	7	5	0	0	0						
	Jumlah Informasi geospasial sumberdaya pertanian (Peta)	60	330	60	60	60						
	Jumlah Teknologi Pengelolaan Lahan Pertanian (Teknologi)	10	10	11	11	17						
	Jumlah Formula dan Produk Pertanian yang Ramah Lingkungan (Formula)	9	6	6	6	6						
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (Rekomendasi)	6	5	2	2	2						
	Jumlah Database dan Informasi Sumberdaya Lahan Pertanian (Database)	10	0	0	0	0						
	Jumlah model pengembangan pertanian bio-industri berbasis agroekologi/tipologi lahan (Model)	2	0	0	0	0						
	Tersedianya informasi kalender tanam yang sesuai dengan perkembangan iklim											
	Jumlah Sistem Informasi Pertanian (Kalender Tanam) dan Database Pertanian (sistem Informasi)	0	0	5	5	5						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019	
	Pembangunan 100 techno park dan 34 science park di 34 Di Provinsi (Provinsi)												
	Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) (Provinsi)	2	0	0	0	0							
	Daftar inventarisasi dan pemanfaatan lahan bekas pertambangan												
	Jumlah Informasi dan Teknologi Pengelolaan dan Reklamasi Lahan ex. Pertambangan (Teknologi)	0	18	18	3	3							
	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian						746,78	756,24	1.208,02	1.468,75	1.349,18		
	Penyediaan dan Penyebarluasan Inovasi Spesifik Lokasi Mendukung Program Strategis Pembangunan Pertanian Nasional dan Daerah												
	Jumlah teknologi spesifik lokasi (Teknologi)	66	132	165	165	165							
	Jumlah model pengembangan inovasi teknologi pertanian bioindustri (Model)	66	68	66	66	66							
	Jumlah teknologi diseminasi yang didistribusi ke pengguna (Teknologi)	96	164	148	198	198							
	Jumlah rekomendasi kebijakan (Rekomendasi)	34	34	34	34	34							
	Jumlah produksi benih sumber padi, jagung, kedelai (Ton)	3.255	1.507	1.587	1.600	1.600							
	Pembangunan 100 techno park dan 34 science park di 34 Di Provinsi (Provinsi)												
	Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) (Provinsi)	2	1	10	10	4							



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP) (kabupaten)	16	10	20	30	24						
	Dihasilkannya Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri di Daerah											
	Jumlah Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri di Daerah Perbatasan (Model)	-		13	13	13						
	Penelitian/perencanaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian						34,03	43,45	46,88	49,23	51,69	
	Meningkatnya Inovasi dan Adopsi Teknologi Mekanisasi Pertanian untuk Peningkatan Produktifitas, Efisiensi dan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Limbahnya											
	Jumlah teknologi (prototipe, model) mekanisasi pertanian mendukung pengembangan pertanian bioindustri (Teknologi)	7	9	9	9	10						
	Jumlah rekomendasi kebijakan nasional mekanisasi pertanian (Rekomendasi)	2	2	2	2	2						
	Jumlah prototipe alisintan yang siap didiseminasikan (Unit)	20	25	30	35	40						
	Pembangunan 100 techno park dan 34 science park di 34 Di Provinsi (Provinsi)											
	Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) (Provinsi)	-	1	-	-	-						
	Meningkatnya pengawasan mutu alat dan mesin pertanian											
	Jumlah alat dan mesin pertanian yang diuji/sertifikasi kesesuaiannya terhadap standar (Unit Alisintan)	-	275	275	275	275						





No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Penelitian/Analisis Sosialisasi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian						33,45	39,77				Sesuai Kepprentan No. 232/Kpts/OT.01014/2016 pindah ke Sejen sejak Januari 2017
	Tersedianya rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan											
	Jumlah rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan (Rekomendasi)	12	12									
	Jumlah rekomendasi kebijakan responsif dan antispasif isu-isu aktual pembangunan pertanian (Rekomendasi)	10	10									
	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura						103,73	103,78	119,89	125,88	132,18	
	Tersedianya benih sumber bawang merah											
	Jumlah VUB hortikultura (VUB)	22	23	-	-	-						
	Jumlah teknologi hortikultura berbasis pertanian bioindustri (Teknologi)	20	20	-	-	-						
	Jumlah benih sumber durian, mangga, manggis dan buah tropika lainnya (tanaman)	6.000	6.000	6.000	-	-						
	Jumlah benih sumber anggrek dan tanaman hias lain (Planlet)	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000						
	Jumlah benih sumber jeruk dan buah sub- tropika ( tanaman)	5.000	5.000	-	-	-						
	Jumlah benih sumber kentang (GO) (Planlet)	40.000	42.500	45.000	47.500	50.000						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018		2019
	Jumlah benih sumber bawang merah, cabai dan sayuran potensial (kg)	35.000	0	-	-	-						
	Jumlah benih sumber krisan (stek)	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000						
	Jumlah rekomendasi kebijakan (rekomendasi)	2	2	2	2	2						
	Jumlah model pengembangan kawasan agribisnis hortikultura (Model)	1	-	-	-	-						
	Jumlah benih sumber bawang merah (Kg)		36.165	37.656	39.140	40.620						
	Tersedianya benih sumber cabai											
	Jumlah benih sumber cabai (Kg)		32	34	35	38						
	Jumlah benih sumber sayuran potensial (Kg)		100	310	325	342						
	Pembangunan 100 techno park dan 34 science park di 34 Di Provinsi											
	Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) (Provinsi)		-	-	-	-						
	Dihasilkannya Varietas Unggul Baru tanaman hortikultura											
	Jumlah VUB Cabai dan Bawang Merah (VUB)		-	2	2	2						
	Dihasilkannya Varietas Unggul Baru tanaman hortikultura											
	Jumlah VUB hortikultura lainnya (VUB)		-	21	24	26						
	Dihasilkannya teknologi inovasi hortikultura											
	Jumlah teknologi cabai dan bawang merah berbasis pertanian bioindustri (Teknologi)		-	2	2	2						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Dihasilkannya teknologi inovasi hortikultura lainnya												
	Jumlah teknologi hortikultura lainnya (Teknologi)	-	-	18	19	20							
	Jumlah benih sumber tanaman hortikultura lainnya (Tanaman)	-	-	11.000	11.000	11.000							
	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan						119,10	131,86	148,77	156,21	164,02		
	Tersedianya produk/formula tanaman perkebunan												
	Jumlah varietas unggul tanaman perkebunan (VUB)	7	7	-	-	-							
	Jumlah teknologi budidaya tanaman perkebunan (Teknologi)	23	23	-	-	-							
	Jumlah formula/ prototipe produk tanaman perkebunan (Produksi)	4	5	4	4	4							
	Tersedianya benih sumber kelapa												
	Jumlah benih sumber: Kelapa (Ton)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							
	Jumlah benih sumber: Jahe, kunyit, kencur, temulawak, Tembakau, kapas, wijen, jarak kepyar, jarak pagar, kenaf dan rosela (kg)	35.400	30.000	44.500	52.100	58.500							
	Jumlah benih sumber: Lada, nilam, serai wangi, teh (Stek)	405.000	405.000	525.000	535.000	625.000							
	Jumlah benih sumber: Cengkeh, jambu mete, pala (Pohon)	60.000	60.000	-	-	-							
	Tersedianya benih sumber kopi dan kakao												
	Jumlah benih sumber: Kopi dan kakao (Batang)	20.000	25.000	-	-	-							
	Jumlah benih sumber: Kopi Robusta dan karet (ribu Entres)	100.000	100.000	560.000	560.000	560.000							



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016		2017	2018	2019	
	Tersedianya benih sumber tebu												
	Jumlah benih sumber Tebu (G2) (Budset)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
	Jumlah benih sumber: Rami (ribu Rizome)	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000							
	Jumlah rekomendasi kebijakan (Rekomendasi)	6	6	2	2	2							
	Jumlah model bioindustri berbasis perkebunan (Model)	5	-	-	-	-							
	Pembangunan 100 techno park dan 34 science park di 34 Di Provinsi (Provinsi)												
	Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) (Provinsi)	-	1	-	-	-							
	Dihasilkannya Varietas Unggul Baru tanaman perkebunan												
	Jumlah varietas tebu (VUB)	-	-	1	1	1							
	Dihasilkannya Varietas Unggul Baru tanaman perkebunan lainnya												
	Jumlah varietas unggul tanaman perkebunan lainnya (VUB)	-	-	6	6	6							
	Dihasilkannya teknologi budidaya tanaman perkebunan												
	Jumlah teknologi budidaya tanaman tebu (Teknologi)	-	-	2	2	2							
	Dihasilkannya teknologi budidaya tanaman perkebunan lainnya												
	Jumlah teknologi budidaya tanaman perkebunan lainnya (Teknologi)	-	-	22	22	22							
	Dihasilkannya Inovasi Teknologi Pengembangan Bahan Bakar Nabati dan Bioenergi												



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Teknologi Pengembangan Bahan Bakar Nabati dan Bioenergi (Teknologi)	-	-	3	3	3							
	Tersedianya benih sumber tanaman perkebunan lainnya												
	Jumlah benih sumber tanaman perkebunan lainnya (Tanaman)	-	-	80.000	80.000	80.000							
	Penelitian dan Pengembangan Peternakan						115,34	113,92	127,28	133,65	140,33		
	Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung ketersediaan protein hewani												
	Jumlah galur unggul/ harapan ternak dan TPT spesifik agroekosistem (Galur/Rumpun)	16	16	16	16	16							
	Jumlah bibit sumber ternak (Ekor)	11.675	13.500	14.235	14.570	14.960							
	Jumlah benih sumber tanaman pakan ternak (Batang)	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000							
	Jumlah teknologi peternakan dan veteriner berbasis bioindustri, bioscience dan bioengi neering (Teknologi)	34	34	34	34	34							
	Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan (Rekomendasi)	5	5	2	2	2							
	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan						165,84	158,30	224,71	235,94	247,74		



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Tersedianya Benih Sumber, Varietas Unggul Baru, dan Peningkatan Inovasi Teknologi Tanaman Pangan Mendukung Pencapaian Swasembada Padi dan peningkatan produksi Tanaman Pangan lainnya dengan teknologi ramah lingkungan dan minimum eksternal input.												
	Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan (VUB)	16	17	15	15	15							
	Jumlah teknologi budi daya, panen, dan pascapanen primer tanaman pangan (Teknologi)	17	17	16	16	16							
	Jumlah model pembangunan pertanian bioindustri berbasis tanaman pangan di lahan sub-optimal (Model)	1	0	0	0	0							
	Jumlah produksi benih sumber padi, serealita, serta kacang dan umbi (Ton)	232	218	214,30	214,30	214,30							
	Jumlah saran kebijakan (Rekomendasi)	9	9	6	6	6							
	Pembangunan 100 techno park dan 34 science park di 34 Di Provinsi (Provinsi)												
	Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) (Provinsi)	1	1	-	-	-							
	Terselenggaranya SL-Kedaulatan Pangan yang mengintegrasikan 1000 Desa Mandiri Benih												
	Jumlah Model Sekolah Lapang (SL) Ke daulatan Pangan Terintegrasi Desa Mandiri Benih (Provinsi)	-	15	26	26	26							



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019
	Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian						32.343,28	30.521,02	-	-	-	Sesuai Keputusan No. 233/Kpts/ OT.01014/2016 pindah ke Setjen sejak Januari 2017
	Tersedianya berbagai informasi iptek pertanian dan pemanfaatannya secara intensif oleh pengguna melalui pengembangan produk dan layanan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna											
	Jumlah artikel dalam publikasi yang diterbitkan (Judul)	189	191	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah tambahan koleksi perpustakaan (Judul)	650	800	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembangunan 100 techno park dan 34 science park di 34 Di Provinsi (Provinsi)											
	Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP) (Provinsi)	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian						419,08	254,61	313,71	329,40	345,87	
	Pengembangan Manajemen Perencanaan Program dan Anggaran, Kerjasama, Pengelolaan Sumberdaya, dan Hasil Litbang Pertanian											
	Jumlah dokumen manajemen Litbang Pertanian (Dokumen)	12	12	12	12	12						
	Jumlah kerjasama kemitraan pengembangan teknologi (Kontrak)	150	150	150	150	150						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Jumlah perlindungan HKI dalam rangka alih teknologi. (Invensi)	45	45	45	45	45						
	Jumlah perjanjian kerjasama lisensi hasil Balaibangtan (Lisensi)	10	10	10	10	10						
	Jumlah pengembangan SDM litbang (Orang)	1.380	1.405	1.430	1.455	1.455						
	Jumlah pengadaan sarana prasarana penelitian (Paket)	7	7	7	7	7						
9.	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian							1.248,60			3.158,98	
	Tahun 2018-2019:										1258,04	
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian								851,59		888,6	
	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan											
	Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional (%)				10	15						
	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional											
	Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional (%)				27,5	30						
	Rasio kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional (%)				2,3	2,4						
	Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert)				3,32	3,34						





No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan Pertanian												
	Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan (%)			22		20							
	Tenwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian												
	Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektoral Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)			82		83							
	Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (Nilai)			86,25		86,50							
	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian								219,64			245,36	
	Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu												
	Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan (%)			22		20							
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian												
	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (Skala Likert)			3,75		3,85							
	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian								485,36			516,98	



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu												
	Jumlah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu pada tahun berjalan (Kelembagaan Petani)			34.770	34.770	34.770							
	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kelas kemampuannya (Kelembagaan Petani)			120.000	120.000	120.000							
	Jumlah kelembagaan petani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) (Kelembagaan Petani)			50	50	75							
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian								146,58	126,26			
	Tenajudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan BPPSDMP												
	Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)				82	83							
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) (Nilai)				86	86,5							
	Tenajudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan BPPSDMP												
	Rasio temuan BPK yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya (%)				12,5	10							



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Rasio temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkungan BPPSDMP yang terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya (%)				20	10						
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Badan BPPSDMP											
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Badan BPPSDMP (Skala Likert)				3,76	3,81						
	Tahun 2017:							1206,97	1.236,65	1.537,22		
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian							855,19	830,19	1.154,36		
	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani											
	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan petani (%)				25							
	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang meningkat kapasitasnya (Unit)				0							
	Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian											
	Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang menerapkan hasil berlatih (Orang)				27103							
	Tersertifikasinya SDM pertanian sesuai profesinya											
	Jumlah SDM pertanian yang menerapkan hasil sertifikasi sesuai profesinya (Orang)				934							



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen												
	Jumlah layanan administrasi dan manajemen Badan PPSDMP (Layanan)		104										
	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian						214,06		212,28	315,47			
	Mantapnya sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda; pelibatan perempuan petani/pekerja												
	Aparatur Pertanian dan Non Aparatur Pertanian yang terlatih												
	Jumlah aparatur pertanian dan Non aparatur pertanian yang terlatih (Orang)			27103									
	Sarana dan prasarana pembelajaran Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)												
	Jumlah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) yang terfasilitasi sarana dan prasarana pembelajarannya			1									
	Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani			0									
	Sarana dan prasarana Pembelajaran UPT Pelatihan Pertanian												
	Jumlah UPT Pelatihan Pertanian yang terfasilitasi sarana dan prasarana pembelajarannya (unit)			10									
	Desa yang terfasilitasi oleh Program Rural Empowerment Agriculture Development (READ)												



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019	
	Jumlah desa terfasilitasi Replikasi READ (Desa)			30									
	Tenaga Kerja yang disertifikasi profesi bidang pertanian												
	Jumlah SDM pertanian yang disertifikasi (orang) (di tahun 2018 alokasi anggaran di Kegiatan Pendidikan Pertanian)			934									
	Dukungan Manajemen Pelatihan Pertanian												
	Layanan pendidikan dan pelatihan (Layanan)			143									
	Layanan internal (Overhead)												
	Layanan internal (overhead) (Layanan)			533									
	Layanan Perkantoran												
	Layanan Perkantoran (Layanan)			12									
	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian									571,45	508,75	654,37	
	Terfasilitasinya penyuluhan pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan												
	Jumlah penyuluh pertanian PNS, THL-TBPP dan penyuluh swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya (Orang)			48,405									
	Terfasilitasinya WKPP di lokasi sentra pangan yang dibina oleh penyuluh pertanian												
	Jumlah WKPP yang dibina oleh penyuluh pertanian melalui Sekolah Lapangan (Unit)			8,417									



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Terbitnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyuluhan Pertanian Layanan internal (Layanan)			56								
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pembangunan SDM Pertanian								109,16	184,51		
	Terbitnya peraturan tentang pelayanan administrasi dan manajemen Badan PPSDMP							69,67				
	Jumlah dokumen peraturan tentang pelayanan administrasi dan manajemen yang diterbitkan (Layanan)			104								
	Terasilitasinya layanan internal organisasi											
	Layanan perkantoran (bulan)			12								
	Tahun 2016 :							1423,6				
	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian							1363,07				
	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani											
	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)		21220									
	Jumlah BPP yang meningkat kapasitasnya (unit)		2000									
	Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur											
	Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)		600									
	Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur											



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019
	Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkatkan kompetensinya kerjanya (orang)		25397									
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen											
	Jumlah layanan administrasi dan manajemen Badan PPSDMP (Dokumen layanan)		70									
	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian						299,31					
	Mantapnya sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda; peilabatan perempuan petani/pekerja dan inkubator agribisnis/pengembangan Agro Techno Park											
	Peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian (Orang)		25397									
	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian (Orang)		1420									
	Layanan Internal Organisasi (dokumen)		278									
	Jumlah Dukungan pemantapan sistem pelati han pertanian (Bulan)		12									
	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian									759,78		
	Mantapnya sistem penyuluhan pertanian dalam meningkatkan kemampuan petani; kemandirian kelembagaan petani dan pola hubungan pemerintah											



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019	
	Peningkatan kinerja penyuluh pertanian (orang)		52168										
	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani (unit)		21220										
	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian (unit)		2548										
	Layanan Internal Organisasi (dokumen)		56										
	Revitalisasi Pendidikan Pertanian												
	Tercapainya revitalisasi pendidikan pertanian dalam meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda		7.042 orang; 30 dokumen layanan; 12 bulan							226,81			
	Peningkatan kapasitas SDM pertanian melalui pendidikan tinggi pertanian (orang)		7042										
	Layanan Internal Organisasi (dokumen)		30										
	Jumlah dukungan revitalisasi pendidikan pertanian (bulan)		12										
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian									77,17			
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen dari aspek Perencanaan, Perundang-undangan, Kepegawaian, Keuangan dan Penyiapan, data dan evaluasi, serta pelaporan												





No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019	
	Pelayanan administrasi dan manajemen dibidang penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian (dokumen)		70										
	Dukungan manajemen dan teknis lainnya (bulan)		12										
	Tahun 2015 :						1.293,61						
	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian						1.293,61						
	Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani												
	Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (unit)	17808											
	Jumlah BPP yang meningkat kapasitasnya (unit)	4132											
	Jumlah penyuluh pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)	48608											
	Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur												
	Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)	5065											
	Meningkatnya kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian												
	Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian (orang)	2475											
	Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang meningkat kompetensi kerjanya (orang)	25760											
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen												



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Jumlah layanan administrasi dan manajemen Badan PPSDMP (Dokumen layahan)	71											
	Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian						299,45						
	Mantapnya sistem pelatihan pertanian dalam meningkatkan kompetensi aparatur pertanian dan non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda; pelibatan perempuan petani/pekerja dan pengembangan Agro Techno Park	26,964 orang; 228 unit; 30 desa; 255 dokumen; 12 bulan											
	Jumlah Kelembagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan (kelem bagaan UPT Pusat, UPT Daerah, P4S, Agro Techno Park) (Unit)	228											
	Jumlah Ketenagaan Pelatihan Pertanian yang Difasilitasi dan Dikembangkan (Orang)	1204											
	Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Pertanian (Orang)	15080											
	Jumlah Non Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Pelatihan Pertanian (Orang)	10680											
	Jumlah Dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan pelatihan, kelembagaan dan ketenagaan pelatihan, serta pemberdayaan petani yang dihasilkan (Dokumen)	255											
	Jumlah desa yang meningkatkan Kapasitasnya melalui program Replikasi READ (desa)	30											



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019
	Jumlah Dukungan pemantapan sistem pelatihan pertanian (Bulan)	12										
	Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian						191,01					
	Tercapainya revitalisasi pendidikan pertanian serta pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian dalam meningkatkan kapasitas aparatur pertanian dan nakh aparaturn pertanian, daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda	7.130 org; 5 dok Standard- isasi: 23 unit; 12 bln										
	Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)	5065										
	Jumlah SDM Pertanian yang tersertifikasi profesi bidang pertanian (orang)	2475										
	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian						680,63					
	Mantapnya sistem penyuluhan pertanian dalam meningkatkan kemampuan petani; kemandirian kelembagaan petani dan pola hubungan pemerintah	22.479 unit; 68 dokumen; 48608 orang										
	Jumlah kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang difasilitasi (Unit)	4671										
	Jumlah kelembagaan petani dan ekonomi petani yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	17808										
	Jumlah dokumen Program dan Kerjasama, Penyelenggaraan, Monev dan Pembinaan Ketenagaan Penyuluhan (Dokumen)	68										



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Jumlah ketenangan penyuluhan yang difasilitasi (Orang)	48608											
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian						62,92						
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen	71 dokumen; 12 bulan											
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Data dan Informasi SDM Pertanian, Perundang-undangan, Kepegawain, Keuangan dan perlengkapan, kapan, evaluasi, pelaporan, ketumasan dan perpustakaan (Dokumen)	71											
	Dukungan manajemen dan teknis lainnya (Bulan)	12											
	Pendidikan Menengah Pertanian										59,6		
	Mantapnya pendidikan menengah pertanian dalam meningkatkan kapasitas non aparatur pertanian; daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda												
	Jumlah Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah pertanian (Orang)	18403											
	Jumlah Kelembagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	84											
	Jumlah Ketenagaan SMK PP yang difasilitasi dan dikembangkan (Orang)	381											
	Jumlah Dokumen Program, kerjasama dan Penyelenggaraan pendidikan menengah pertanian yang dihasilkan (Dokumen)	13											



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Jumlah Dukungan pemantapan pendidikan menengah pertanian (Bulan)	12											
10 ***	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						632,39	705,39	789	816,75	687,41		
	Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat												
	-Skor Pola Pangan Harapan	84,10	86,20	88,40	90,50	92,50							
	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)												
	-Konsumsi Energi (kka/kap/hr)	2.004	2.040	2.077	2.113	2.150							
	-Konsumsi Protein (gram/kap/hr)	56,10	56,40	56,60	56,80	57							
	Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen												
	-Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP							
	-Kofisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen	CV < 5%	CV < 5%	CV < 5%	CV < 5%	CV < 5%							
	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan												
	-Penurunan jumlah penduduk rawan pangan (%/Tahun)	1	1	1	1	1							
	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan						105,04	103,40	88,57	110,11	112,80		
	Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Distribusi dan Cadangan Pangan Serta Stabilitas Harga Pangan	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP							
	Model lembaga distribusi pangan masyarakat (Gapokan)	358	310	380	395	410							
	Model lumbung pangan masyarakat (Unit)	1.724	1.689	800	1.500	1.500							



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Data/informasi pasokan dan harga pangan (Lokasi)	35	35	35	35	35						
	Pemantauan, evaluasi dan perumusan kebijakan distribusi, harga dan cadangan pangan (Rekomendasi)	13	5	5	5	5						
	Kajian Pasokan Pangan (Rekomendasi)	28	26	26	26	26						
	Kajian Harga Pangan (Rekomendasi)	-	26	26	26	26						
	Kajian Cadangan Pangan (Rekomendasi)	-	26	26	26	26						
	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan						111,61	95,60	110,30	106,99	107,48	
	Mantapkan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan/berkurangnya Jumlah penduduk rawan pangan per tahun	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01						
	Model Kawasan Mandiri Pangan (Kawasan)	192	267	342	310	300						
	Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (Lokasi)	456	456	456	456	456						
	Kajian kerawanan pangan (Rekomendasi)	35	35	35	35	35						
	Pemantauan, evaluasi dan perumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan (Rekomendasi)	35	31	31	31	31						
	Analisis ketahanan dan kerentanan pangan wilayah (Peta FSVA)	35	35	35	35	35						
	Kajian ketersediaan pangan (Rekomendasi)	36	35	35	35	35						
	Kajian akses pangan (Rekomendasi)	-	35	35	35	35						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan						130,04	187,17	258,14	254,38	258,36	
	Meningkatnya Pemantapan Pengankaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	84,10	86,20	88,40	90,50	92,50						
	Model pekarangan Pangan (Desa)	4.410	5.500	8.106	7.818	7.818						
	Pemantauan, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP (Rekomendasi)	35	35	35	35	35						
	Promosi pengankaragaman konsumsi pangan (Lokasi)	35	35	35	35	35						
	Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan (Rekomendasi)	35	35	35	35	35						
	Koordinasi penanganan keamanan pangan segar (Rekomendasi)	65	85	105	125	145						
	Model Pangan Pokok Lokal (Unit)	31	37	21	21	21						
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan						285,70	319,22	331,99	345,27	208,77	
	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara Profesional dan Berintegritas di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan	12 bulan layanan						
	Hasil Usaha tani terpadu (KM)	11	11	11	11	-						
	Pemberdayaan petani kecil (KM)											
	Peningkatan Kapasitas Kelompok (Desa)	224	224	224	224	-						
	Pengelolaan Sumberdaya dan infrastruktur (Unit)	224	2.240	2.240	2.240	-						
	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Kerja Sama (Dokumen)	39	35	35	35	35						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Dokumen Keuangan dan Periengkapan (Dokumen)	35	35	35	35	35						
	Hasil pemantauan dan evaluasi program (Laporan)	39	35	35	35	35						
	Dokumen kepegawaian, organisasi, humas, hukum (Dokumen)	153	1	1	1	1						
	Sidang pleno, Konferensi dan Sidang Regional ketahanan pangan (Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1						
	Dukungan manajemen dan administrasi (Bulan Layanan)	12	12	12	12	12						
	Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	12	12	12	12	12						
	Rancangan Perpres pembentukan lembaga otoritas pangan (Rancangan)											
11.	Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati						747,91	1.439,76	1.442,90	1.479,80	1.501,70	
	Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTIK											
	-Presentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina impor di tempat pemasukan yang telah ditetapkan	94%	95%	96%								
	-Presentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pemasukan yang telah ditetapkan	86%	87%	88%								





No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019
	-Prosentase media pembawa yang memenuhi sistem jaminan kesehatan melalui sertifikasi karantina antar area di tempat pengeluluran yang telah ditetapkan	86%	87%	88%								
	Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP HPHK dan OPTK dan keamanan hayati											
	-Prosentase jumlah sertifikat ekspor yang ditolak oleh negara tujuan melalui tempat pengeluluran yang ditetapkan	0,10%	0,10%	0,10%								
	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian											
	-Persentase penyelesaian kasus pelanggaran perkarantinaaan	5%	5%	5%								
	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Karantina Pertanian	80	81	82								
	Peningkatan Kepatuhan, Kerja Sama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan						10,51	18,60	18,90	20,60	22,80	
	Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaaan											
	Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pengawasan dan penindakan perkarantinaaan pertanian (Dokumen)	2	2	2								
	Jumlah dokumen pembinaan bimbingan teknis dan dokumen monitoring pengawasan dan penindakan (Laporan)	4	4	4								



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya kualitas kerjasama nasional/internasional												
	Jumlah harmonisasi kerjasama perkarantinaan dengan negara mitra yang terimplementasikan (LAPOBAN)	1	2	1									
	Jumlah MOU dengan K/L terkait yang terimplementasikan (Dokumen)	1	1	1									
	Meningkatnya desiminasi SPS dengan stakeholder dan instansi terkait												
	Jumlah desiminasi SPS	1	1	1									
	Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses												
	Jumlah Aplikasi berbasis IT terkait internal dan eksternal perkarantinaan pertanian (APLIKASI)	2	2	2									
	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani						8,20	12,46	13,80	15,20	16,80		
	Tersusunnya kebijakan teknis perkarantinaan												
	Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan penyebarannya HPHK, dan keamanan hayati (Dokumen)	2	1	1									
	Jumlah keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang pencegahan masuk dan penyebarannya HPHK, dan keamanan hayati hewani (DOKUMEN)	8	8	7									



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019
	Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan penyebarannya HPHK dan keamanan hayati hewan (LAPORAN)	18	18	14								
	Meningkatnya kualitas laboratorium UPT Karantina pertanian											
	Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya	3	3	3								
	Meningkatnya kemampuan deteksi risiko											
	Jumlah dokumen Analisis Resiko HPHK (Dokumen)	0	2	3								
	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati						9,90	12,80	13,80	15,20	16,80	
	Tersusunnya kebijakan teknis perkarantina											
	Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan penyebarannya OPTK dan keamanan hayati nabati (DOKUMEN)	2	1	2								
	Jumlah peraturan/keputusan Menteri tentang pencegahan masuk dan penyebarannya OPTK dan keamanan hayati nabati (DOKUMEN)	10	10	8								
	Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen monitoring pencegahan masuk dan penyebarannya OPTK dan keamanan hayati nabati (LAPORAN)	18	18	12								



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Meningkatnya Kualitas Laboratorium UPT Karantina Pertanian												
	Jumlah UPT yang laboratoriumnya terakreditasi sesuai ruang lingkup tugasnya	3	3	3									
	Meningkatnya kemampuan deteksi risiko												
	Jumlah dokumen Analisis Resiko OPTK (DOKUMEN)	10	10	10									
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina pertanian									118,70	142,70	157	172,60
	Tersedianya SDM aparatur yang kompeten dan profesional												
	Jumlah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan (KEG)	6	13	13									
	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan / pelatihan (ORG)	500	500	500									
	Terkelolanya anggaran secara optimal												
	Opini BPK terhadap laporan keuangan BARANTAN	WTP	WTP	WTP									
	Terwujudnya good governance & clean government												
	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi & pelaporan karantina pertanian (Dokumen)	17	17	17									
	Jumlah dokumen rencana kinerja & penyusunan anggaran	65	65	65									
	Jumlah dokumen pengembangan & pengelolaan kepegawain (Dokumen)	5	5	5									



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target				ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019
	Jumlah dokumen pengembangan integritas barantan dan reformasi birokrasi (Dokumen)	1	3	3								
	Jumlah dokumen tata laksana dan inisiatif anti korupsi	1	3	3								
	Jumlah peraturan perkarantinaan yang telah disahkan (Dokumen)	3	3	3								
	Jumlah laporan indeks kepuasan informasi layanan perkarantinaan (Bulan Layanan)	12	12	12								
	Jumlah laporan pengelolaan TU & rumah tangga (Laporan)	12	12	12								
	Tingkat Dukungan Aparatur pegawai & Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN)	12	12	12								
	Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai											
	Jumlah dan jenis sarana infrastruktur teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT)	88	100	100								
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian						35,30	56,50	55,70	60,50	66,20	
	Pengembangan teknik dan metoda pengujian laboratorium											
	Jumlah teknik dan metoda pengujian laboratorium yang dikembangkan (DOKUMEN)	1	8	8								
	Jumlah validasi metode pengujian (LAPORAN)	1	8	8								
	Jumlah koleksi HPHK dan OPTK (DOKUMEN)	10	10	10								



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018
	Jumlah akreditasi ruang lingkup pengujian HPHK dan OPTK (LAPORAN)	6	6	6							
	Jumlah Sampel Uji Rujukan (LAPORAN)	1.600	1.440	1.296							
	Jumlah ruang lingkup yang tersertifikasi (LAPORAN)	1	1	1							
	Dukungan Internal Administrasi (BULAN)	12	12	12							
	Pengembangan teknik dan metoda uji terapan										
	Jumlah teknik dan metode uji terapan yang dikembangkan (DOKUMEN)	3	3	3							
	Jumlah uji terapan yang dapat dipublikasikan melalui jurnal nasional / internasional (DOKUMEN)	1	1	1							
	Jumlah juklak/juknis yang di desiminasi	6	6	6							
	Dukungan Internal Administrasi (BULAN)	12	12	12							
	Tenwujudnya good governance & clean government										
	Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN)	12	12	12							
	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai										
	Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT) :	79	100	100							



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati						565,30	1.208,70	1.198	1.211,30	1.206,50	
	Meningkatnya tindakan karantina											
	Jumlah sertifikat karantina Impor, ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina (LAPORAN)	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
	Dukungan Internal Administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian (BULAN)	12	12	12								
	Terwujudnya good governance & clean government											
	Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran (BULAN LAYANAN)	12	12	12								
	Tersedianya sarana dan prasarana perkantinaan yang memadai											
	Jumlah dan jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai (UNIT) :	1.982	2.000	2.000								
	Penambahan jumlah instalasi karantina hewan dan tumbuhan yang sesuai standar	0,20	0,20	0,20								
12.	Pendidikan Pertanian								351,77	406,45	688,10	
	Program Pendidikan Pertanian								406,45	688,1		
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan Pertanian											
	Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan (%)				90	90						



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
	Pendidikan Pertanian										406,45	688,1	
	Meningkatnya kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu												
	Jumlah lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian (Orang)				794	1.073							
	Rasio lembaga pendidikan pertanian yang memiliki akreditasi minimal B terhadap total lembaga pendidikan pertanian (%)				80	80							
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan pertanian												
	Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan pertanian (Skala Likert)				3	3.08							
	Program Pendidikan Pertanian												
	Meningkatnya kapasitas aparatur pertanian dan non aparatur pertanian												
	Jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (Orang)				381								
	Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (Orang)				3.500								
	Regenerasi petani melalui Perumbuhan Wirausaha Muda Pertanian oleh mahasiswa STPP, siswa SMK-PP, dan alumni Perguruan Tinggi Mitra (kelompok)				747								
	Pendidikan Pertanian										351,77		





No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)				Keterangan				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016		2017	2018	2019	
	Bertambahnya aparatur dan non aparatur pertanian yang mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian												
	Jumlah aparatur dan non aparatur pertanian yang mengikuti Pendidikan Tinggi Pertanian (S1/D4) (orang)			3.731									
	Penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui seminar, Lokakarya, Workshop, dan Studi Banding												
	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tinggi bidang pertanian yang mengikuti seminar, Lokakarya, Workshop, dan Studi Banding (orang)			184									
	Guru, dosen, calon tenaga pendidik dan aparatur pertanian yang mengikuti Pendidikan Formal Pasca Sarjana (S2 dan S3)												
	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan Formal Pasca Sarjana (S2 dan S3) (orang)			300									
	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana STPP												
	Jumlah STPP yang terfasilitasi sarana dan prasarannya (unit)			7									
	Terjalinnnya Kemitraan dengan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri dalam kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas strategis pertanian												
	Jumlah mahasiswa dari perguruan tinggi negeri yang melakukan pendampingan dalam kegiatan peningkatan produksi komoditas strategis pertanian (Orang)			7.600									



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)			Keterangan				
		2015	2016	2017	2018	2019	2016		2017	2018	2019	
	Siswa, mahasiswa, alumni yang bergerak dibidang kewirausahaan pertanian											
	Regenerasi petani melalui Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian oleh mahasiswa STPP, siswa SMK-PP, dan alumni Perguruan Tinggi Mitra (kelompok)			747								
	Terbitnya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria tentang pendidikan tinggi pertanian											
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Layanan)			12								
	Terlaksananya pendidikan pertanian di SMK-PP			22.037								
	Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan menengah pertanian di SMK-PP (siswa)											
	Pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan											
	Pengabdian masyarakat di wilayah perbatasan (Provinsi)			1								
	Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi SMK-PP											
	Jumlah kelembagaan SMK-PP yang terpenuhi sarana dan prasaranya			3								
	Layanan internal (overhead)											
	Layanan internal (overhead) (Layanan)			918								
	Dukungan manajemen pendidikan											
	Layanan pendidikan dan pelatihan (Layanan)			34.246								



No.	Program/Kegiatan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Target			ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan		
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		2018	2019
	Layanan Perkantoran Pendidikan Pertanian											
	Layanan perkantoran (Bulan)			12								
	Uji kompetensi sertifikasi profesi SDM pertanian											
	Jumlah SDM yang diuji kompetensinya dalam sertifikasi profesi bidang pertanian (Orang)			0								
	Program Pendidikan Menengah Pertanian						60,54					
	Jumlah SDM lulusan pendidikan menengah pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja (orang)		4500									
	Pendidikan Menengah Pertanian											
	Mantapnya pendidikan menengah pertanian dalam meningkatkan kapasitas non aparaturnya; daya tarik, pertanian bagi tenaga kerja muda											
	Peningkatan kapasitas SDM pertanian melalui pendidikan menengah pertanian (orang)		19328									
	Layanan internal organisasi (dokumen)		4									
	Jumlah Dukungan pemantapan pendidikan menengah pertanian (Bulan)		12									





## LAMPIRAN 2



## Lampiran 2

### Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi	Regulasi Terkait	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	I. Input Pertanian Sumberdaya genetik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan UU RI No. 4/2006, Indonesia wajib melaksanakan upaya kebijakan dan hukum untuk mendorong pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya genetik tanaman guna mencapai ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan baik di tingkat nasional, regional maupun global.</li> <li>Diperlukan peraturan pelaksanaan terkait dengan pengaturan mengenai keuntungan finansial dari pemanfaatan sumberdaya genetik tanaman yang diakses dari sistem multilateral, bilateral, organisasi non pemerintah dan sektor swasta.</li> <li>Diperlukan peraturan pelaksanaan terkait prosedur kepemilikan sumberdaya genetik baik lembaga publik maupun perorangan atau badan usaha swasta terutama terkait dengan perjanjian pengalihan bahan (Material Transfer Agreement) dan perlindungan hak kekayaan intelektual pada sumberdaya genetik tanaman harus dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan perjanjian.</li> </ul>	UU RI no. 4 tahun 2006 Tentang Pengesahan Internasional Treaty on Plant Genetic Resources for Food And Agriculture (Perjanjian mengenai sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian).	Badan Karantina	Kementerian Keuangan	2019
	Sarana produksi	Mengatur sistem jaminan ketersediaan pupuk dan benih		Ditjen PSP	Kementerian BUMN, BUMN terkait	2019
	Infrastruktur pertanian	Diperlukan UU yang mengatur tentang infrastruktur pertanian dan perdesaan	Pasal 62 UU RI No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ditjen PSP	Kemen PU, Kemendagri	2019





No.	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi	Regulasi Terkait	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.</li> </ul>	UU RI No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ditjen PSP	Kemendagri, BPN, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/kota	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan penetapan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi maupun kabupaten/kota.</li> </ul>	Pasal 17 UU RI No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ditjen PSP	Bappenas, Bappeda	2019
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan diatur dalam PP mengenai Rencana tata ruang wilayah nasional, dalam Perda mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi, dan dalam Perda mengenai tata ruang wilayah kabupaten.</li> </ul>	Baqian Ketiga UU RI No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ditjen PSP	Bappenas, Bappeda, BPN, Pemda	2019
	Alsintan	Menyusun regulasi yang memperlakukan peredaran dan perdagangan alat mesin pertanian sesuai standar mutu		Ditjen PSP	Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian	2019
	II. Budidaya Usahatani Tanaman Pangan		UU RI No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	Ditjen Tanaman Pangan	Pemda	



No.	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi	Regulasi Terkait	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Usahatani Perkebunan		UU RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan	Ditjen Perkebunan	Pemda	
	Usahatani Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah NKRI yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang lainnya yang terkait.</li> <li>Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan beraskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.</li> <li>Diperlukan peraturan pelaksanaan terkait penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis; pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya genetik, melalui pembudidayaan dan pemuliaan; penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan; penetapan jenis dan standar alat dan mesin peternakan yang peredarannya perlu diawasi; pengembangan budidaya dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan tata ruang; peternakan dan perusahaaan peternakan melakukan tatacara panen yang baik; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; Siskeswanas sebagai pelaksanaan otoritas veteriner;</li> </ul>	UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ditjen PKH	Pemda	2019





No.	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi	Regulasi Terkait	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Usahatani Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam rangka mengelola dan mengembangkan sumberdaya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; memenuhi kebutuhan, keinginan selera, estetika, dan budaya masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura; meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hortikultura; menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; memberikan perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura nasional; dan meningkatkan sumber devisa negara; dan meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.</li> </ul>	UU RI No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura	Ditjen Hortikultura	Pemda	2019
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan peraturan menteri terkait penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi sumberdaya manusia; standar kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura.</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan Peraturan Menteri terkait bantuan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami gagal panen akibat bencana yang disebabkan perubahan pola iklim.</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan penetapan menteri terkait sumberdaya genetik hortikultura yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah dan sebarannya.</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan ketentuan mengenai varietas tanaman hortikultura yang pengeluarannya dari wilayah NKRI dapat merugikan kepentingan nasional.</li> </ul>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan Peraturan Menteri terkait tata cara uji mutu dan pendaftaran sarana hortikultura.</li> </ul>				



No.	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi	Regulasi Terkait	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan Peraturan Menteri tentang tata cara dan persyaratan penetapan produk unggulan hortikultura.</li> <li>Pemerintah dan pemerintah daerah perlu menetapkan kawasan hortikultura, dan produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam kawasan hortikultura.</li> <li>Diperlukan Peraturan Menteri yang mengatur pendataan dan perizinan, kriteria usaha, pendaftaran usaha, standar proses dan persyaratan teknis minimal, pemberian fasilitas dan insentif, pola kemitraan unit usaha bukidaya hortikultura.</li> <li>Diperlukan Peraturan Menteri terkait ketentuan mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih serta pengeluaran dan pemasukan benih hortikultura.</li> </ul>				
	Petani dan perlindungan petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani; menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan; melindungi petani yang usahatani; melindungi petani dari fluktuasi harga; praktek ekonomi biaya tinggi dan gagal panen; meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani; serta menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usahatani.</li> <li>Diperlukan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim</li> <li>Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melindungi usahatani yang dilakukan petani dalam bentuk asuransi pertanian</li> </ul>	UU RI no. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani			
			Pasal 36 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	Badan Litbang	BMKG, Kemen LH	2019
			Pasal 37 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	Ditjen PSP	BI, Kemenkeu	2019



No.	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi	Regulasi Terkait	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	<b>III. Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran</b>					
	Panen dan Pasca Panen	Diperlukan Peraturan Menteri yang mengatur tata cara kegiatan panen dan Pasca panen yang baik	Pasal 69 UU RI No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura	Ditjen Hortikultura		2019
	Bioindustri dan pengolahan hasil pertanian	Diperlukan UU yang mendorong berkembangnya bioindustri dan pengolahan hasil pertanian		Ditjen PPHP	Kementerian Perindustrian	2019
	Harga	Pemerintah perlu mengatur dan melakukan peninjauan secara periodik terhadap harga pembelian pemerintah terhadap produk hasil pertanian.		Ditjen PPHP	Kemendag, Bulog	2019
	Impor	Pemerintah mengatur dan menetapkan jenis komoditas pertanian, besaran tarif bea masuk produk pertanian yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri serta kepentingan hajat hidup orang banyak.	Paragraf 2 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	Ditjen PPHP	Kemendag	2019
	Ekspor	Pengaturan bea keluar bagi komoditi yang mampu memberikan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri		Ditjen PPHP	Kemendag	2019
	Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan Peraturan Menteri terkait kewajiban pelaku usaha perdagangan produk hortikultura pasar modern memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri</li> <li>Diperlukan Peraturan Menteri terkait penerapan tata cara pemasaran yang baik produk hortikultura.</li> <li>Diperlukan Peraturan Menteri terkait sistem informasi hortikultura yang mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi hortikultura.</li> </ul>	Pasal 73 UU RI No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura	Ditjen PPHP	Kemendag	2019
			Pasal 75 UU RI No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura			
			Pasal 102 UU RI No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura			



No.	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi	Regulasi Terkait	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembatasan pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak berkerjasama dengan kelompok tani, gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian</li> </ul>	Pasal 48 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan			
	Mutu dan keamanan pangan	Pemerintah menetapkan standar keamanan pangan dan mutu pangan	Bagian Ketujuh UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	Ditjen PPHP	BSN	2019
	Jasa Lingkungan	Regulasi yang memberikan jaminan keberembangannya agrowisata di wilayah pertanian		Ditjen PPHP	Kementerian Pariwisata	2019
<b>IV. Sistem Pendukung</b>						
	Sistem Penyuluh	Pengaturan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluh yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluh swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha.	UU RI no. 16 tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	BPSDMP	Kementerian: Perikanan dan Kelautan, Kehutanan	2019
	Sistem Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan sumberdaya manusia di pertanian melalui aparat pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan.				
	Penelitian dan Pengembangan	Diperlukan Peraturan Menteri terkait pemberian insentif bagi peneliti hortikultura yang berprestasi. Pelaku usaha, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pendidikan dalam negeri yang melakukan penelitian hortikultura.	Pasal 111 UU RI No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura	Badan Litbang	BPPT	2019
	Perkarantinaan		UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan	Badan Karantina	Kementerian Perikanan dan Kelautan	2019
	Pembiayaan	Diperlukan regulasi yang mendorong dibentuknya bank bagi petani dan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian	Pasal 65 UU RI No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ditjen PSP	Kemenkeu, Bank Indonesia,	2019



No.	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi	Regulasi Terkait	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	<b>V. Konsumsi dan Ketersediaan Pangan</b>					
	Penyediaan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.</li> <li>Pemerintah perlu menetapkan sentra Produksi Pangan Lokal sesuai usulan Pemerintah Daerah</li> </ul>	UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	BKP	Pemda	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai distribusi pangan</li> </ul>	Pasal 12 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	BKP	Pemda	2019
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan Peraturan Pemerintah mengenai persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan</li> </ul>		BKP	Pemda	2019
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan revisi perundangan terkait otonomi daerah yang menetapkan kembali penanganan ketahanan pangan sebagai urusan pemerintah pusat karena berkaitan dengan ketahanan nasional</li> </ul>	Pasal 88 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	Ditjen PPHP	BSN, BPOM	2019
				BKP	Kemendagri	2019

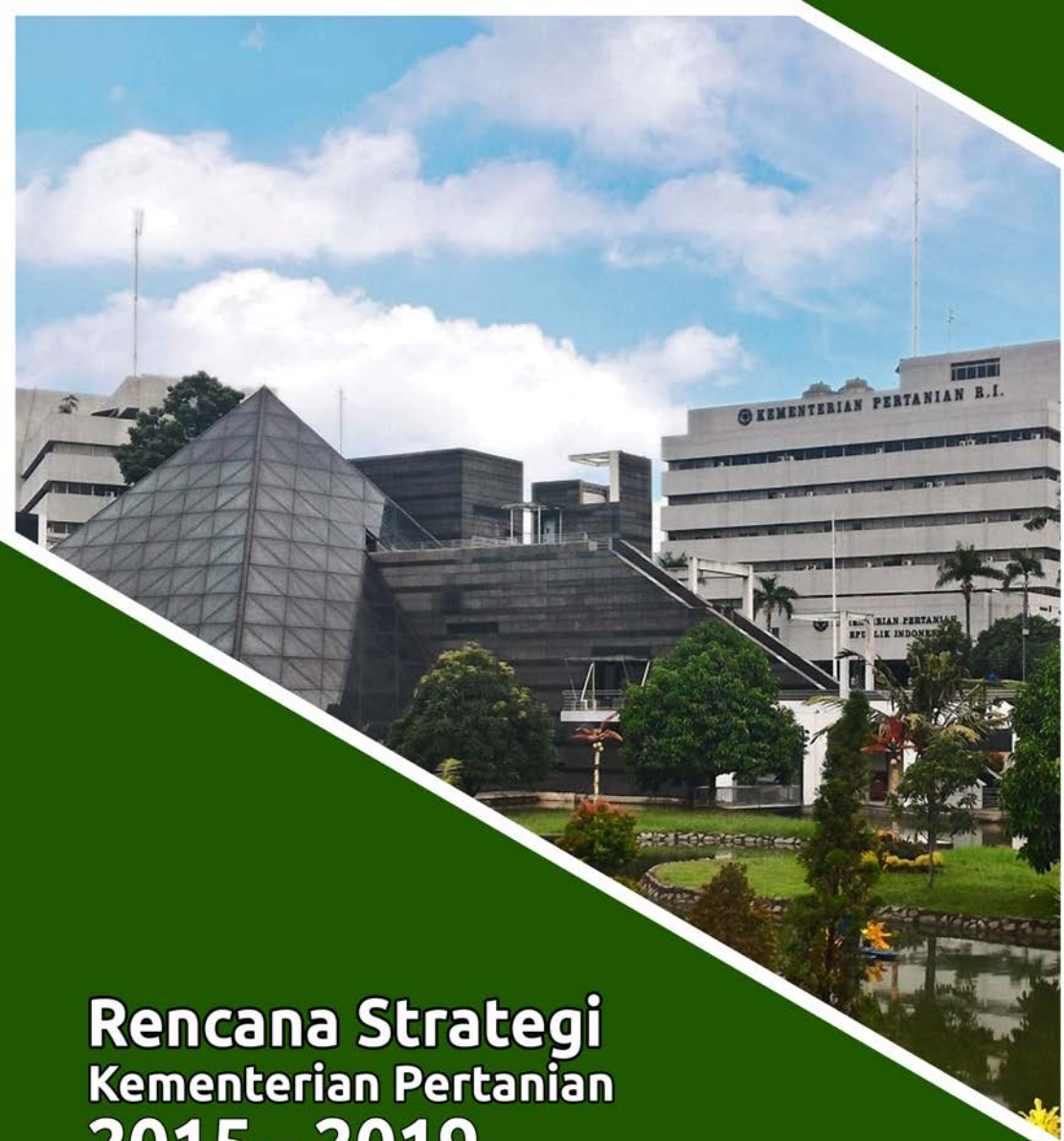


**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal  
Jl. Harsono RM No.3, Gedung A lantai 4  
Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan  
Telp/Fax. 62-21 7804156

*<http://perencanaan.setjen.pertanian.go.id>  
@2018*





# Rencana Strategi Kementerian Pertanian 2015 - 2019



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**